

Buku Karya Akademisi Muda dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia ini sangat unik dan menarik, mengingat didalamnya diulas dengan sangat jelas tentang variabel ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap agregat demand dan agregat supply dalam suatu perekonomian. Penulis pun secara gamblang dan sistematis mengkombinasikannya dengan konsepsi ajaran Hindu yang universal. Buku ini sangat membantu dalam perumusan dan penilaian kebijakan pembangunan ekonomi yang rasionalis. Buku ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa maupun peserta didik di berbagai satuan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dalam aspek ekonomi yang fundamental.

Ir. I Nengah Laba, M.Si.
(Kepala Biro Perekonomian Setda
Pemprov Bali (Periode 2015-2019))

Buku yang sangat bagus mengulas tentang permintaan uang. Dapat dijadikan dasar bagi setiap individu untuk mengambil kebijakan dalam menggunakan uang sebagai alat pembayaran untuk kehidupan sehari-hari. Konsep Tri Samaya yang dikupas secara lugas cukup relevan dijadikan pertimbangan dalam perencanaan keuangan maupun sebagai bahan ajar untuk mengetahui bagaimana konsep uang bila dikorelasikan dengan ajaran Hindu.

Widya Adnyani, SE., MM., Ak.
(Praktisi Keuangan dan Perbankan)

Uang adalah darahnya suatu perekonomian. Kalimat tersebut menjelaskan betapa vitalnya peranan uang dalam dunia ekonomi dan bisnis. Untuk memastikan pelaku ekonomi dapat memenangkan persaingan bisnis maka pengetahuan tentang uang (financial literacy) mutlak dibutuhkan. Buku ini menyajikan dengan lugas dan kritis mengenai hal tersebut. Lebih menarik lagi dikarenakan dalam bahasannya dikombinasikan dengan kearifan lokal Bali yakni ajaran Catur Purusa Artha dan Tri Samaya. Sehingga meneguhkan semangat modernisasi tanpa melupakan akar budaya. Untuk itu, wajib dibaca oleh anak muda yang sedang menjemput masa depan yang lebih baik.

Dr. I.N Suarmana Yasa, SE., M.Si.
(Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha)

Dirajut dengan konsepsi Hindu dalam memahami dasar-dasar sistem ekonomi moneter secara lebih sederhana dan mendalam. Buku ini sangat layak dijadikan acuan dalam mempelajari ekonomi terkhusus tentang moneter.

A.M Widnyani
(Penelitian dan Pemerhati Kebijakan Moneter)

EKONOMIKA UANG BASED ON EMPIRICAL RESEARCH

Dalam model lingkaran ekonomi, uang merupakan mata rantai yang mengkorelasikan semua bagian dan sektor. Uang memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian modern, dapat sangat membantu, tetapi juga dapat mengacaukan perekonomian. Permintaan uang memiliki fungsi strategis bagi otoritas dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas perekonomian. Analisis permintaan uang merupakan suatu kajian indikator besaran ekonomi yang diperlukan untuk mendukung kebijakan di sektor moneter.

Kebijakan moneter merupakan salah satu bentuk kebijakan stabilisasi yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan perekonomian, tercapainya stabilisasi ekonomi diperoleh dengan mengimplementasikan kebijakan moneter serta mengendalikan besaran-besaran moneter yang bergerak secara tidak terkendali. Dengan tidak terkendalinya besaran moneter maka dapat mengakibatkan economic disequilibrium seperti yang terjadi pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun dekade 1997 silam.

Buku ini hadir untuk mengisi kehangatan buku yang menguraikan berbagai besaran ekonomi yang mempengaruhi permintaan uang serta mengkombinasikannya dengan konsepsi ajaran Hindu seperti Catur Purusa Artha, Tri Samaya kemudian dengan bahasa yang lugas, sistematis, mengalir, sehingga mudah dipahami oleh khalayak pembaca. Bagi mahasiswa yang sedang belajar ilmu ekonomi/manajemen/publik, disajikan data pendukung untuk latihan, juga beberapa hasil analisis agar lebih mudah untuk dipahami. Buku ini juga dialamatkan bagi pejabat/otoritas, Lembaga Swadaya Masyarakat atau siapapun yang ingin memahami serta menganalisis besaran ekonomi baik makro, moneter, riil, maupun sektoral.




Putu Krisna Adwitya Sanjaya, dosen muda bidang Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia (FEBP UNHI), Denpasar. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Udayana (2008), Master of Science dengan spesialisasi Moneter Keuangan dan Perbankan berpredikat Cum laude sekaligus menjadi lulusan terbaik di almamaternya pada tahun 2010. Pernah mengikuti workshop quantitative & qualitative research method (2019), short course International Writing School (2018), penyusunan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (2016), multivariate analysis training skills (2015). Telah mempresentasikan makalah dalam beberapa konferensi nasional maupun

internasional a.l.: (1) Konferensi Nasional Hasil Penelitian Meningkatkan Mutu Penelitian dan Peringkat Perguruan Tinggi (2018), (2) Konferensi Nasional Agama, Adat, Seni dan Sejarah di Zaman Millenial (2018), (3) Conference Indonesian Regional Science Association (2017), (4) Conference Bali Hinduism, Traditional and Interreligious Studies (2018), (5) International Conference on Innovation in Research (2018), (6) Conference in Economics, Management and Accounting (2018), (7) International Conference on Possibilities and Probabilities In Higher Education of Asia (2019). Beliau pernah mendapatkan beberapa penghargaan ilmiah (award) diantaranya: (1) Best Paper award, Warmadewa University (2018); (2) Best Presenter Award, Bali (2018); (3) Penelitian & Pengabdian Award dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia untuk kategori Dosen pemenang Hibah Riset Perguruan Tinggi (2016). Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Analisis Data Manajemen dan Akuntansi UNHI (2014-2018) dan saat ini mendapat amanah sebagai managing editor Jurnal Widya Manajemen FEBP serta Sekretaris UNHI Press Denpasar. Beberapa buku telah berhasil dipersembahkan oleh anak Birokrat kelahiran Singaraja ini diantaranya: (1) Metode Mudah Memahami Pengantar Ekonomi Makro, (2) Bali dalam Narasi.

ISBN 978-623-7491-00-2



9 786237 491002


CV. Sadari

Putu Krisna Adwitya Sanjaya, SE., M.Si.

Kata Pengantar :
Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, S.E. (M.TRU)., M.Si.
(Senator DPD-MPR Republik Indonesia)

EKONOMIKA UANG

BASED ON EMPIRICAL RESEARCH


CV. Sadari



Putu Krisna Adwitya Sanjaya, SE., M.Si.

Kata Pengantar :

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, S.E. (M.TRU), M.Si.
(Senator DPD-MPR Republik Indonesia)

EKONOMIKA UANG

BASED ON EMPIRICAL RESEARCH



CV. Sadari

EKONOMIKA UANG : Based On Empirical Research

Putu Krisna Adwitya Sanjaya, SE., M.Si.

Cetakan 1, Agustus 2019

Hak Cipta pada: Penulis

Diterbitkan oleh CV. Sadari

Anggota IKAPI Jabar

Jl. Cikutra No. 276 D, Bandung

Telp. (022) 7206964, Fax (022) 7208592

Email: sadaripress@gmail.com

Copyright © 2019 CV. Sadari

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Desain cover:

Andri Sutira

Tata letak isi dan layout:

Gunawan

Editor:

Asep Syamsul M. Romli

Roni Tabroni

Andri Sutira

ISBN 978-623-7491-00-2



OM Gam Ganapataye Namah

*“Yang menjadi pengetahuan utama dan kecerdasan serta kekuatan pikiran,
yang merupakan api tak kunjung padam pada makhluk hidup ;
Tanpa adanya itu kita tidak mampu berbuat apa – apa, semoga pikiran kami
selalu mengarah kepada yang baik “*

(Yajur Veda, XXXIV.3)

*“ Dasarnya dharma, artha, kama dan moksa adalah hidup ini
Orang yang menghancurkan kehidupan berarti menghancurkan segala-galanya
Orang yang menjaga kehidupan itu berarti menjaga semua makhluk “*

(Sarasamuccaya, 135)

*“Kejarlah Kebijaksanaan dengan penuh hormat dan kerendahan hati, dengan
cara bertanya-tanya dan dengan pelayanan ; orang bijaksana yang dapat
melihat kebenaran akan memberi petunjuk padamu di dalam pengetahuan itu “*

(Bhagavadgita, IV.34)

Ku Persembahkan untuk:

Ida Sang Hyang Widhi Wasa

Kawitan,

Kedua orang tua dan mertua,

Istriku Luh Gede Pradnyawati

KATA PENGANTAR PENULIS

Puja dan puji syukur wajib saya panjatkan karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa* Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan rahmat dan karunia-Nyalah telah memberi petunjuk kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Embrio awal buku ini disusun pada saat saya berhasil memperoleh penelitian hibah Perguruan Tinggi dalam bidang Ilmu Ekonomi terutama bidang kajian Ekonomi Moneter yang kemudian oleh *reviewer*, rekan sejawat dosen, mahasiswa Srata 1 Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia mendorong dipublikasikannya buku yang anda baca ini.

Buku ini tidak berpretensi untuk mengkaji semua determinan penentu permintaan uang yang dikenal luas dalam teori Ilmu Moneter. Kendati demikian, hampir semua faktor penentu permintaan uang secara agregatif yang populer mempengaruhi permintaan uang telah dicoba untuk diulas secara tuntas dalam buku ini termasuk juga dengan menggunakan konsepsi ajaran Agama Hindu seperti *Catur Purusa Artha* dan *Tri Samaya* serta mengkorelasikannya dengan determinasi permintaan uang di Indonesia.

Buku ini disusun secara gamblang, lugas yang dirancang dengan kajian teori, studi empiris, *based on research study* dengan pendekatan ilmiah eminen. Sebagai buku teks, buku ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi maupun praktisi yang dengan sengaja ditulis menggunakan gaya bahasa yang ringan agar lebih mudah dipahami secara komprehensif.

Rancangan dan *draft* buku ini telah saya berikan kepada mahasiswa terutama yang mengambil mata kuliah Ekonomi Makro, Perekonomian Indonesia (sub pokok bahasan kebijakan moneter), Aplikasi Analisis Kuantitatif dan beberapa rekan sejawat. Ternyata materi dalam buku ini disambut dengan gegap gempita oleh para mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Input dari para mahasiswa dan kolega dosen tersebut menjadi bahan pertimbangan serius serta masukan yang amat bernilai bagi saya. Para mahasiswa dan rekan sejawat dosen inilah yang dengan penuh semangat mendorong agar buku ini segera dipublikasi. Untuk itu, kepada merekalah saya haturkan beribu terima kasih.

Sebuah kreasi sebetulnya cukup sulit untuk diinterpretasikan sebagai upaya satu orang saja, tanpa bantuan orang lain. Demikian pula pada buku ini. Buku ini tidak akan mungkin rampung tanpa ada motivasi yang simultan dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Saya menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada rekan sejawat saya di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia I Putu Nuratama, SE.,M.Si, Ak., CA dan Made Dian Putri Agustina, SE.,M.Si yang telah membantu terkait proses pengumpulan data, mengumpulkan referensi, saran dan koreksi mendalam yang diperlukan.

Kepada penerbit CV. Sadari, saya mengucapkan terima kasih atas kesediannya menerbitkan buku ini. Terima kasih kepada Bapak Amin Nurjamin selaku Direktur utama, *Kang* Gunawan Ramadhan yang banyak membantu dalam proses penerbitan buku ini. *Mas* Andri Sutira yang telah mendesain cover buku ini, Bapak Asep Syamsul M. Romli dan Roni Tabroni selaku editor yang telah membantu mengedit secara profesional sehingga buku ini layak menjadi konsumsi publik, beserta segenap staf penerbit yang amat berperan dalam memungkinkannya buku ini sampai ke tangan pembaca sekalian.

Secara terkhusus, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada istri tercinta dr. Luh Gede Pradnyawati, M.Kes yang telah dengan sabar dan selalu mendorong saya untuk selalu berkarya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai dosen maupun sebagai bagian parsial dari *krama* nusantara. Ia selalu mengingatkan hasrat untuk menulis buku ini ritatkala saya terhanyut dalam kesibukan mengerjakan pekerjaan yang lain.

Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan *matur suksma* kepada Putu Oka Tirtayasa, SE Ayahandaku yang telah memberikan teladan dan kerangka dasar berpikir logis dalam mengarungi kehidupan menuju kesuksesan baik lahir maupun bathin. Kepada Dr. Made Heny Urmila Dewi, SE.,M.Si, ibunda tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu memotivasi saya untuk terus berkarya, menulis serta iringan doa yang tanpa henti untuk itu saya menghaturkan *suksma ping banget*. Kepada kedua mertuaku, I Ketut Sumarya, SE beserta Ni Putu Martini Dewi, SE.,M.Si, saya tak lupa saya haturkan *agunging panuwun* atas doa dan berkah pengestunya.

Saya sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan, analisis maupun penyajian, buku ini masih jauh dari kata paripurna. Tiada gading yang tak retak itulah kata pepatah namun berupaya mencari gading yang tak retak sudah saya upayakan sedemikian rupa. Segala masukan, saran, komentar yang bersifat konstruktif akan sangat saya terima dengan rasa senang.

Akhir kata, segala kekurangan maupun kesalahan adalah tanggung jawab saya selaku penulis. Akan tetapi, jikalau terdapat keabsahan dalam buku ini itu semata hanya karena *Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian dan mampu menjadi *setetes air bagi samudera ilmu*, Semoga saja...

Br. Buana Shanti Padang Sambian Denpasar, 28 Juni 2019

Penulis,

Putu Krisna Adwitya Sanjaya



DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

UTUSAN PROVINSI BALI

DR. SHRI I GUSTI NGURAH ARYA WEDAKARNA M WEDASTERAPUTRA SUYASA

SAMBUTAN

Atas Peluncuran Buku

Ekonomika Uang : *Based on Empirical Research*

Oleh : Putu Krisna Adwitya Sanjaya, SE., M.Si



OM SWASTIASTUMERDEKA !

Kebijakan moneter merupakan salah satu bentuk kebijakan stabilisasi yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan perekonomian, tercapainya stabilisasi ekonomi diperoleh dengan mengimplementasikan kebijakan moneter serta mengendalikan besaran-besaran moneter yang bergerak secara tidak terkendali. Dengan tidak terkendalinya besaran moneter maka dapat mengakibatkan *economic disequilibrium* seperti yang terjadi pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun dekade 1997 silam.

Disatu sisi, terdapat generasi muda Bali yang berkarya dalam tulisan dan telah menyelesaikan sebuah buku yang berjudul "Ekonomika Uang : *Based on Empirical Research*" oleh Putu Krisna Adwitya Sanjaya, SE., M.Si, yang memuat tentang kontekstual dari kebijakan moneter terkhusus mengenai permintaan uang dan menguraikan berbagai besaran ekonomi yang mempengaruhi permintaan uang serta mengkombinasikannya dengan konsepsi ajaran Hindu seperti *Catur Purusa Artha*, *Tri Samaya* kemudian memotretnya dengan bahasa yang lugas, sistematis, mengalir, sehingga mudah dipahami oleh khalayak pembaca.

Selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Perwakilan Provinsi Bali, saya mendukung buku karya generasi muda Bali dalam bidang ekonomi demi mewujudkan Tri Sakti Marhaenisme berdikari di bidang ekonomi. Saya harap buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi maupun praktisi khususnya di bidang ekonomi. Ini sebuah wujud nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk bidang penelitian.

Semoga buku ini bermanfaat bagi Bangsa, Negara dan sebagai bagian dari Swadharma perjuangan di Bidang Ekonomi sesuai dengan cita – cita Bung Karno.

OM SHANTI SHANTI SHANTI OM

Denpasar, 30 Juli 2019

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
Utusan Provinsi Bali

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna M Wedasteraputra Suyasa III, SE(MTRU), M.Si
Anggota DPD/MPR/RI No. B-65

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS ~ v

DAFTAR ISI ~ x

DAFTAR TABEL ~ xiv

DAFTAR GAMBAR ~ xv

BAB I PERMINTAAN UANG DAN KEBIJAKAN MONETER

- 1.1 Pendahuluan ~ 1
- 1.2 Permintaan Uang ~ 2
- 1.3 Urgensi Permintaan Uang ~ 7
- 1.4 Studi Permintaan Uang dan Moneter ~ 9

BAB II TEORI UANG DAN PERMINTAAN UANG

- 2.1 Perspektif Uang ~ 11
- 2.2 Fungsi Uang ~ 12
- 2.3 Teori Permintaan Uang ~ 13
 - 2.3.1 Teori-Teori Klasik (Teori Kuantitas) ~ 13
 - 2.3.2 Teori Cambridge (Marshall-Pigou) ~ 14
 - 2.3.3 Teori Keynes ~ 16
 - 2.3.4 Teori Pasca Keynes ~ 20
 - 2.3.5 Teori Kuantitas Modern ~ 24
- 2.4 Teori Pendapatan Nasional ~ 26
- 2.5 Hubungan GNP dengan Permintaan Uang ~ 27
- 2.6 Teori Tingkat Bunga ~ 27
- 2.7 Hubungan Tingkat Suku Bunga dengan Permintaan Uang ~ 29

- 2.8 Teori Kurs Valuta Asing ~ 29
- 2.9 Hubungan Kurs Valuta Asing Dengan Permintaan Uang ~ 34

BAB III INFLASI

- 3.1 Inflasi Dalam Perekonomian ~ 35
- 3.2 Macam Inflasi Menurut Sifatnya ~ 36
- 3.3 Macam Inflasi Menurut Sebabnya ~ 36
- 3.4 Macam Inflasi Menurut Parah Tidaknya Inflasi ~ 37
- 3.5 Macam Inflasi Menurut Asal Terjadinya ~ 37
- 3.6 Pengelompokan Inflasi Berdasarkan Karakteristik Harga Komoditas ~ 38
- 3.7 Hubungan Inflasi dengan Permintaan Uang ~ 40

BAB IV KRISIS MONETER

- 4.1 Gambaran Umum Krisis Moneter ~ 43
- 4.2 Penyebab Krisis Moneter ~ 44
 - 4.2.1 Kurs Rupiah dan Hutang Luar negeri ~ 44
 - 4.2.2 Inflasi dan Suku Bunga ~ 44
 - 4.2.3 Lemahnya Sumber Daya Manusia ~ 45
 - 4.2.4 Stabilitas Negara yang Kurang Stabil ~ 45
- 4.3 Hubungan Krisis Moneter terhadap Permintaan Uang ~ 46

BAB V KONSTRUKSI KEBIJAKAN DAN SITUASI MONETER INDONESIA

- 5.1 Konsep Moneter ~ 49
- 5.2 Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997 ~ 49
- 5.3 Kebijakan Moneter Periode Selama Krisis Moneter 1997 ~ 54
- 5.4 Kebijakan Moneter Periode Pasca Krisis Moneter 1997 ~ 56
- 5.5 Kerangka Strategis Kebijakan Moneter ~ 57
- 5.6 Kerangka Operasional Kebijakan Moneter ~ 59
- 5.7 Operasi Kebijakan Otoritas Moneter ~ 60

BAB VI PENENTU PERMINTAAN UANG : ELABORASI KONSEP HINDU

- 6.1 Pendahuluan ~ 61
- 6.2 Gambaran Umum Pendapatan Nasional, Inflasi, Tingkat Suku Bunga Deposito Kurs Dollar Amerika Serikat serta Krisis Moneter ~ 61
- 6.3 Pengaruh Pendapatan Nasional, Inflasi, Tingkat Suku Bunga Deposito, Kurs Dollar Amerika Serikat dan Krisis Moneter terhadap Permintaan Uang (M_2) di Indonesia Tahun 1990-2018 dalam Jangka Pendek ~ 64
- 6.4 Pengaruh Pendapatan Nasional (GNP) terhadap Permintaan Uang (M_2) di Indonesia Tahun 1990-2018 ~ 67
- 6.5 Pengaruh Inflasi terhadap Permintaan Uang (M_2) di Indonesia Tahun 1990-2018 ~ 68
- 6.6 Tingkat Suku Bunga Deposito tidak berpengaruh terhadap permintaan uang (M_2) di Indonesia tahun 1990-2018 ~ 68
- 6.7 Pengaruh Kurs Dollar Amerika Serikat terhadap Permintaan Uang (M_2) di Indonesia Tahun 1990-2018 ~ 68
- 6.8 Pengaruh Krisis Moneter (*dummy*) terhadap Permintaan Uang (M_2) di Indonesia Tahun 1990-2008 ~ 70
- 6.9 Pengaruh Permintaan Uang periode sebelumnya terhadap Permintaan Uang di Indonesia Tahun 1990 – 2018 ~ 71
- 6.10 Hasil Estimasi Pendapatan Nasional, Inflasi, Tingkat Bunga Deposito, Kurs Dollar Amerika Serikat dan Krisis Moneter terhadap Permintaan Uang (M_2) di Indonesia tahun 1990-2018 dalam Jangka Panjang ~ 73

BAB VII INDIKATOR EKONOMI DAN UANG : RESULT CASE STUDY

- 7.1 Pendahuluan ~ 79
- 7.2 Indikator Makro Ekonomi dan Uang ~ 79
- 7.3 Implikasi Indikator Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Uang ~ 80

BAB VIII UANG DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

- 8.1 Pendahuluan ~ 81
- 8.2 Personifikasi Uang Beredar ~ 82
- 8.3 Pertumbuhan Ekonomi ~ 83
 - 8.3.1 Teori Pertumbuhan Harrod Domar ~ 84
 - 8.3.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik ~ 85
 - 8.3.3 Teori Pertumbuhan Endogen ~ 86

DAFTAR PUSTAKA ~ 89

GLOSSARY ~ 95

INDEKS ~ 105

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Uang Dalam Arti Sempit (M_1) dan Uang Dalam Arti Luas (M_2) di Indonesia Tahun 2014-2018 ~ 4
- Tabel 1.2 Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2009 – 2018 ~ 8
- Tabel 3.1 Komoditi Klasifikasi Harga yang Diatur Pemerintah ~ 39
- Tabel 3.2 Komoditi Klasifikasi Harga Bergejolak ~ 39
- Tabel 6.1 Hasil Regresi *Partial Adjustment Model Analysis* Variabel Permintaan Uang (M_2) dengan masing-masing Variabel Bebas ~ 64
- Tabel 6.2 Capaian Indikator Makro Ekonomi Indonesia ~ 75

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Perkembangan dan Jumlah Uang M_1 dan M_2 di Indonesia Tahun 2014-2018 ~ 5
- Gambar 2.1 Permintaan uang dengan motif transaksi dan berjaga-jaga ~18
- Gambar 2.2 Permintaan uang yang didasari motif spekulasi ~ 20
- Gambar 2.3 *Stock* uang tunai maksimum yang dipegang individu dengan biaya minimum ~ 22
- Gambar 2.4 Tingkat bunga keseimbangan di pasar dana investasi ~ 28
- Gambar 2.5 Akibat kenaikan permintaan dollar terhadap kurs valuta asing ~ 33
- Gambar 3.1 Menunjukkan Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2009-2018 ~ 40

BAB I

PERMINTAAN UANG DAN KEBIJAKAN MONETER

1.1 Pendahuluan

Permintaan uang (*money demand*) memiliki peran sangat strategis bagi otoritas moneter dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas perekonomian. Analisis permintaan uang merupakan suatu kajian indikator besaran ekonomi yang diperlukan untuk mendukung *policy* oleh pemerintah di bidang moneter.

Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), dapat menempuh kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas moneter (Prawoto, 2010). Kebijakan moneter merupakan salah satu bentuk kebijakan stabilisasi yang memengaruhi pencapaian tujuan perekonomian, tercapainya stabilisasi ekonomi diperoleh dengan mengimplementasikan kebijakan moneter, serta mengendalikan besaran-besaran moneter yang bergerak secara tidak terkendali. Tidak terkendalinya besaran moneter (makro ekonomi) dapat mengakibatkan *economic disequilibrium*, seperti terjadi saat krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997.

Krisis ekonomi di Indonesia tergolong paling parah jika dibandingkan dengan krisis serupa yang pernah terjadi di beberapa negara selama ini. Pecahnya gelombang krisis tahun 1997 tidak saja memporandakan industri perbankan nasional, tetapi juga menyeret perekonomian ke dalam pertumbuhan ekonomi yang begitu lambat. Tidak sedikit bank yang sakit secara finansial tumbang dalam hempasan badai krisis tersebut. Krisis moneter setidaknya berdampak langsung terhadap permintaan uang (Tambunan, 2015).

Selain itu, salah satu penyebab krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah proses integrasi perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global yang berlangsung cepat serta kelemahan fundamental mikro ekonomi yang tercermin dari kerentanan (*fragility*) sektor keuangan nasional khususnya perbankan. Salah satu krisis keuangan tersebut adalah gejolak nilai tukar yang telah menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi yang sangat parah.

Pada kuartal pertama tahun 1998, kegiatan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 12 persen per tahun sebagai akibat banyaknya perusahaan yang mengurangi aktivitas atau bahkan menghentikan produksinya. Laju inflasi juga melambung tinggi, yakni 69,1 persen dalam periode Januari-Agustus 1998 lalu. Tingginya laju inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat (Syahril, 2003). Oleh karena itu, perlu dilakukan *wise police in the monetary targeting frame* sebagai injeksi dalam perekonomian.

1.2 Permintaan Uang

Monetary Targeting lebih spesifiknya jumlah uang beredar, termasuk pengendaliannya merupakan kebijakan moneter murni, yaitu kebijakan moneter yang tidak disertai oleh berubahnya nilai pengeluaran pemerintah, pajak, dan *transfer payment*. Dalam kasus pengendalian harga (inflasi), otoritas moneter dapat mengambil langkah di bidang moneter yang mampu mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan yang dapat ditempuh seperti dengan menurunkan jumlah uang primer, menaikkan cadangan wajib giro minimum, dan menaikkan suku bunga uang.

Penurunan jumlah uang primer diharapkan dapat menekan laju inflasi, sehingga dari sisi target moneter relatif akan terkendali. Pengendalian permintaan uang dalam kaitannya dengan inflasi dilakukan dengan menjaga agar permintaan uang dan output dapat dipertahankan pada tingkat yang tidak mendorong inflasi (*Non Inflationary Level*).

Pada saat krisis terjadinya peningkatan jumlah uang yang cukup pesat, peningkatan keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai disebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang ada dengan terjadinya *rush* (pengambilan uang besar-besaran secara serentak oleh masyarakat) diberbagai bank diseluruh Indonesia, sedangkan kenaikan M_2 terjadi karena peningkatan uang kuasi yang terdiri dari simpanan rupiah dan simpanan valuta asing (Darmansyah, 2005).

Dalam model lingkaran ekonomi, uang merupakan mata rantai yang menghubungkan semua bagian dan sektor. Adanya uang memungkinkan orang menspesialisasikan diri pada satu bidang kegiatan tertentu saja, kemudian menukarkan hasilnya dengan barang atau jasa lain yang dibutuhkan. Uang dan kredit memainkan peranan yang amat penting dalam perekonomian modern, dan dapat sangat membantu, tetapi juga dapat mengacaukan dunia ekonomi. Peredaran jumlah uang merupakan salah satu bagian dari sektor moneter yang menunjang perekonomian nasional di negara Indonesia, sehingga dengan adanya jumlah uang beredar menyebabkan perekonomian yang seimbang.

Arah kebijakan moneter yang dilakukan di Indonesia dalam jangka panjang adalah mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, seperti pemerataan pendapatan, sedangkan dalam jangka pendek adalah perluasan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta keseimbangan neraca pembayaran.

Di samping itu, kebijakan moneter di Indonesia juga diarahkan untuk memengaruhi pengeluaran agregat dan pengendalian agregat di dalam perekonomian. Lingkaran perekonomian nasional juga dipengaruhi oleh keseimbangan moneter di mana jumlah permintaan uang sama dengan penawaran uang. Jumlah uang beredar (terutama perubahan-perubahan besar dalam jumlah uang beredar itu) jelas ikut mempengaruhi keseimbangan antara arus barang dan arus uang (Fischer, 1997). Oleh karena itu, segi moneter harus ikut dimasukkan dalam analisis *equilibrium*.

Para ahli mengemukakan pengertian keseimbangan moneter, yaitu keseimbangan antara permintaan akan uang atau kredit dari masyarakat dan penawaran uang (oleh dunia perbankan) sedemikian rupa sehingga jumlah uang beredar (*money supply*) tepat cukup untuk melayani permintaan efektif masyarakat. Permintaan masyarakat itu harus tepat sesuai dengan kapasitas produksi, tanpa inflasi atau pengangguran (Gilarso, 2002). Demikian juga dengan penawaran uang yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter, akan tetapi ditentukan pula oleh bank-bank umum dan masyarakat. Sistem perbankan akan menawarkan jumlah uang tertentu selaras dengan kebutuhan uang yang diinginkan masyarakat, salah satunya kredit.

Permintaan terhadap uang kertas dan cek ditentukan oleh kebutuhan masyarakat di dalam memelihara likuiditas. Salah satu sifat dasar permintaan uang adalah bahwa orang tertarik dengan daya beli (*purchasing power*) dari pemilikan uang mereka yaitu nilai saldo uang tunai dalam bentuk barang yang dapat dibeli dengan uang tunai tersebut sehingga uang di sini berkedudukan sebagai alat pembayaran atau alat pertukaran. Jumlah uang beredar yang diminta oleh masyarakat yaitu berupa uang kartal ditambah dengan uang giral disebut dengan uang beredar dalam arti sempit (M_1). Uang kartal merupakan mata uang logam dan uang kertas yang beredar dalam masyarakat (di luar perbankan), sedangkan uang giral merupakan dana yang disimpan pada saldo rekening koran atau giro (*Demand deposit* atau *checking account*). Uang beredar dalam arti luas (M_2) merupakan penjumlahan dari M_1 dan uang kuasi atau dinamakan likuiditas perekonomian.

Berawal dari teori klasik yang menyatakan jumlah permintaan uang sama dengan jumlah penawaran uang dan diteruskan oleh Marshall-Pigou,

Keynes dan Friedman. Dengan asumsi ini, maka jumlah uang yang diminta oleh masyarakat sama dengan jumlah uang yang ditawarkan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter yang mengatur tentang peredaran jumlah uang (Bahmani-Hyun Jae Rhee, 2003). Jumlah uang beredar atau *Money Supply* sebagai salah satu indikator pelaksanaan kebijakan moneter di samping tingkat bunga, uang dipantau peredarannya setiap saat sesuai dengan kondisi perekonomian Negara.

Para ahli ekonomi mengatakan likuiditas perekonomian atau M_2 ini lebih mencerminkan daya beli masyarakat (Littermann, 2005). Dalam pengertian M_1 hanya termasuk uang yang ada di tangan masyarakat dan dunia usaha, yang sebagian besar digunakan untuk transaksi ekonomi sehari-hari tetapi belum mencerminkan jumlah uang yang dalam waktu singkat dapat dikerahkan untuk membeli barang atau jasa (atau untuk spekulasi dengan valuta asing).

Bahasan pada buku ini lebih berkonsentrasi pada M_2 karena merupakan definisi dari penawaran uang yang berhubungan erat dengan peranan uang sebagai alat pertukaran atau sebagai alat pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan langsung dengan uang logam dan uang kertas dan juga untuk sebagian besar transaksi dengan cek.

Berikut ini disajikan tabel mengenai jumlah uang beredar di Indonesia dalam lima tahun terakhir meliputi jumlah uang beredar dalam arti sempit dan arti luas.

Tabel 1.1
Uang Dalam Arti Sempit (M_1) dan Uang Dalam Arti Luas (M_2) di Indonesia Tahun 2014-2018

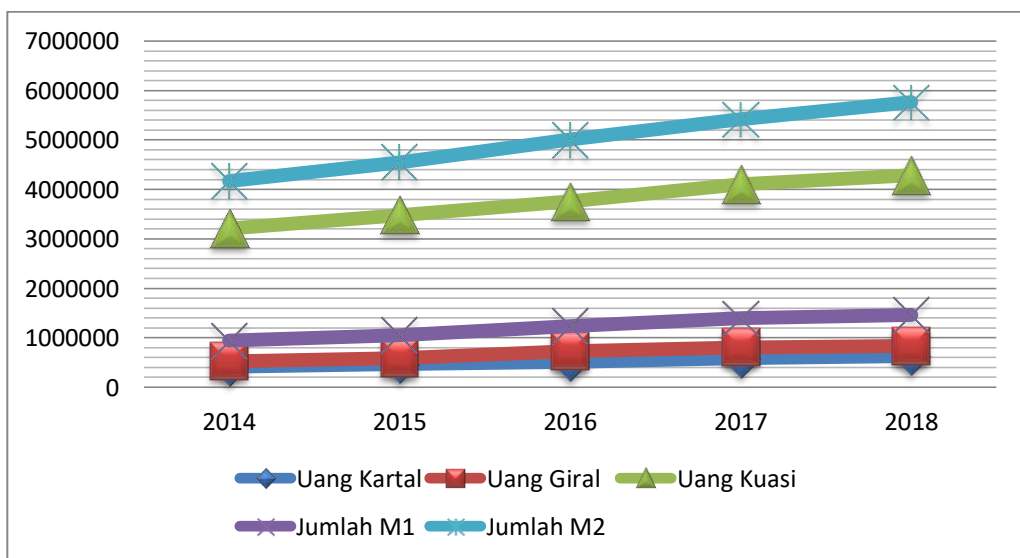
Tahun	Uang Kartal (Milyar Rp)	Uang Giral (Milyar Rp)	Jumlah M_1 (Milyar Rp)	Perkembangan. M_1 (%)	Uang Kuasi (Milyar Rp)	Jumlah M_2 (Milyar Rp)	Perkembangan. M_2 (%)
2014	419.262	522.960	942.221	-	3.209.475	4.173.327	-
2015	464.534	585.960	1.055.440	12.01	3.479.961	4.548.800	8.99
2016	508.124	729.519	1.237.643	17.26	3.753.809	5.004.977	10.02
2017	586.576	804.231	1.390.807	12.37	4.099.996	5.419.165	8.27
2018	625.370	831.779	1.457.150	4.77	4.282.364	5.760.046	6.29

Sumber : Bank Indonesia, 2019 (data diolah)

Jumlah uang beredar di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan secara signifikan baik uang kartal, giral maupun uang kuasi. Dilihat dari angka M_1 (jumlah uang dalam arti sempit) secara absolut terus

mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir karena peredaran jumlah uang kartal dan uang giral meningkat di masyarakat. Perkembangan jumlah M_1 mengalami fluktuasi di mana yang tertinggi pada tahun 2016 mencapai 17,26 persen dan pada tahun 2018 M_1 menjadi sebesar 4,77 persen atau mengalami degradasi secara gradual sebesar 12,49 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kurang stabilnya perekonomian dunia yang membawa *impact* sehingga permintaan masyarakat akan uang berkurang, dengan rata-rata mencapai 11,60 persen selama lima tahun belakangan ini berarti jumlah uang kartal dan uang giral di masyarakat relatif cukup rendah.

Gambar 1.1
Perkembangan dan Jumlah Uang M_1 dan M_2 di Indonesia
Tahun 2014-2018



Sumber : Statistik Keuangan Ekonomi Indonesia, 2019 (Data diolah)

Jumlah M_2 (jumlah uang beredar dalam arti luas) pun meningkat karena peranan uang kuasi sangat besar dalam sektor moneter. Pada tahun 2016 perkembangan M_2 mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai 10,02 persen yang dikarenakan masyarakat lebih banyak menyimpan uangnya dalam bentuk deposito atau tabungan di bank yang disebut dengan istilah *near money* atau uang kuasi. Berarti peredaran uang kuasi pada tahun 2017 cukup tinggi, sedangkan pada tahun 2018 M_2 hanya mencapai 6,29 persen sama halnya dengan M_1 yang meningkat dengan angka terendah.

Menurut Keynes (dalam Nopirin, 1992), permintaan uang kas untuk tujuan transaksi ini tergantung dari pendapatan. Makin tinggi pendapatan, makin besar keinginan akan uang kas untuk transaksi. Seseorang atau

masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi, biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak dibandingkan seseorang atau masyarakat yang pendapatannya lebih rendah. Penduduk yang tinggal di kota besar cenderung melakukan transaksi lebih besar dibanding penduduk yang tinggal di kota kecil dan pedesaan.

Dalam hal ini bank sentral mempunyai fungsi dan peranan yang strategis pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Yang paling mendasar adalah peranannya dalam mencetak dan mengedarkan uang. Bank sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai sarana pembayaran yang sah di suatu negara. Peran ini vital karena begitu penting dan luasnya fungsi uang dalam perekonomian. Seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan dilakukan dengan uang. Fungsi uang tidak lagi dipergunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai media menyimpan kekayaan, bahkan untuk berspekulasi bagi sebagian masyarakat. Pengertian uang tidak lagi sebatas pada uang kartal, yaitu uang kertas maupun logam, tetapi telah berkembang menjadi berbagai bentuk dan variasinya, dari uang giral, simpanan di bank, kartu kredit, dan sebagainya, seiring dengan perkembangan pada sektor keuangan. Oleh karena itu, perkembangan jumlah uang beredar akan berpengaruh langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan dalam perekonomian, apakah itu konsumsi, investasi, ekspor-impor, suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan juga inflasi.

Dengan peran seperti ini, wajar bila bank sentral mempunyai tujuan dan diberi tanggung jawab untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai dari mata uang yang diedarkan tersebut. Terlebih lagi pada dunia modern sekarang ketika uang menjadi *fiat money*, dalam arti bahwa negara memberikan kewenangan kepada bank sentral untuk menerbitkan dan mengedarkan uang tersebut atas dasar kepercayaan, tanpa adanya kewajiban untuk menyediakan sejumlah emas atau cadangan lain sebagai jaminan dari penerbitan uang tersebut seperti pernah dialami pada jaman standar emas. Karena itu kestabilan rupiah dari mata uang merupakan kewajiban mendasar bagi bank sentral agar kepercayaan negara dan masyarakat dapat tetap terjaga. Dalam praktiknya, kestabilan nilai dari mata uang dimaksud mencakup kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang diukur dan tercermin pada perkembangan nilai tukar atau kurs mata uang.

1.3 Urgensi Permintaan Uang

Kestabilan nilai mata uang, baik dalam artian inflasi maupun nilai tukar, sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Nilai uang yang stabil dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan kegiatan perekonomian, baik konsumsi maupun investasi sehingga perekonomian nasional dapat bergairah.

Lebih dari itu, inflasi yang terkendali dan rendah dapat mendukung terpeliharanya daya beli masyarakat, khususnya yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri dan masyarakat kecil. Bagi golongan masyarakat ini, yang umumnya mencakup sebagian besar penduduk, harga-harga yang terus membumbung menyebabkan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar akan semakin rendah. Demikian pula inflasi dan nilai tukar yang tidak stabil akan mempersulit dunia usaha dalam perencanaan kegiatan bisnis, baik dalam kegiatan produksi dan investasi maupun dalam penentuan harga barang dan jasa yang diproduksinya.

Konsep permintaan uang selalu menjadi perhatian dalam teori moneter. Teori kuantitas uang merupakan salah satu teori yang penting bagi teori permintaan uang. Perdebatan panjang pun berlangsung antara para ekonom untuk menentukan konsep permintaan uang yang tepat. Ini menjadi hal yang penting karena konsep permintaan uang yang berbeda berarti mekanisme makro ekonomi yang berbeda pula sehingga kebijakan yang diberlakukan juga berbeda. Friedman berpendapat, kebijakan moneter dapat berkontribusi dalam mencapai stabilitas perekonomian dengan jalan mengendalikan besaran moneter (Widodo, 2015). Hal ini menginterpretasikan bahwa permintaan uang memegang peranan yang penting dalam perilaku kebijakan moneter di setiap perekonomian, sehingga studi empiris dan pengembangan model mengenai permintaan uang menjadi *urgent* dilakukan.

Melihat dan mencermati besaran indikator makro ekonomi Indonesia sebagai instrumen maupun sasaran pokok pembangunan perekonomian seperti yang tertuang dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2
Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2009 – 2018

Tahun	Growth (%)	M ₂ (Milyar Rp.)	Inflasi (%)	Kurs (1USD/Rp)	Suku Bunga (%)
2009	4,50	2.141.384	2,78	9.447	7,48
2010	6,01	2.471.206	6,96	8.946	7,06
2011	6,48	2.877.220	3,79	9.023	6,61
2012	6,27	3.307.508	4,30	9.662	5,76
2013	5,78	3.730.409	8,38	12.189	7,61
2014	5,01	4.173.327	8,36	12.440	8,94
2015	4,88	4.548.800	3,35	13.795	7,99
2016	5,03	5.004.977	3,02	13.436	6,69
2017	5,07	5.419.165	3,61	13.480	6,10
2018	5,15	5.760.046	3,18	14.481	6,20

Sumber : Statistik Keuangan Ekonomi Indonesia, 2019 (Data diolah)

Tabel 1.2 menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia selama satu dasawarsa tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan nilai *average* di level 5,41 persen dengan pertumbuhan tertinggi dicapai tahun 2011 yakni mencapai 6,48 persen, pertumbuhan ini tercapai karena sokongan kekuatan pasar domestik dan terbantu juga dengan konsumsi masyarakat yang tinggi, sedangkan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 4,15 persen, hal ini dikarenakan karena efek krisis keuangan global yang terjadi di Amerika kemudian menular ke Eropa, Asia dan hampir semua negara terkena imbas dari adanya krisis tersebut tak terkecuali Indonesia, hal itu berpengaruh terhadap implikasi laju pertumbuhan ekonomi riil stagnan di angka tersebut walaupun asumsi makro pertumbuhan ekonomi yang dirancang pemerintah pada tahun yang sama adalah sebesar 5,00 persen, jadi kesimpulannya ada diskresi laju pertumbuhan sebesar 1,04 persen (Abimanyu, 2009).

Dilihat dari sisi permintaan uang dalam arti luas (M₂) nilai riil tertinggi terjadi tahun 2018 sebesar Rp. 5.760.046 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 6,29 persen dibanding tahun sebelumnya. Tingkat inflasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir adalah 8,38 persen pada tahun 2013. Angka tersebut jauh di atas target pemerintah pada APBN Perubahan 2013 yang dipatok sebesar 7,2 persen. Hal ini diakibatkan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar Rp 5.500/liter. BBM memberi andil atas inflasi sebesar 1,17 persen. Oleh karena itu, kebijakan *linier* dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengakselerasi tingkat suku bunga deposito sebesar 1,33 persen atau dari 7,61 persen ke level 8,94 persen. Hal ini pula yang

menyebabkan tingkat suku bunga deposito tahun 2014 mengalami peningkatan tertinggi di banding tahun sebelumnya dalam sewindu terakhir.

Dari sisi kurs Rupiah terhadap USD tercatat bahwa pelemahan rupiah terbesar terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 13.480 Rp/1USD pelemahan yang begitu fundamental ini disebabkan oleh perbaikan data ekonomi USA, semakin sengitnya perang dagang antara USA dengan Tiongkok, isu stabilitas geopolitik serta reaksi pasar atas ekspektasi kenaikan suku bunga *The Federal Reserve Bank* (Waluyo, 2018).

Dengan melihat keadaan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia yang begitu rentan akan *disequilibrium* maka studi untuk *forecasting* kondisi ekonomi dan moneter di negara berkembang menjadi hal yang penting untuk dilakukan, bahkan hal itu juga dilakukan oleh negara maju. Hwang (2010) yang melakukan penelitian tentang permintaan uang di Korea, menemukan bahwa dalam keseimbangan jangka panjang pendapatan riil masyarakat dan tingkat bunga tetap berpengaruh terhadap permintaan uang dalam arti luas (M_2) sedangkan untuk permintaan uang dalam arti sempit (M_1) variabel tersebut tidak terlalu berpengaruh. Kesimpulan penting dari penelitian tersebut adalah bahwa M_2 sangat berkorelasi terhadap pendapatan dan tingkat bunga serta korelasi ini menjadi acuan dalam kestabilan permintaan uang (Bahmani-Oskooe dan Wang, 2014).

1.4 Studi Permintaan Uang dan Moneter

Penelitian Setiadi (2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang tahun 1999: Q_1 – 2010 : Q_4 , yang menemukan inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang, begitu juga pengaruh *Product Domestic Bruto* (PDB), sedangkan suku bunga dalam jangka panjang memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia.

Dari perkembangan jumlah uang beredar di masyarakat selama ini dapat diketahui bahwa uang giral mengalami perkembangan yang lebih besar bila dibandingkan dengan uang kartal dan pertumbuhan uang dalam arti luas ternyata lebih cepat dibanding dengan uang dalam arti sempit. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan yang pesat dari deposito berjangka dan tabungan di bank-bank di Indonesia dengan suku bunga yang relatif besar (Prawoto, 2000). Hal ini memberikan indikasi bahwa sektor moneter Indonesia menuju sektor moneter yang lebih maju. Uang kartal lebih banyak digunakan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga, sedangkan

uang giral lebih banyak digunakan pada sektor bisnis dan untuk tujuan spekulasi. Ini juga berarti jumlah uang yang ada dalam masyarakat tidak hanya ditentukan dan tidak hanya merupakan hasil keputusan kebijaksanaan moneter oleh bank sentral, tetapi ditentukan juga oleh bank-bank umum serta keputusan masyarakat yang menentukan bagaimana mengalokasikan kekayaan moneter mereka dalam bentuk uang kartal, uang giral, deposito berjangka dan berbagai bentuk kekayaan finansial lain. Hal ini bisa memberikan implikasi makin sukarnya pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Dengan adanya permasalahan yang cukup rumit, maka dalam hal ini pemerintah khususnya bank sentral harus bisa memutuskan kebijaksanaan moneter yang harus diambil sehingga dapat memperbaiki stabilitas perekonomian di Indonesia. Teori Klasik menyatakan jumlah permintaan uang sama dengan jumlah penawaran uang dan diteruskan oleh Marshall-Pigou, Keynes dan Friedman. Dengan asumsi ini maka jumlah uang yang diminta oleh masyarakat sama dengan jumlah uang yang ditawarkan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter yang mengatur tentang peredaran jumlah uang atau *Money Demand* (MD) *equal* (=) *Money Supply* (MS) (Mosen-Oksooe, 2007). Oleh karena itu dalam penelitian ini data permintaan uang yang digunakan adalah data jumlah uang beredar dalam arti luas (M_2) yang merupakan penjumlahan dari uang kartal + uang giral + uang kuasi (M_1 + uang kuasi).

Dengan demikian, fenomena moneter yakni permintaan uang menarik untuk diteliti. Klasifikasi besaran – besaran makro ekonomi memengaruhi permintaan uang melalui berbagai kajian teori, studi empiris, dan fenomena data yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan pentingnya mengembangkan model penelitian permintaan uang di Indonesia.

BAB II

TEORI UANG DAN PERMINTAAN UANG

2.1 Perspektif Uang

M_1 diartikan sebagai uang tunai (uang kertas dan logam) yang dipegang oleh masyarakat, tidak termasuk uang yang ada di kas bank serta kas negara. Uang tersebut dikenal dengan uang kartal kemudian ditambah uang yang berada dalam rekening giro perbankan yang dapat langsung digunakan dengan menguangkan cek. Cek tersebut dikenal sebagai uang giral. Pengertian uang giral di atas hanya mencakup saldo rekening koran/ giro milik masyarakat umum yang disimpan di bank dan belum digunakan pemiliknya untuk membayar/berbelanja (Boediono, 2001).

Uang dalam arti sempit hanya meliputi uang kartal dan uang giral. Jumlah uang dalam arti sempit ini akan lebih banyak peranannya pada perekonomian yang masih sederhana. Semakin maju perekonomian suatu negara, maka konsep uang beredar yang berlaku akan semakin kompleks seiring perkembangan kebutuhan akan uang sebagai alat tukar yang efektif dan efisien.

Menurut Mansoer (1992), definisi M_2 merupakan perluasan definisi M_1 yaitu penjumlahan M_1 dengan uang kuasi adalah bentuk kekayaan finansial yang sangat likuid. Deposito berjangka ataupun rekening tabungan pada bank-bank komersial termasuk ke dalam pengertian uang kuasi. Uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan ini sebenarnya adalah juga daya beli potensial bagi pemilikinya, meskipun tidak semudah uang tunai atau cek untuk menguangkannya. Friedman (1956) dalam Boediono (1998) menyebut kekayaan semacam ini *temporary abodes of purchasing power* atau “tempat menginap” sementara bagi daya beli.

M_2 digunakan karena sifatnya yang relatif mudah untuk mempengaruhi tingkat inflasi. Teori Kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher yaitu $M.V = P.T$ juga mendefinisikan M_2 sebagai jumlah uang kartal plus uang giral, sedangkan definisi yang paling luas dikenal dengan M_3 yang merupakan penjumlahan dari M_2 dengan semua deposito pada lembaga-lembaga keuangan yang lain (non bank).

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia adalah aktiva luar negeri bersih, tagihan bersih pada pemerintah pusat, tagihan pada lembaga dan Badan Usaha Milik Negara, tagihan pada perusahaan swasta dan perorangan, jaminan import dan tagihan lainnya (Bank Indonesia Jakarta, 2002).

2.2 Fungsi Uang

Gilarso (2004) menyatakan uang memiliki beberapa fungsi:

1) Uang sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*)

Uang mempermudah tukar-menukar atau perdagangan, menggantikan barter. Dengan uang orang dapat membeli aneka macam barang atau jasa karena uang mempunyai "daya beli". Dengan istilah ekonomi : dengan uang dapat mewujudkan "permintaan efektif" dan semua orang mau menerimanya karena dengan uang itu mereka pun dapat membeli segala macam barang dan jasa yang dibutuhkan.

2) Uang sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of account*).

Nilai segala macam barang dan jasa diukur dengan harganya yang dinyatakan dalam sejumlah uang. Seperti mengukur berat dalam kilogram, mengukur nilai dengan uang. Penggunaan satuan hitung yang diterima umum sangat menyederhanakan kehidupan ekonomi.

3) Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value*)

Uang akan menjaga nilai untuk sepanjang waktu. Jika dibandingkan dengan aktiva-aktiva berisiko seperti saham, *real estate* atau emas, uang relatif agak kurang berisiko. Pada mulanya, masyarakat memegang mata uang sebagai bentuk aman kekayaan. Sekarang, makin banyak orang memegang uang yang memberi hasil besar sebagai aktiva aman. Tetapi sebagian besar kekayaan ditahan dalam bentuk aktiva lain, misalnya rekening tabungan, saham, obligasi dan *real estate* (perumahan).

4) Uang sebagai alat pembayaran (*means of payment*)

Untuk melakukan pembayaran juga bila tidak ada tukar-menukar atau jual beli langsung, misalnya membayar pajak, membayar denda, melunasi hutang.

5) Uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi

Uang dapat digunakan oleh individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti jual beli barang atau jasa. Oleh karena itu, uang di sini

berfungsi sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi di dalam masyarakat.

2.3 Teori Permintaan Uang

Penawaran uang sebagian dipengaruhi oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi (*participants*) yang memerlukan atau yang meminta uang, sehingga ahli ekonomi menemukan berbagai teori permintaan uang (Sri Utami, 2000).

2.3.1 Teori-Teori Klasik (Teori Kuantitas)

Teori permintaan uang dimulai dengan munculnya teori permintaan uang dari Irving Fisher (yang disebut dengan teori permintaan uang klasik). Teori Irving Fisher menitikberatkan fungsi uang sebagai alat tukar. Dalam teori Irving Fisher, dianggap bahwa semua transaksi atau kejadian keuangan di masyarakat selalu dalam situasi yang seimbang. Yang dimaksud dengan seimbang adalah jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli harus sama dengan jumlah yang diterima oleh penjual. Di dalam suatu periode tertentu nilai dari barang-barang atau jasa-jasa yang dibeli harus sama dengan nilai dari barang-barang yang dijual. Dengan demikian identitas di atas dapat dirumuskan sebagai berikut.

$M \cdot V = P \cdot T \quad \dots\dots\dots (2.1)$

Nilai dari barang-barang yang dijual sama dengan volume transaksi (T) dikalikan harga rata-rata dari barang tersebut (P). Di lain pihak nilai dari barang yang ditransaksikan ini harus pula sama dengan volume uang yang ada di dalam masyarakat (M) dikalikan beberapa kali rata-rata perputaran uang, dalam periode tersebut (V).

Semula identitas ini bukan merupakan teori moneter, tetapi kemudian Fisher berpendapat bahwa identitas tersebut dapat dikembangkan menjadi suatu teori moneter dengan beberapa anggapan. Menurut Fisher, orang bersedia memegang uang pada dasarnya karena kegunaannya dalam proses transaksi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan yang ada di dalam suatu masyarakat, dalam jangka pendek bisa dianggap konstan, sehingga V dapat dianggap tetap. Volume transaksi (T) dalam satu periode tertentu ditentukan oleh tingkat *output* masyarakat (atau pendapatan nasional), dan bisa pula dianggap mempunyai nilai tertentu untuk tahun tertentu. Identitas tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk :

$$M_d = 1/\bar{V} \cdot P \cdot \bar{T} \dots\dots\dots (2.2)$$

Persamaan di atas menyatakan bahwa permintaan (atau kebutuhan) akan uang dari masyarakat adalah suatu proporsi tertentu ($1/\bar{V}$) dari nilai transaksi ($P \cdot \bar{T}$) (tanda “-” menunjukkan variabel-variabel yang dianggap konstan dalam jangka pendek).

Jika penawaran uang dianggap variabel eksogen dan dalam keadaan seimbang (equilibrium) permintaan uang sama dengan penawaran uang, maka :

$$M_d = M_s \dots\dots\dots (2.3)$$

Di mana M_s = penawaran uang yang beredar (yang dianggap ditentukan oleh pemerintah), maka akan diperoleh hubungan sebagai berikut :

$$M_s = M_d = (1/\bar{V}) (P \cdot \bar{T}) \dots\dots\dots (2.4)$$

Jika perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (*Full employment*), V dan T dianggap konstan dalam jangka pendek, serta M merupakan variabel eksogen yang ditentukan oleh penguasa atau otoritas moneter, maka tingkat harga merupakan faktor endogen. Dari konsep ini dapat dikatakan bahwa perubahan uang yang beredar (M_s) merupakan bagian yang proporsional dari perubahan tingkat harga.

Yang dimaksud dengan proporsional adalah jika tingkat harga meningkat, maka secara otomatis jumlah uang yang beredar pun menjadi meningkat, sebaliknya jika tingkat harga mengalami penurunan, maka jumlah uang yang beredar juga akan turun.

Berdasarkan hal di atas, terlihat bahwa permintaan akan uang oleh masyarakat terjadi karena adanya proses transaksi, semakin tinggi tingkat transaksi yang terjadi di masyarakat, kebutuhan masyarakat akan uang menjadi semakin meningkat atau sebaliknya, karena meningkatnya harga-harga barang maka kebutuhan akan permintaan uang oleh masyarakat menjadi semakin besar yang akibatnya jumlah uang yang beredar di pasar semakin besar pula.

2.3.2 Teori Cambridge (Marshall-Pigou)

Teori Cambridge, seperti halnya dengan teori Fisher dan teori-teori klasik lainnya, berpokok pangkal pada fungsi uang sebagai alat tukar

(*means of exchange*). Namun, teori Cambridge berbeda dengan teori Fisher pada masalah uang yang dipegang oleh individu masyarakat.

Fisher mengatakan uang yang dipegang oleh individu masyarakat merupakan proporsi konstan dari volume transaksi yang dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yang tetap (permanen) di masyarakat dan tidak didasarkan pada pertimbangan untung rugi.

Menurut Cambridge, uang yang dipegang didasarkan pada :

- 1) Masyarakat memerlukan uang sebagai alat likuid untuk melakukan transaksi.
- 2) Masyarakat memerlukan uang untuk mempermudah transaksi.
- 3) Masyarakat memerlukan uang dengan mengorbankan pemegangan kekayaan dalam bentuk non uang (seperti : surat berharga).
- 4) Masyarakat memerlukan uang karena pengaruh kekayaan, harga barang dan bunga yang berlaku

Uang yang dipegang oleh masyarakat, menurut Cambridge, dipengaruhi oleh perilaku individu masyarakat dengan berbagai pertimbangan. Variabel lain dalam teori Cambridge dianggap konstan dan terdapat hubungan yang proporsional secara konstan antara kekayaan, volume transaksi dan pendapatan masyarakat.

Dari perbedaan tersebut, terlihat adanya perkembangan selangkah lebih maju namun tidak jauh berbeda dengan teori Fisher. Rumus Cambridge :

$M_d = k \cdot P \cdot Y$	(2.5)
$M_s = M_d$	(2.6)

Sehingga :

$M_s = k \cdot P \cdot Y$	(2.7)
---------------------------------	-------

$$P = \frac{M_s}{K \cdot Y}, \text{ keterangan :}$$

- M_d = Permintaan uang oleh individu
- M_s = Penawaran uang (uang beredar dalam masyarakat)
- Y = Pendapatan masyarakat
- P = Tingkat harga umum
- K = Bagian pendapatan dalam bentuk uang kas ($1/V$)

Dari Persamaan : $P = \frac{M_s}{K \cdot Y}$, mengandung arti bahwa perubahan tingkat harga (P) dipengaruhi oleh perubahan volume uang yang beredar, dengan anggapan *ceteris paribus* (yang berarti faktor-faktor lain seperti tingkat pendapatan nasional riil, tingkat bunga dan harapan (*expectations*) adalah konstan).

Teori Cambridge tidak menutup kemungkinan bahwa faktor-faktor seperti tingkat bunga dan *expectations* berubah meskipun dalam jangka pendek dan kalau faktor-faktor ini berubah maka “k” pun akan berubah. Teori Cambridge mengatakan kalau tingkat bunga naik, ada kecenderungan warga masyarakat mengurangi uang yang mereka ingin pegang, meskipun volume transaksi yang mereka rencanakan tetap. Demikian juga *expectations* mempengaruhi : bila seandainya di masa datang diharapkan akan ada kenaikan tingkat bunga (yang berarti penurunan harga surat berharga) maka orang akan cenderung untuk mengurangi jumlah surat berharga yang dipegangnya dan menambah uang tunai yang mereka pegang.

2.3.3 Teori Keynes

Teori Keynes tentang permintaan akan uang berbeda dengan teori klasik karena masalah fungsi uang. Kaum Klasik mengatakan fungsi uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), sedangkan menurut Keynes fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat pengukur nilai (*store of value*).

Uraian lengkap tentang uang sebagai alat pengukur nilai dimuat dalam bukunya yang berjudul “*The General Theory Of Employment, Interest, and Money*”. Teori ini kemudian dikenal dengan nama teori *Liquidity Preference* (Boediono, 1998).

Dalam teori Keynes dikenal tiga motif yang selalu mendasari permintaan akan uang masyarakat, yaitu :

1) Motif Transaksi (*Transaction motive*)

Keynes tetap menerima pendapat golongan Cambridge, bahwa orang memegang uang guna memenuhi dan melancarkan transaksi-transaksi yang mereka lakukan. Kebutuhan tersebut berlangsung terus-menerus, sedangkan penerimaan pendapatan terjadi secara berkala, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Adanya perbedaan waktu antara penerimaan dan pengeluaran merupakan dasar pertimbangan masyarakat untuk meminta atau memegang uang setiap saat.

Besarnya permintaan uang untuk memenuhi kebutuhan transaksi ini, menurut Keynes sangat bergantung pada tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan nasional semakin besar volume transaksi dan semakin besar pula kebutuhan uang untuk memenuhi tujuan transaksi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebutuhan uang untuk transaksi merupakan suatu proporsi konstan dari tingkat pendapatan. Dalam rumus dapat dinyatakan dengan :

$M^T = k \cdot Y \quad \dots\dots\dots (2.8)$

Keterangan :

- M^T = permintaan uang untuk transaksi
- k = suatu proporsi konstan, $0 < k < 1$
- Y = tingkat pendapatan riil

Prinsip dasar teori Keynes adalah setiap manusia secara wajar (alami) akan mengkonsumsi lebih besar bila tingkat pendapatannya meningkat, tetapi peningkatan konsumsi tersebut tidak akan sebesar peningkatan pendapatannya. Hal ini merupakan alasan dasar mengapa variabel “k” lebih besar dari nol dan selalu lebih kecil dari satu. Demikian pula Keynes berpendapat bahwa permintaan akan uang untuk transaksi ini pun tidak merupakan suatu proporsi yang selalu konstan, tetapi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat bunga. Hanya saja faktor tingkat bunga untuk permintaan uang untuk transaksi ditekankan oleh Keynes.

2) Motif Berjaga-Jaga (*Precautionary motive*)

Motif ini muncul karena terdapat ketidakpastian masa depan. Ketidakpastian tersebut dapat diartikan sebagai keadaan darurat atau munculnya kesempatan-kesempatan bagus yang tidak terduga. Seseorang merasa perlu memegang sejumlah uang dalam menghadapi ketidakpastian ini.

Kebutuhan untuk berjaga-jaga ini cenderung meningkat dengan meningkatnya pendapatan. Dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, seseorang akan menghadapi kemungkinan timbulnya kesempatan-kesempatan bagus yang lebih besar, tetapi dengan resiko yang lebih besar pula. Oleh karenanya bagi orang-orang yang berpendapatan tinggi, kebutuhan memegang uang untuk memenuhi motif berjaga-jaga juga lebih besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik motif transaksi maupun berjaga-jaga merupakan fungsi positif dari tingkat pendapatan. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$M_1 = M^T + M^P = f(T) \dots\dots\dots (2.9)$$

Keterangan :

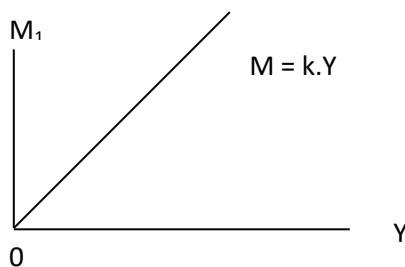
M_1 = Permintaan uang yang dilandasi motif transaksi dan berjaga-jaga

M^T = Permintaan uang yang dilandasi motif transaksi

M^P = Permintaan uang yang dilandasi motif berjaga-jaga

Permintaan uang (M_1) yang dilandasi motif transaksi dan motif berjaga-jaga merupakan fungsi positif terhadap tingkat pendapatan.

Gambar 2.1 Permintaan uang dengan motif transaksi dan berjaga-jaga



Sumber : Samuelson,(1992)

3) Motif Spekulasi (*Speculative motive*)

Motif dari pemegangan uang untuk spekulasi adalah terutama bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh dari seandainya si pemegang uang tersebut meramal apa yang terjadi dengan betul. Dalam Teori Keynes uang dianggap sebagai salah satu alternatif bentuk asset di samping bentuk-bentuk asset lainnya.

Pada garis besarnya Teori Keynes dibatasi pada keadaan di mana pemilik kekayaan bisa memilih memegang kekayaan dalam bentuk uang tunai atau obligasi (*bond*). Uang tunai dianggap tidak memberikan penghasilan, sedangkan obligasi dianggap memberikan penghasilan berupa sejumlah uang tertentu setiap periode. Dalam teori Keynes dibicarakan khusus obligasi yang memberikan suatu penghasilan berupa sejumlah uang tertentu selama waktu yang tidak terbatas.

Risiko obligasi hanya berasal dari perubahan nilai kapitalnya yang disebabkan oleh adanya perubahan tingkat bunga (harganya). Keputusan untuk menjual atau membeli obligasi sangat ditentukan oleh perubahan

tingkat harga obligasi yang diharapkan terjadi. Bila suku bunga diharapkan turun maka orang lebih berminat untuk memegang kekayaannya dalam bentuk obligasi daripada uang. Hal ini karena obligasi dapat memberikan penghasilan tertentu selama periode tertentu dan dapat juga memberikan keuntungan kapital (*capital gains*) sebagai akibat adanya kemungkinan harga obligasi tersebut naik. Sebaliknya bila diperkirakan atau diharapkan suku bunga naik, maka pemilik kekayaan akan lebih terdorong untuk memegang uang daripada obligasi. Uang di sini berlaku sebagai salah satu alternatif penyimpanan nilai atau kekayaan (*store of value*) dan mempunyai hubungan negatif dengan suku bunga.

Permintaan uang yang berubah-ubah menurut perubahan tingkat bunga didasari oleh hubungan spekulasi. Permintaan uang jenis ini merupakan fungsi dari tingkat bunga, atau :

$$M_2 = f(r) \dots\dots\dots (2.10)$$

Keterangan :

M_2 = Permintaan uang untuk spekulasi

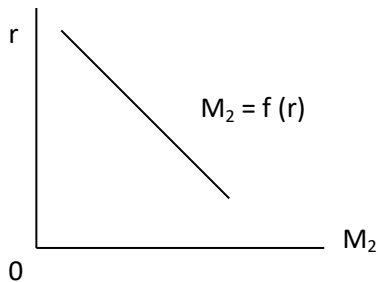
r = tingkat bunga

Secara total, jumlah permintaan terhadap uang berdasarkan motif-motif yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$L = M_1 + M_2 = f(Y) + f(r) \dots\dots\dots (2.11)$$

Fungsi permintaan terhadap uang (L) merupakan fungsi positif terhadap tingkat pendapatan dan fungsi negatif terhadap tingkat bunga di pasar. Permintaan uang yang didasari motif spekulasi merupakan fungsi negatif terhadap tingkat bunga di pasar.

Gambar 2.2 Permintaan uang yang didasari motif spekulasi



Sumber : Samuelson,(1992)

2.3.4 Teori Pasca Keynes

Teori uang yang berkembang setelah Keynes mengikuti sistem pembagian permintaan akan uang yang digariskan oleh Keynes, yaitu permintaan uang untuk tujuan transaksi dan permintaan untuk tujuan spekulasi. Dalam aliran ini yang diuraikan adalah teori permintaan akan uang dari William J. Boumol dan Tobin. Anggapan dasar teori permintaan akan uang dari Boumol adalah :

- 1) Pendapatan atau penghasilan masyarakat secara total dikelompokkan dalam bentuk uang kas dan obligasi, atau semuanya dalam bentuk uang kas. Memegang uang kas tidak mendapatkan bunga (pendapatan), tetapi memegang obligasi yang mendapatkan penghasilan.
- 2) Uang kas yang dipegang oleh individu atau perusahaan (*firm*) hanya untuk tujuan transaksi, tetapi obligasi tidak dapat dipakai sebagai alat tukar. Jika ingin memakai obligasi sebagai alat tukar, obligasi itu harus ditukar dahulu menjadi uang kas.
- 3) Setiap menjual obligasi dikeluarkan ongkos (*brokers fee*).

Teori Boumol menguraikan hanya mengenai transaksi yaitu jumlah uang kas yang optimal yang diperlukan oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan optimal adalah jumlah uang kas dan pada waktu yang diperlukan dengan biaya yang paling kecil.

Dari kondisi tersebut terlihat bahwa memegang uang kas memerlukan ongkos yaitu tingkat bunga hilang, karena uang tidak ditabung sehingga tidak mendapatkan bunga dan ongkos broker yang harus dikeluarkan. Kalau masyarakat terlalu sering menukarkan obligasinya dalam jumlah yang kecil-kecil, dengan maksud agar pendapatan totalnya (T) sebanyak mungkin dan selama mungkin terpegang dalam bentuk

obligasi yang menghasilkan bunga, maka masyarakat harus membayar biaya penjualan (yaitu b rupiah setiap kali penjualan) terlalu banyak. Sebaliknya, bila masyarakat menukarkan obligasi dalam jumlah yang terlalu besar setiap kalinya, masyarakat akan kehilangan penghasilan bunga yang bisa diterima seandainya masyarakat memegang obligasi yang lebih banyak. Biaya total (C) dari pemegang stok ini adalah :

$$C = b \frac{T}{K} + R \frac{K}{2} \dots\dots\dots (2.12)$$

sedangkan K yang memenuhi syarat bahwa C minimum, didapatkan dengan menurunkan fungsi C terhadap K dan menyamakan dengan nol.

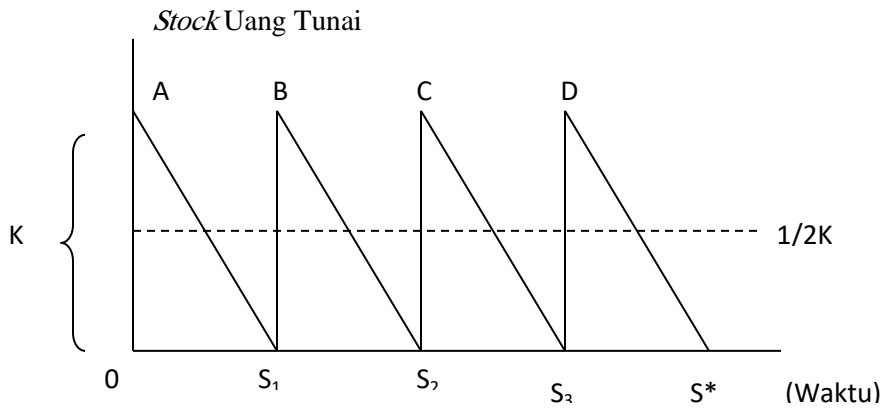
$$K = \sqrt{\frac{2bT}{R}} \dots\dots\dots (2.13)$$

Keterangan :

- T = Pendapatan individu
- R = Tingkat bunga yang berlaku
- b = biaya tetap setiap kali menjual obligasi
- K = Stock uang tunai minimum yang dipegang/dipertahankan dalam setiap tahap dalam bulan bersangkutan dengan biaya yang minimal
- \bar{K} = Berapa kali dalam periode penghasilan akan menjual obligasi
- $\frac{bT}{K}$ = Seluruh biaya penjualan obligasi selama periode penghasilan

Untuk lebih jelasnya, kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.3 Stock uang tunai maksimum yang dipegang individu dengan biaya minimum



Sumber : Boediono (1998)

Gambar di atas dibaca : K yang diperlukan dengan ongkos yang minimal selama periode OS* dengan pendapatan T.

Sejumlah uang tunai (K) dipegang selama periode $OS_1 = S_1S_2 = S_2S_3 = S_3S^*$. Pada waktu 0 ia memperoleh *stock* uang tunai sebesar K, yang dipergunakan (untuk transaksi) dengan tingkat penggunaan yang konstan setiap harinya, sehingga grafik dari *stock* uang yang ia pegang pada setiap waktu antara waktu 0 dan S_1 adalah garis (lurus) A. S_1 pada waktu mencapai S_1 *stock* uangnya habis pada saat itu ia akan menjual obligasi lagi untuk memperoleh *stock* uang sebesar K, yang selanjutnya ia gunakan berulang. Kas rata-rata yang dipegang dengan biaya minimal adalah sebesar $\frac{1}{2} K$ yang berupa garis lurus sejajar OS^* selama periode $AS_1 = BS_2 = CS_3 = DS^*$.

Dengan dasar tersebut, fungsi permintaan akan uang tunai untuk transaksi tersebut adalah :

$$\frac{Md}{P} = \frac{K}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2bT}{R}} \text{ atau } Md = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2bT}{R}} \cdot P \dots\dots\dots (2.14)$$

$$Md = \alpha \cdot T^{0.5} R^{-0.5} P \dots\dots\dots (2.15)$$

Jika dilihat persamaan di atas, ternyata berbeda dengan persamaan Keynes yaitu mengenai permintaan uang $Md = k.P.Y$. Bentuk permintaan akan uang menurut Keynes merupakan bentuk permintaan akan uang yang

proporsional dengan pendapatan. Bentuk rumus yaitu Boumol merupakan bentuk permintaan akan uang yang menunjukkan adanya *economies of scale* penggunaan uang.

Konsekuensi *economies of scale* penggunaan akan uang tersebut adalah :

- 1) Dari segi ekonomi makro, permintaan akan uang untuk transaksi dari masyarakat tergantung dari pendapatan nasional (Y) distribusi pendapatan antar warga masyarakat. Apabila sebagian besar dari Y diterima oleh sejumlah kecil orang (yaitu apabila distribusi pendapatan tidak merata) maka permintaan masyarakat akan uang transaksi adalah lebih kecil daripada apabila Y yang sama didistribusikan secara lebih merata.
- 2) Dari segi kebijaksanaan moneter, adanya *economies of scale* dalam penggunaan uang untuk transaksi mempunyai implikasi bahwa kebijaksanaan moneter relatif lebih efektif dari seandainya tidak ada *economies of scale* (yaitu dalam kasus permintaan yang proporsional). Contohnya, jika uang beredar (M_s) meningkat dua kali maka (karena $M_s = M_d$ dalam equilibrium) pendapatan nasional (Y) akan naik menjadi $2^2 = 4$ kali. Jadi $2 M_s = 2 M_d$. Jika tidak ada *economies of scale* $M_d = k.P.Y$, maka bila M_d naik dua kali maka Y juga naik dua kali lipat.

Perkembangan aspek spekulasi dari Keynes terutama sekali berasal dari karya James Tobin. Kelemahan dari teori Keynes adalah pada suatu saat seorang individu akan memegang seluruh kekayaannya dalam bentuk uang tunai atau seluruh dalam bentuk kombinasi uang dan obligasi. Ini adalah suatu asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kenyataan kita jumpai orang memegang berbagai kombinasi antara uang dan surat-surat berharga (orang melakukan "diversifikasi" bentuk kenyataan yang mereka pegang).

Tobin dalam teorinya bermaksud menunjukkan bagaimana keinginan individu memegang uang yang diturunkan dari pengaruh resiko terhadap pemegangan obligasi. Dalam kasus ini, individu dihadapkan pada masalah ketidakpastian tentang suku bunga dan nilai-nilai obligasi di masa yang akan datang.

Dianggap bahwa semakin besar *expectations* mengenai perolehan dari suatu aktiva, maka pemilik kekayaan akan dihadapkan pada resiko yang lebih besar. Ini memberi indikasi bahwa semakin tinggi suku bunga akan mendorong pemilik kekayaan untuk meminta atau mewujudkan kekayaan dalam bentuk obligasi dan mengurangi jumlah uang yang diminta

untuk tujuan spekulasi. Dengan kata lain terdapat hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan permintaan uang untuk tujuan spekulasi.

2.3.5 Teori Kuantitas Modern

Pelopop pembaharuan teori kuantitas (klasik) sesudah Keynes adalah Milton Friedman dari Universitas Chicago. Dalam makalah yang sangat terkenal "*The Quantity Theory Of Money A Restatement*", Friedman mendefinisikan teori kuantitas sebagai teori permintaan uang (Boediono, 1998).

Friedman berpendapat bahwa teori permintaan uang adalah suatu aplikasi dari teori permintaan pada umumnya. Hal ini karena prinsip dasar dari teori permintaan uang adalah sama dengan teori permintaan barang yaitu perilaku tindakan memilih dari individu atau pemilik kekayaan.

Friedman tidak bertitik tolak dari pembahasan yang mendalam mengenai motif-motif memegang uang, tetapi mengetengahkan argumentasi mengapa orang bersedia memegang uang karena uang seperti halnya aktiva lainnya merupakan salah satu wujud pemilikan kekayaan dan memberi jasa atau manfaat kepada mereka yang ingin memiliki kekayaan tersebut karena merupakan sumber daya beli yang likuid. Manfaat (*return*) dari setiap bentuk aktiva dan merupakan faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik kekayaan dalam mengambil keputusan mengenai besarnya masing-masing aktiva yang akan dipegang. Friedman beranggapan bahwa permintaan uang pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kekayaan total, harga dan perolehan dari berbagai bentuk pemegang kekayaan, selera dan preferensi pemilik kekayaan.

Sumbangan yang paling penting dari Friedman dalam analisis ekonomi adalah konsepnya mengenai kekayaan (*wealth*) dan kekayaan bukan manusiawi (*non human wealth*). Kekayaan manusiawi merupakan tenaga kerja seseorang yang di masa yang akan datang potensial dapat menghasilkan aliran pendapatan.

Pengertian "kekayaan" dari Friedman mempunyai ciri khas yaitu bahwa yang dimaksud dalam definisi "kekayaan" tidak hanya aktiva-aktiva yang berbentuk nilai dari aliran penghasilan di tahun-tahun mendatang dari tenaga kerja. Friedman beranggapan bahwa kekayaan dapat diwujudkan dalam bentuk : uang (M), obligasi (B), equitas atau saham-saham (E), barang-barang fisik bukan manusiawi (G) dan kekayaan manusiawi atau *Human Capital* (H).

Teori Friedman, seperti halnya dengan barang-barang konsumsi dalam teori permintaan biasa, uang dan aktiva-aktiva lain yang mungkin dipegang dianggap mempunyai *Marginal Rate Of Substitution*.

Dalam teori *Marginal* tersebut terungkap bahwa memegang uang kas akan menurunkan tingkat substitusi marginal terhadap pemegang kekayaan lain. *Return* (hasil) yang didapat memegang uang kas adalah *in natura* atau *utility*, karena *in natura* akan timbul dari sifat likuid dari uang. Memegang uang kas akan menyebabkan adanya perubahan nilai uang kas itu sendiri, karena dipengaruhi oleh faktor harga barang (P). Selain ditentukan oleh P, return untuk aktiva uang tunai dari waktu ke waktu ditentukan pula oleh persentase perubahan tingkat harga : $(dP/dt)/P$, di mana : t adalah variabel waktu, dP/dt adalah perubahan P dari waktu ke waktu. Kalau harga barang-barang turun, maka nilai riil dari uang tunai yang dipegang naik; sebaliknya bila harga naik maka nilai riil dari setiap satuan nominal uang tunai yang dipegang turun. Tapi *return* untuk uang tunai ini ternyata adalah kebalikan dari *return* pemegang aktiva fisik (G). Bila harga-harga barang naik, maka *return* untuk uang tunai turun, tetapi *return* untuk aktiva G naik, karena nilai dari aktiva fisik naik. Jadi ada "*capital gain*" (keuntungan kapital). Sebaliknya bila harga-harga barang turun, maka *return* untuk aktiva uang tunai (M) naik, *return* untuk G turun. Jadi *return* M maupun G dipengaruhi oleh $(dP/dt)/P$.

Return untuk aktiva yang dipegang dalam bentuk obligasi ditentukan oleh tingkat bunga yang berlaku (r). Friedman menyatakan bahwa besar *capital gain* ditentukan dari perubahan tingkat bunga dari waktu ke waktu. Kalau tingkat bunga naik, maka harga obligasi turun, kalau tingkat bunga turun maka harga obligasi naik.

Dalam bentuk persamaan, model permintaan uang individu dari Friedman dapat ditulis sebagai berikut :

$M_d = f(W, P, b, s, \pi, k, u)$	(2.16)
--	--------

Keterangan :

M_d = Jumlah nominal yang diminta

W = Y/r = kekayaan

P = Tingkat harga

b = $\alpha - (d\alpha/dt)/\alpha$ = tingkat manfaat dari pemilikan obligasi

α = Suku bunga obligasi

s = $\beta - (d\beta/dt)/\beta + (dP/dt)/P$ = tingkat manfaat dari equitas

β = *Market Yield Of Equitas*

π = $(dP/dt)/P$ = persentase perubahan harga (laju inflasi)

k = nisbah antara kekayaan manusiawi dan kekayaan bukan manusiawi

u = selera

2.4 Teori Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2001). Tolak ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan sebuah perekonomian salah satunya adalah pendapatan nasional.

Soediyono (1992) mengatakan dengan melihat tingkat pendapatan nasional suatu negara maka dapat diukur pula pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Pendapatan nasional dapat diwakili oleh angka-angka GNP ataupun GDP. Perbedaan utama dari GNP (*Gross National Product*) dengan GDP (*Gross Domestic Product*) terletak pada pendapatan netto terhadap luar negeri dari faktor produksi hasil. GDP atau juga dikenal sebagai pendapatan domestik bruto jika ditambahkan dengan pendapatan netto terhadap luar negeri menjadi pendapatan nasional bruto (GNP).

Dalam perhitungan pendapatan nasional dari tahun ke tahun terdapat unsur baru yaitu harga. Harga barang-barang dan jasa tidak selalu tetap setiap tahunnya. Oleh karena itu pendapatan nasional bruto (GNP) dapat dihitung dengan menggunakan harga berlaku (*Current Prices*) dan harga konstan (*Fixed Prices*). Harga konstan artinya harga barang dan jasa yang dihitung menurut harga tahun tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan faktor deflator, sedangkan menurut harga berlaku pada tahun perhitungan dengan tetap memperhitungkan faktor deflator. Dengan pendekatan harga konstan maka faktor inflasi atau deflator yang masih terkandung di dalam perhitungan pendapatan nasional dihilangkan (Nopirin, 2000). Diantara keduanya yang akan digunakan tergantung pada keperluan dan tujuan. Jika ingin membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu pada saat inflasi, sebaiknya digunakan perhitungan pendapatan nasional menurut harga konstan, sedangkan jika ingin mengamati perubahan peranan masing-masing sektor dari waktu ke waktu sebaiknya digunakan perhitungan pendapatan nasional menurut harga berlaku.

2.5 Hubungan GNP dengan Permintaan Uang

Samuelson (1992) mengatakan jumlah uang beredar secara bersama-sama ditentukan oleh bank sentral/pemerintah. Bila bank sentral mengkhawatirkan akan menimbulkan resesi, maka kemungkinan jumlah uang beredar akan ditingkatkan dan suku bunga yang berlaku akan turun. Rendahnya suku bunga meningkatkan pengeluaran dari komponen permintaan agregat yang sensitif terhadap tingkat bunga.

Penurunan suku bunga dengan peningkatan uang beredar menyebabkan peningkatan investasi, baik investasi dunia usaha maupun investasi asing netto. Dengan menggunakan model pengganda, di mana *equilibrium output* dicapai pada saat tabungan yang diinginkan sama besarnya dengan investasi yang diinginkan. Jadi peningkatan GNP mempunyai hubungan searah dengan peningkatan permintaan uang oleh masyarakat.

2.6 Teori Tingkat Bunga

Teori tingkat bunga dapat dilihat dari beberapa konteks seperti tingkat bunga sebagai harga uang, sebagai harga yang terjadi di pasar investasi, tingkat bunga dalam konteks permintaan dan penawaran uang (Boediono, 1998).

1) Tingkat Bunga Sebagai Harga Uang

Tingkat Bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Tingkat bunga sebesar 18 persen setahun berarti bahwa apabila kita meminjam Rp. 100,00 sekarang maka setahun lagi kita harus mengembalikan Rp. 118,00 yang terdiri dari Rp. 100,00 (pokok) dan Rp. 18,00 (bunga) kepada debitur kita tersebut.

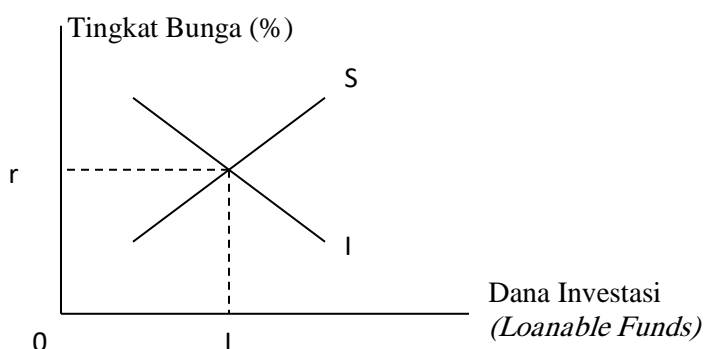
2) Klasik (*Loanable Funds*)

Bunga adalah “harga” dari (penggunaan) *loanable funds*. Terjemahan langsung dari istilah tersebut “dana yang tersedia untuk dipinjamkan”. Terjemahan bebasnya mungkin lebih baik dipergunakan istilah “dana investasi” sebab menurut teori Klasik, bunga adalah “harga” yang terjadi di “pasar” dana investasi.

Dalam suatu periode ada anggota masyarakat yang menerima pendapatan melebihi apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan konsumsinya sebelum periode tersebut. Mereka ini adalah kelompok “penabung”. Dengan jumlah seluruh “tabungan” mereka membentuk penawaran akan *loanable funds*. Di lain pihak, dalam periode yang sama ada

anggota masyarakat yang membutuhkan dana, mungkin karena mereka ingin berkonsumsi lebih daripada pendapatan yang diterima sebelum periode tersebut, atau yang lebih penting, karena mereka adalah pengusaha yang memerlukan dana untuk operasi atau perluasan usahanya. Mereka ini adalah “investor” dan jumlah dari seluruh kebutuhannya akan dana membentuk permintaan akan *loanable funds*.

Gambar 2.4 Tingkat bunga keseimbangan di pasar dana investasi



Sumber : Boediono (1998)

Berdasarkan gambar dapat dilihat kurva penawaran akan dana investasi (S) bertemu dengan kurva permintaan akan dana investasi (I) di pasar dana investasi (*loanable funds*) dan tercipta tingkat bunga keseimbangan (di mana $S = I$).

3) Keynesian : *Liquidity of Preference*

Dari teori Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Menurut mashab Keynes uang bisa “produktif” dengan cara lain. Dengan uang tunai di tangan orang bisa berspekulasi di pasar surat berharga dengan kemungkinan memperoleh keuntungan dan karena adanya kemungkinan keuntungan ini orang mau membayar bunga. Kaum Keynesian lebih menekankan sifat uang sebagai suatu aktiva yang likuid yang bisa digunakan untuk memanfaatkan kesempatan, memperoleh keuntungan dari pasar-pasar surat berharga. Jadi tingkat bunga adalah juga “harga uang” yang timbul dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang sebagai aktiva likuid.

Terdapat 2 (dua) macam bunga dalam kegiatan sehari-hari yaitu :

- 1) Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan

uang di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada masyarakatnya, sebagai contoh : jasa giro atau bunga tabungan dan bunga deposito.

- 2) Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan pada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, sebagai contoh : bunga kredit.

2.7 Hubungan Tingkat Suku Bunga dengan Permintaan Uang

Samuelson (1992), mengatakan jumlah uang beredar (yang besarnya sama dengan permintaan uang) bersama-sama ditentukan oleh Bank Sentral atau Pemerintah. Bila Bank Sentral mengkhawatirkan terjadinya resesi, maka kemungkinan suku bunga yang berlaku akan diturunkan. Rendahnya suku bunga akan mengakibatkan pengeluaran dari komponen permintaan agregatif yang sensitif terhadap tingkat bunga uang. Turunnya tingkat bunga deposito menyebabkan peningkatan investasi dunia usaha maupun investasi asing netto, karena masyarakat cenderung berinvestasi dari pada menabung, akibatnya permintaan uang untuk kebutuhan investasi tersebut akan semakin meningkat. Jadi tingkat suku bunga memiliki hubungan yang negatif terhadap permintaan uang dalam masyarakat.

2.8 Teori Kurs Valuta Asing

Valuta asing merupakan mata uang tiap-tiap negara di dunia seperti dollar untuk Amerika Serikat, yen untuk Jepang, pound untuk Inggris dan mata uang lainnya. Perubahan permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing dalam pasar valuta asing akan merubah kurs valuta asing. Kurs valuta asing merupakan mata uang negara lain yang dinilai dengan mata uang dalam negeri atau kurs valuta asing adalah perbandingan atau harga antara dua mata uang (Nopirin, 1987).

Pertukaran antara mata uang yang berbeda maka akan terdapat perbandingan nilai atau harga antar kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang disebut dengan kurs atau *exchange rate*, misalnya kurs valuta asing (dollar Amerika Serikat) pada tahun 2000 adalah US \$ 1 = Rp 7.945,- berarti untuk mendapatkan sejumlah US \$1 maka Rupiah yang diperlukan sebesar Rp 7.945,-.

Kestabilan nilai tukar rupiah sangatlah diperlukan agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung lebih mantap. Hal ini disebabkan karena produsen atau eksportir dapat merencanakan kegiatan mereka secara lebih

pasti. Ada beberapa sistem kurs yang dapat menjaga kestabilan nilai tukar, diantaranya.

1) Sistem Kurs Tetap (*Fixed Exchange Rate System*)

Adalah kurs yang ditentukan oleh badan yang berwenang di bidang moneter (otoritas moneter), untuk waktu tertentu kurs ini tidak berubah-ubah. Apabila nilai mata uang negara tersebut berubah maka otoritas moneter yang berhak mengambil kebijakan untuk mengembalikan nilai tukar ke nilai yang ditetapkan. Konsekuensi dari kebijakan nilai tukar tetap adalah otoritas moneter harus bisa memperkirakan dengan tepat nilai tukar *equilibrium* yang harus dipertahankan agar tidak *over value*, sehingga dibutuhkan cadangan devisa yang besar untuk melakukan intervensi, dibutuhkan koordinasi kebijakan moneter antarnegara.

2) Sistem Kurs Mengambang atau Berubah (*Floating Exchange Rate System*)

Kebijakan sistem kurs ini adalah dengan memberikan kebebasan atau mengambang pada pasar untuk mencapai nilai keseimbangan sehingga tinggi rendahnya kurs tergantung dari permintaan dan penawaran. Sistem kurs mengambang terdiri dari.

(a) Sistem Kurs Mengambang Bebas

Penentuan nilai tukar ini terjadi tanpa adanya campur tangan dari otoritas moneter. Oleh sebab itu, kebijakan moneter dapat lebih independen. Otoritas moneter bisa menetapkan *supply* Rupiah dan membiarkan pasar valuta asing menentukan nilai tukar sehingga sasaran kebijakan moneter terfokus dan lebih efektif dalam mengendalikan inflasi.

(b) Sistem Kurs Mengambang Terkendali

Penentuan nilai tukar ini dibiarkan secara bebas sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar tetapi berbagai intervensi kebijakan masih dipakai untuk menjaga agar nilai tersebut berada pada target nilai yang ditentukan.

3) Sistem Kurs Terkait

Sistem nilai tukar yang ditetapkan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Salah satu variasi dari sistem kurs terkait adalah *Currency Board System* (CBS) yang diterapkan oleh beberapa negara yang mengalami kesulitan moneter. *Currency Board System* (CBS) dilaksanakan dengan cara mengaitkan dan

menetapkan nilai tukar tetap antara mata uang suatu negara dengan *Hard Currency* tertentu didasarkan kepada jumlah mata uangnya yang beredar dan cadangan devisa yang dimilikinya (dalam bentuk mata uang *Hard Currency*) (Hamdy, 2001).

Beberapa faktor yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan sistem kurs, yaitu (Winarno, 2006) .

1) Besarnya perekonomian dan tingkat keterbukaan.

Pada struktur ekonomi sebuah negara, perdagangan internasional merupakan bagan terbesar dalam konfigurasi PDB, gejolak kurs mata uang bisa merepotkan. Hal itu disebabkan oleh potensi pengaruh yang bisa mengena berbagai sektor perekonomian.

2) Tingkat inflasi.

Jika inflasi suatu negara lebih besar daripada nilai inflasi mitra dagangnya, sistem kurs fleksibel lebih mudah untuk menyesuaikan ketika terjadi penurunan daya saing.

3) Sifat peraturan perburuhan.

Apakah kaku atau fleksibel lebih mudah dilakukan adaptasi agar mampu berdaya saing.

4) Tingkat kemajuan pasar uang.

Di negara berkembang dengan pasar uang yang belum terlalu maju, sistem kurs bebas kurang cocok, karena volume perdagangan uang yang kecil dapat menimbulkan gejolak yang cukup besar.

5) Kredibilitas otoritas moneter.

Bila otoritas moneter dianggap kurang memiliki kredibilitas, sistem kurs bebas mengakibatkan lonjakan kurs yang tinggi.

6) Mobilitas modal.

Di negara yang lalu lintas modalnya tidak memiliki mekanisme pembatasan akan sulit mempertahankan sistem kurs tetap.

Kurs valuta asing sangat tergantung dari sifat pasar apabila transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan secara bebas di pasar, maka kurs dari valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Kurs valuta asing dalam suatu negara juga sangat ditentukan oleh sistem valuta asing yang digunakan negara yang bersangkutan, yaitu (Nopirin, 1997):

1) Sistem kurs yang berubah-ubah

Didalam pasar bebas, perubahan kurs tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing diturunkan dari transaksi debit dalam neraca pembayaran internasional. Sedangkan penawaran valuta asing berasal dari eksportir yaitu berasal dari transaksi kredit dalam neraca pembayaran internasional.

2) Sistem kurs yang stabil

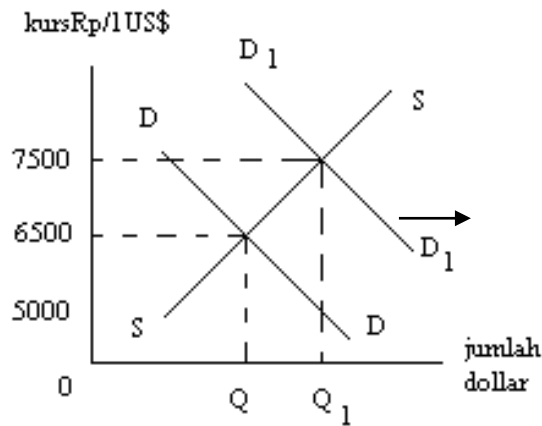
Merupakan sistem kurs dimana stabilitas kurs dipertahankan melalui intervensi pemerintah. Pada dasarnya kurs yang stabil dapat timbul secara :

- (1) Aktif : yakni pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilitas kurs (*stabilisation funds*). Kegiatan stabilisasi kurs dapat dijalankan sebagai berikut: apabila tendensi kurs valuta asing akan turun maka pemerintah membeli valuta asing biasa. Dengan bertambahnya permintaan dari pemerintah maka tendensi kurs turun dapat dicegah dan sebaliknya.
- (2) Pasif : yakni didalam suatu negara yang menggunakan sistem standar emas. Suatu negara dikatakan menggunakan standar emas :
 - (a) Nilai mata uangnya dijamin dengan nilai seberat emas tertentu.
 - (b) Setiap orang boleh membuat serta melebur uang emas.
 - (c) Pemerintah sanggup membeli maupun menjual emas yang tidak terbatas pada harga tertentu (harga yang sudah ditetapkan pemerintah).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs valuta asing

Apabila kurs valuta asing sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar maka kurs tersebut akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan permintaan dan penawaran. Untuk jelasnya bagaimana akibat kenaikan permintaan dollar terhadap kurs valuta asing dapat dijelaskan dalam Gambar 2.5 sebagai berikut.

Gambar 2.5 Akibat kenaikan permintaan dollar terhadap kurs valuta asing



Sumber : Nopirin (1999)

Dari Gambar 2.5 dapat dijelaskan, mula-mula harga dollar (kurs) = Rp 6500,-, jumlah dollar diminta atau ditawarkan sebesar Q. Apabila terjadi kenaikan permintaan dollar dari $0Q$ menjadi $0Q_1$, ini mengakibatkan kenaikan harga dollar dari Rp 6500,- menjadi Rp 7500,- dan ini mengakibatkan kurva DD bergeser menjadi D_1D_1 . Ini berarti kenaikan permintaan dollar mengakibatkan lebih banyak rupiah yang dikorbankan untuk mendapatkan dollar yang sama.

Perubahan kurs valuta asing disamping disebabkan oleh perubahan permintaan dan penawaran, ada beberapa faktor lain yang berpengaruh yaitu:

- a. Perubahan dalam citarasa masyarakat.

Perubahan ini akan mempengaruhi permintaan. Apabila penduduk suatu negara lebih menyukai barang-barang dari negara lain, maka permintaan mata uang negara lain tersebut bertambah dan menaikkan harga mata uang negara tersebut.

- b. Perubahan harga dari barang ekspor.

Apabila harga barang-barang ekspor mengalami perubahan maka perubahan ini akan mempengaruhi permintaan barang tersebut. Perubahan ini selanjutnya akan mempengaruhi kurs valuta asing. Kenaikan harga barang-barang ekspor akan mengurangi permintaan barang tersebut di luar negeri. Maka kenaikan tersebut akan mengurangi penawaran mata uang asing. Kekurangan penawaran ini akan menjatuhkan nilai

uang dari negara yang mengalami kenaikan dalam harga barang eksportnya.

c. Kenaikan harga barang domestik.

Berlakunya keadaan demikian di suatu negara dapat menurunkan nilai nyata uangnya, dengan asumsi harga barang impor tetap, maka kenaikan harga itu akan menyebabkan penduduk negara itu semakin banyak mengimpor dari negara lain. Oleh karenanya permintaan valuta asing bertambah mahal dan ini akan mengurangi permintaannya dan selanjutnya akan menurunkan penawaran valuta asing.

d. Perubahan dalam tingkat pengembalian investasi.

Tingkat pengembalian investasi sangat mempengaruhi jumlah serta arah aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat pendapatan dari investasi yang lebih menarik dan mendorong pemasukan modal ke negara tersebut. Penawaran valuta yang bertambah ini akan meningkatkan nilai mata uang negara yang menerima modal tersebut.

2.9 Hubungan Kurs Valuta Asing Dengan Permintaan Uang

Hubungan kurs valuta asing dengan permintaan uang adalah positif. Menurut Sukirno (2008), hubungan kurs valuta asing dengan permintaan uang di masyarakat berkaitan erat dengan ekspor. Jika Kurs naik, berarti daya beli mata uang asing lebih tinggi sehingga dengan uang yang sama akan mendapat barang yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan ekspor meningkat dan permintaan uang untuk transaksi juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila kurs menurun maka hal ini berarti daya beli mata uang asing akan rendah sehingga dengan uang yang sama akan mendapat barang yang sedikit, hal ini menyebabkan ekspor menurun dan permintaan uang cenderung menurun. Jadi kurs valuta asing dengan permintaan uang memiliki hubungan yang searah atau positif.

BAB III

INFLASI

3.1 Inflasi Dalam Perekonomian

Inflasi merupakan fenomena moneter. Pandangan bahwa inflasi merupakan fenomena moneter adalah implikasi dari teori kuantitas uang yang merupakan tulang punggung makroekonomi aliran moneteris (Dornbusch & Fisher, 1997). Dornbusch menyatakan pada perekonomian Amerika Serikat Tahun 1960-1985, kecenderungan umum dari laju pertumbuhan uang beredar memang mempengaruhi inflasi, tetapi efeknya terjadi dengan tenggang waktu yang tidak begitu persis.

Dalam jangka pendek, inflasi bukan hanya dipengaruhi oleh gejolak moneter, tetapi dipengaruhi juga antara lain oleh perubahan fiskal dan gejolak di sisi penawaran.

Untuk kasus yang terjadi di Indonesia telah diteliti oleh Sutikno dan Prpto Yuwono selama April 1996 – Agustus 1999 menyatakan bahwa uang beredar merupakan akar penyebab adanya inflasi bukan sebaliknya dengan menggunakan uji granger. Setiap penambahan jumlah uang beredar dalam masyarakat, akan berdampak berupa harga-harga umum.

Persoalan yang dihadapi Indonesia dewasa ini, yang dianggap akan berpengaruh pada inflasi berkaitan dengan peredaran uang antara lain :

- 1) Beredarnya uang palsu, yang secara langsung akan mempengaruhi peredaran uang di Indonesia. Peredaran uang palsu demikian sama sekali tidak dapat dikendalikan oleh otoritas moneter di Indonesia, namun dampaknya akan terasa berupa kenaikan harga-harga umum.
- 2) Penyelamatan lembaga perbankan di Indonesia dengan menggunakan dana KLBI, secara tidak langsung mendorong pertumbuhan jumlah uang beredar dalam masyarakat, yang gilirannya akan berdampak pada kenaikan harga-harga juga.
- 3) Tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan PNS yang amat besar, sementara dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai kenaikan tersebut, akan mengakibatkan defisit dalam anggaran

belanja pemerintah. Pembiayaan dengan pencetakan uang baru akan meningkatkan jumlah uang beredar, yang pada gilirannya akan tercermin dalam bentuk kenaikan harga-harga.

3.2 Macam Inflasi Menurut Sifatnya

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda atas dasar besarnya laju inflasi. Inflasi menurut sifatnya dapat dibagi menjadi tiga kategori antara lain :

1) *Creeping inflation* (Inflasi merayap atau moderat)

Ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10 % per tahun). Kenaikan harga berjalan lambat, dengan persentase kecil, dan dalam jangka waktu lama.

2) *Galloping inflation* (Inflasi ganas)

Ditandai dengan kenaikan harga cukup tinggi (*double* bahkan *triple digit*), dan berjalan dalam jangka waktu relatif pendek yang bersifat akselerasi.

3) *Hyper inflation* (Inflasi tinggi)

Merupakan inflasi paling parah akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali.

3.3 Macam Inflasi Menurut Sebabnya

Penyebab awal terjadinya inflasi dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1) Inflasi karena banyak permintaan (*Demand Full Inflation*). Inflasi jenis ini disebabkan karena kelebihan permintaan efektif: pembelanjaan masyarakat ($C + I + G + X_n$) terlalu besar (atau naik terlalu cepat) sehingga tidak dapat dilayani oleh dunia usaha.
- 2) Inflasi karena dorongan biaya (*Cost-push Inflation*). Jenis inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi disebut *cost-push inflation*. Kenaikan biaya produksi “mendorong” harga-harga ke atas.
- 3) Inflasi karena struktur permintaan yang berubah cepat (*Bottleneck Inflation*)

Yang dimaksud adalah kenaikan tingkat harga dapat juga timbul tanpa naiknya permintaan total atau jumlah uang beredar, jika struktur permintaan berubah lebih cepat dari pada mobilitas sumber-sumber. Misal

: Berakhirnya perang akan menimbulkan berkurangnya pengeluaran pemerintah, secara serentak konsumsi dan investasi bertambah, berkurangnya biaya perang menyebabkan turunnya tingkat output secara drastis, bersamaan dengan itu bertambahnya permintaan konsumsi dan investasi yang dibarengi dengan pengendalian perang menyebabkan sangat naiknya harga barang-barang konsumsi dan investasi.

3.4 Macam Inflasi Menurut Parah Tidaknya Inflasi

Inflasi atas dasar kadar keparahan dibedakan menjadi beberapa macam inflasi sebagai berikut :

- 1) Inflasi Ringan (di bawah 10 % setahun)
- 2) Inflasi Sedang (antara 10-30 % setahun)
- 3) Inflasi Berat (antara 30-100 % setahun)
- 4) Hiper Inflasi (di atas 100 % setahun).

3.5 Macam Inflasi Menurut Asal Terjadinya

Penggolongan keempat adalah berdasarkan asal dari inflasi, yaitu :

- 1) *Domestic inflation* (Inflasi yang berasal dari dalam negeri)

Inflasi ini timbul karena terjadi defisit anggaran belanja yang dibiayai oleh pemerintah dengan pencetakan uang baru, karena panen gagal dan akibat-akibat lain sebagainya.

- 2) *Imported inflation* (Inflasi yang berasal dari luar negeri)

Inflasi ini timbul karena kenaikan harga-harga (yaitu, inflasi) di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang kita. Kenaikan harga barang-barang yang kita impor mengakibatkan : (1) secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor, (2) secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan harga produksi (dan kemudian, harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin impor (*cost inflation*), (3) secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena kemungkinan (tetapi ini tidak demikian) kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (*demand inflation*).

3.6 Pengelompokan Inflasi Berdasarkan Karakteristik Harga Komoditas

Penelompokan ini didasarkan atas determinan penyebab inflasi yakni dari sisi fundamental ekonomi yang berimplikasi pada timbulnya tekanan inflasi yang bersifat permanen atau determinan non fundamental yang berimplikasi pada timbulnya tekanan inflasi yang bersifat sementara (Kuncoro, 2015). Menurut Badan Pusat Statistik (2011), inflasi diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Inflasi inti adalah inflasi komoditi yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (determinan fundamental seperti ekspektasi inflasi, kurs, dan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat) yang berimplikasi pada perubahan harga-harga secara umum dan bersifat lebih permanen.
- 2) Inflasi harga yang diatur adalah inflasi kelompok komoditi yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah. Sebagai contoh, perubahan harga yang terjadi pada bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, tarif telepon, angkutan dalam kota, air minum yang selama ini dipengaruhi oleh pemerintah, perusahaan negara (BUMN), perusahaan daerah (BUMD) atau instansi pemerintah lainnya. Inflasi harga yang diatur dapat dirangkum melalui tabel 3.1
- 3) Inflasi makanan yang bergejolak adalah inflasi kelompok komoditi bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor – faktor tertentu. Misalnya inflasi yang terjadi pada komoditi bahan makanan seperti beras, cabai dan beberapa jenis sayur mayur yang seringkali berfluktuasi secara tajam karena dipengaruhi oleh kondisi kecukupan pasokan komoditi yang bersangkutan, seperti halnya bila terjadi perubahan musim panen, gangguan hama maupun distribusi produk serta karena bencana alam. Inflasi jenis ini dapat dilihat pada tabel 3.2 tentang komoditi yang termasuk inflasi kategori bergejolak

Tabel 3.1**Komoditi Klasifikasi Harga yang Diatur Pemerintah**

1	Rokok Kretek	12	Solar
2	Rokok Kretek Filter	13	Tarif Taksi
3	Rokok Putih	14	Tarif Kereta Api
4	Tarif Air PDAM	15	Biaya Kirim Surat
5	Tarif Listrik	16	Biaya Telepon
6	Bahan Bakar RT	17	Biaya Telepon di Warung Telepon
7	Tarif Puskesmas	18	Tarif Pembuatan SIM
8	Anggkutan SDP	19	Tarif Jalan Tol
9	Anggkutan Dalam Kota	20	Tarif Parkir
10	Anggkutan Laut	21	Jasa Perpanjangan STNK
11	Bensin	22	Jasa Pembuatan SIM

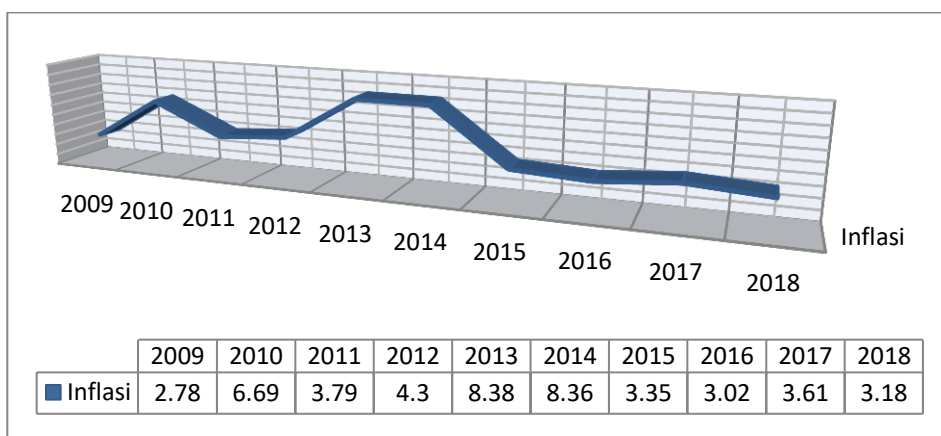
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011

Tabel 3.2**Komoditi Klasifikasi Harga Bergejolak**

1	Beras	22	Udang Basah	43	Kacang Tanah
2	Mie Kering Instan	22	Teri	44	Tahu Mentah
3	Ayam Hidup	24	Susu Bubuk	45	Tempe
4	Daging Ayam Kampung	25	Telur Ayam Ras	46	Anggur
5	Daging Ayam Ras	26	Bayam	47	Apel
6	Daging Sapi	27	Daun Kutuk	48	Jeruk
7	Bandeng	28	Selada/Daun Selada	49	Melon
8	Cakalang	29	Jagung Muda	50	Pepaya
9	Cumi-Cumi	30	Jagung Panjang	51	Pisang
10	Dencis	31	Kangkung	52	Semangka
11	Gabus	32	Kentang	53	Tomat Buah
12	Gembung	33	Mentimun	54	Bawang Merah
13	Layang	34	Kubis/Kol Putih	55	Bawang Putih
14	Lele	35	Labu Siam	56	Gula Merah
15	Mas	36	Cabai Hijau	57	Cabe Rawit
16	Teri	37	Nangka Muda	58	Kelapa
17	Mujair	38	Petai	59	Minyak Goreng
18	Patin	39	Sawi Hijau	60	Minyak Mentah
19	Selar	40	Tomat Sayur	61	Cabe Merah
20	Serai	41	Wortel		
21	Terong	42	Jagung Manis		

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011

Gambar 3.1. Menunjukkan Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2009-2018



Sumber : Bank Indonesia, 2019 (Data diolah)

Gambar 3.1 menunjukkan fluktuasi inflasi di Indonesia selama satu dasawarsa terakhir dimana tingkat inflasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi pada Tahun 2013 sebesar 8,38 persen, angka tersebut jauh di atas target pemerintah pada APBN Perubahan 2013 yang dipatok sebesar 7,2 persen, hal ini diakibatkan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar Rp 5.500/liter. BBM memberi andil atas inflasi sebesar 1,17 Persen oleh karena itu kebijakan *linier* dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengakselerasi tingkat suku bunga deposito sebesar 1.33 persen atau dari 7.61 persen ke level 8.94 persen, hal ini pula yang menyebabkan tingkat suku bunga deposito tahun 2014 mengalami peningkatan tertinggi di banding tahun sebelumnya dalam satu dasawarsa terakhir.

3.7 Hubungan Inflasi dengan Permintaan Uang

Dornbusch dan Fisher (1997) mengatakan inflasi merupakan keadaan dimana barang cenderung meningkat sepanjang waktu dan terjadi secara terus menerus. Jika tingkat harga-harga mengalami kenaikan, masyarakat harus membayar lebih banyak untuk mendapatkan berbagai barang dan jasa yang mereka inginkan. Dengan naiknya tingkat harga berarti menyebabkan menurunnya nilai uang karena setiap rupiah yang dimiliki oleh masyarakat sekarang hanya dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit daripada sebelumnya. Jadi hubungan inflasi dengan permintaan uang adalah positif, semakin tinggi tingkat harga barang atau jasa tentunya akan semakin banyak permintaan uang yang diperlukan, demikian pula sebaliknya semakin rendah tingkat inflasi maka permintaan uang akan semakin menurun. Jadi kurs valuta asing dengan permintaan uang memiliki hubungan yang searah atau positif.

BAB IV

KRISIS MONETER

4.1 Gambaran Umum Krisis Moneter

Sejak pertengahan 1997, Indonesia dan sebagian beberapa negara Asia Tenggara dan Timur mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh beberapa faktor baik yang bersifat eksternal maupun internal¹. Penarikan dana secara tiba-tiba dalam jumlah yang besar oleh para investor asing yang didorong oleh pesimisme prospek perekonomian regional dengan segera melemahkan mata uang rupiah secara drastis.

Gelombang *capital outflow* tersebut kemudian diikuti oleh aksi beli dollar penduduk domestik yang membuat nilai rupiah semakin terpuruk. Melemahnya nilai rupiah melalui berbagai transmisi menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan kepada sektor-sektor perekonomian dengan tingkat keseriusan yang berbeda-beda. Sementara itu fluktuasi nilai tukar tampaknya semakin sulit diprediksi dan cenderung overshoot, sehingga untuk mengerem laju spekulasi dilakukan pengetatan moneter dengan konsekuensi suku bunga tinggi. Meningkatnya suku bunga umum tersebut secara paralel kemudian mendorong keatas bunga pinjaman atau biaya modal bagi perusahaan-perusahaan sektor riil.

Kenaikan biaya modal tersebut dengan sendirinya mengganggu perencanaan investasi maupun produksi jangka panjang yang pada akhirnya berpengaruh pada menurunnya penawaran agregat. Secara makro, terganggunya penawaran agregat tersebut dicerminkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi 1997 yang merosot menjadi 4,91% bahkan pada triwulan III tahun 1998 pertumbuhannya minus 17,13%, turun drastis dari rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun terakhir sebesar 7,9%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi jika diamati dari sisi produksi tidak lepas dari kelemahan internal sektor usaha nasional disamping kondisi eksternal lainnya.

Kelemahan internal atau lemahnya daya kompetensi tersebut pada umumnya bersumber dari inefisiensi manajemen yang secara riil tampak dari nilai ekuitas yang rendah, ketergantungan yang tinggi kepada pinjaman bank, intensitas penggunaan komponen impor yang tinggi, serta

segmen pasar yang terbatas dan cenderung pasar domestik. Kelemahan struktural tersebut walaupun dimiliki dalam intensitas yang berbeda-beda oleh masing-masing jenis usaha namun secara umum merupakan karakteristik sektor usaha riil nasional. Berlatarbelang pada tingkat resistensi perusahaan yang berbeda-beda dalam mengakomodasi dampak krisis tersebut maka disamping ditemukan banyak usaha yang terpuruk dipihak lain terdapat juga jenis usaha tertentu yang tetap bertahan bahkan memperoleh keuntungan (*blessing*) selama krisis.

4.2 Penyebab Krisis Moneter

Syahrir dalam Rita (2002) mengatakan ada beberapa faktor penyebab krisis moneter di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah sebagai berikut ini.

4.2.1 Kurs Rupiah dan Hutang Luar negeri

Pengaruh kurs rupiah terhadap krisis moneter yang terjadi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya hutang luar negeri para pengusaha dan pemerintah Indonesia. Banyak hutang luar negeri yang dimiliki baik oleh pemerintah maupun para pengusaha swasta ini menyebabkan kurs rupiah melemah terhadap USA Dollar. Ini terjadi karena hutang itu sudah jatuh tempo untuk dibayar terutama hutang swasta para pengusaha Indonesia. Para pengusaha swasta tersebut berlomba-lomba melakukan permintaan terhadap USA Dollar, sehingga akibatnya nilai USA Dollar meningkat sedangkan rupiah mengalami penurunan nilai. Melonjaknya nilai USA Dollar, disamping karena permintaan terhadap USA Dollar yang meningkat, juga disebabkan oleh adanya spekulasi yang dilakukan oleh masyarakat dan para spekulan. Jadi masyarakat disini melakukan spekulasi untuk mendapatkan keuntungan tetapi tanpa disadari hal ini telah menyebabkan nilai USA Dollar terus meningkat.

4.2.2 Inflasi dan Suku Bunga

Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Inflasi yang terjadi di Indonesia termasuk inflasi menengah yaitu inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga-harga umum yang cukup besar biasanya *double digit* atau bahkan *triple digit*. Sebab terjadinya inflasi di Indonesia adalah termasuk *cost push inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga serta turunnya produksi yang disebabkan karena adanya penurunan penawaran total sebagai akibat dari

kenaikan harga bahan baku industri, sebab sebagian bahan baku yang digunakan oleh pengusaha Indonesia berasal dari luar negeri sehingga harga bahan baku itu sendiri menjadi sangat mahal akibat melonjaknya nilai tukar rupiah terhadap USA Dollar. Pemerintah menaikkan tingkat suku bunga dengan tujuan untuk menekan laju inflasi dimana inflasi ditandai dengan kenaikan harga-harga umum karena jumlah barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sangat langka, sedangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak, maka nilai uang akan berkurang. Untuk itulah dengan meningkatnya suku bunga maka jumlah uang beredar berkurang sebab masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena adanya keuntungan yang dapat diperoleh dari tingkat suku bunga yang lebih tinggi tersebut.

4.2.3 Lemahnya Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor utama dari krisis yang terjadi di Indonesia adalah karena lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang terjadi di sektor perbankan. Selain itu banyaknya terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme juga mencerminkan betapa rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Akibatnya timbul ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan, sehingga terjadilah kerusuhan-kerusuhan yang menyebabkan semakin turunnya stabilitas negara Indonesia.

4.2.4 Stabilitas Negara yang Kurang Stabil

Kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 berdampak sangat luas pada perekonomian Indonesia. Akibat pertama adalah larinya para investor sehingga menyulitkan Indonesia untuk bangkit dengan mengandalkan investasi yang bertambah. Akibat yang kedua adalah larinya warga negara keturunan yang pada perekonomian Indonesia dikenal dengan penghubung antara produsen dengan konsumen yang paling baik, sehingga menambah semakin kacanya perekonomian Indonesia. Terkait dengan masalah krisis moneter, salah satu keputusan yang dihasilkan dalam sidang kabinet 8 Oktober 1998 adalah meminta intervensi IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia untuk membantu mengatasi krisis moneter yang mulai berkepanjangan. Pemberian bantuan dua lembaga ekonomi dunia ini mensyaratkan beberapa kebijakan yang mengarah pada proses restrukturisasi dalam rangka reformasi ekonomi. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah harus selalu mengkonsultasikan kebijakan pembangunan dalam kerangka struktural *Adjustment Programs* (Prasetyantoko, 2001).

Setelah krisis ekonomi mencapai puncaknya, ditandai dengan turunnya nilai rupiah terhadap USA Dollar yang mencapai nilai 16.000 rupiah. Pemerintah banyak melakukan langkah reformasi yang mendalam di berbagai sektor ekonomi. Hal yang menarik yaitu pemerintah melibatkan IMF sebagai pihak asing yang turut serta membenahi stabilitas moneter dan sektor ekonomi lainnya. Setelah masuknya pihak IMF yang datang dengan tim lengkap (termasuk direktornya sendiri Michael Camdessus), pemerintah orde baru mengumumkan beberapa langkah kebijakan, antara lain : pertama dibentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (IMF yang dimasukkan ke dalam dewan ini), kedua revisi terhadap RAPBN yang baru, ketiga ditetapkannya beberapa kebijakan yang menyangkut efisiensi pasar, keempat penyehatan terhadap sektor perbankan dengan strategi merger terhadap sejumlah bank pemerintah dan swasta, kelima pemerintah menghapuskan subsidi BBM.

Meskipun banyak pihak berharap banyak bahwa kebijakan reformasi yang mendapat supervisi langsung dari IMF ini akan membawa pembaharuan terhadap perekonomian Indonesia. Namun demikian tetap kebijakan ini harus membayar mahal dengan meningkatnya angka pengangguran (Prasetyantoko, 2001).

Menyangkut kuatnya peranan IMF dalam proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi dapat menjadi alat untuk mendesak terciptanya transparansi dan efisiensi ekonomi dalam negeri. Meskipun tetap harus disadari bahwa kepentingan IMF tidak terkait dengan persoalan pergantian kekuasaan dan tidak jarang justru bertolak belakang dengan kepentingan rakyat kecil. Contohnya pencabutan subsidi pemerintah terhadap bahan pokok dan BBM, dengan demikian pengaruh asing dapat sejalan dan bahkan dapat sangat bertolak belakang dengan kepentingan rakyat atau negara (Prasetyantoko, 2001).

4.3 Hubungan Krisis Moneter terhadap Permintaan Uang

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi, salah satu penyebabnya adalah peningkatan jumlah uang beredar. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya perubahan jumlah M_2 pada setiap Negara termasuk Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia tergolong paling parah jika dibandingkan dengan krisis serupa yang pernah terjadi di beberapa negara selama ini.

Pecahnya gelombang krisis pada tahun 1997 tidak saja memporakporandakan industri perbankan nasional tetapi juga menyeret perekonomian ke dalam pertumbuhan ekonomi yang begitu lambat.

Tidak sedikit bank-bank yang sakit secara finansial tumbang dalam hampasan badai krisis tersebut, krisis moneter setidaknya berdampak langsung terhadap permintaan uang yang mana pada saat krisis terjadinya peningkatan jumlah uang yang cukup pesat, peningkatan keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai disebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang ada dengan terjadinya *rush* (pengambilan uang besar-besaran secara serentak oleh masyarakat) diberbagai bank diseluruh Indonesia, sedangkan kenaikan M_2 terjadi karena peningkatan uang kuasi yang terdiri dari simpanan rupiah dan simpanan valuta asing, jadi terdapat hubungan yang searah antara krisis moneter terhadap permintaan uang (M_2) (Darmansyah, 2005).

BAB V

KONSTRUKSI KEBIJAKAN DAN SITUASI MONETER INDONESIA

5.1 Konsep Moneter

Moneter identik dengan jumlah uang beredar, dalam peredaran jumlah uang sampai jenis uang (uang kartal, giral dan kuasi). Dampak positifnya adalah ikut memberikan suatu keseimbangan dengan sektor riil dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi. Kebijaksanaan moneter adalah kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan yaitu terjaganya stabilitas ekonomi makro antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan *output riil* (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan kesempatan kerja yang tersedia (Bank Indonesia, 2004).

5.2 Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997

Pada awal kemerdekaan, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan bank sirkulasi berbentuk bank milik negara, dan dalam pelaksanaannya berupa pendirian Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 1946. Kedua bank milik negara tersebut dan beberapa bank swasta yang ditunjuk pemerintah melaksanakan penukaran mata uang Hindia, Belanda dan Jepang dengan mata Uang Republik Indonesia (ORI) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan pengeluaran atau pengedaran ORI tersebut adalah untuk menggantikan peranan mata uang Hindia, Belanda dan Jepang dalam perekonomian Indonesia pada waktu itu.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti *Javasche Bank Wet* tahun 1922. Dengan undang-undang tersebut dibentuklah Dewan Moneter, dan Menteri Keuangan bertindak sebagai Ketua, sementara Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia bertindak sebagai anggota. Dewan Moneter mempunyai berbagai tugas dan kewenangan yang terkait erat dengan upaya-upaya untuk mengendalikan

kondisi moneter, antara lain menentukan kebijakan moneter secara umum, mengatur dan menstabilkan mata uang, serta memajukan urusan kredit dan perbankan pada umumnya.

Pada masa awal berdirinya, Bank Indonesia selain berfungsi sebagai bank sirkulasi, juga berperan sebagai bank komersial dengan memberikan kredit langsung kepada pihak swasta, pemerintah dan yayasan-yayasan pemerintah, selain kredit kepada bank-bank dan badan-badan perkreditan lainnya. Dengan mulai tertatanya mekanisme peredaran uang, terdapat keinginan kuat pemerintah agar Bank Indonesia berperan lebih aktif dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Inilah yang kemudian dikenal dengan peran Bank Indonesia sebagai agen pembangunan. Pada prinsipnya, bentuk dari peran tersebut ada dua. Pertama, bentuk pembiayaan oleh Bank Indonesia melalui pencetakan uang terhadap defisit anggaran pemerintah yang relatif besar dan tidak terkontrol karena besarnya kepentingan politik pada waktu itu. Kedua, bentuk pembiayaan secara langsung oleh Bank Indonesia dalam sejumlah kegiatan ekonomi.

Perkembangan politik pada waktu itu telah cenderung menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter, yang dicerminkan oleh pencetakan uang yang berlebihan untuk pembiayaan defisit anggaran sebagai akibat kebijakan fiskal yang ekspansif. Keinginan yang kuat untuk menyenangkan rakyat telah mendorong pemerintah menempuh kebijakan fiskal tanpa mengindahkan prinsip-prinsip kehati-hatian, yang cenderung membutuhkan pengeluaran anggaran yang besar dan menyebabkan membengkaknya defisit anggaran pemerintah. Pembangunan proyek-proyek mercusuar atau pengeluaran untuk militer menjadi contoh konkrit yang terjadi pada waktu itu. Kondisi seperti itu telah menimbulkan melonjaknya uang beredar jauh melebihi kebutuhan riil perekonomian sehingga mendorong naiknya harga-harga secara tajam. Akibatnya, laju inflasi membumbung tinggi hingga mencapai lebih dari 600 persen pada tahun 1965, dan dikenal dengan sebutan periode *hyperinflation*.

Pada masa selanjutnya, yaitu sejak akhir tahun 1960-an, perkembangan ekonomi dan keuangan terus terjadi. Pada awalnya, kebijakan pemerintah lebih diprioritaskan untuk pemulihan stabilitas ekonomi yang sempat terancam pada pertengahan tahun 1960-an. Pengeluaran anggaran diseleksi secara ketat, defisit anggaran pemerintah dikendalikan, dan pembiayaan diupayakan dari pinjaman lunak luar negeri sehingga tidak mengancam stabilitas ekonomi, khususnya untuk pengendalian inflasi. Di sisi moneter, pencetakan uang untuk pembiayaan defisit anggaran pemerintah dihentikan dan jumlah uang beredar dikendalikan. Upaya ini dibarengi dengan penyediaan barang dan jasa yang

sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan penegakan disiplin baik di sisi fiskal maupun sisi moneter tersebut, stabilitas ekonomi dapat secara cepat dipulihkan, seperti terlihat dengan menurunnya secara drastis laju inflasi hingga di bawah 10 persen, sehingga kepercayaan untuk pemulihan kegiatan ekonomi dapat terbangun dengan baik. Penataan ekonomi, khususnya di sektor moneter dan perbankan lebih dimantapkan dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 1963 tentang Bank Sentral. Dalam hal ini, tugas Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam dua hal, yaitu pertama mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah dan kedua mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Peningkatan kegiatan perekonomian nasional kemudian mengalami dorongan lebih lanjut dengan hasil minyak yang meningkat khususnya pada awal dekade 1970-an. Ditemukannya ladang-ladang minyak di Indonesia telah memberikan sisi positif dan negatif. Di satu sisi, hasil minyak telah memberikan limpahan rezeki bagi penerimaan negara sehingga dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam APBN. Dengan peran aktif dan kecenderungan dominasi pemerintah, kebijakan fiskal telah memungkinkan terdorongnya kegiatan ekonomi riil. Namun, di sisi lain peningkatan penerimaan devisa hasil minyak dan pengeluaran pemerintah telah menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar dari sisi fiskal. Kondisi ini mengharuskan kebijakan moneter untuk melakukan penyerapan ekspansi moneter dari sisi fiskal tersebut agar tidak menimbulkan kelebihan likuiditas dalam perekonomian yang dapat meningkatkan laju inflasi.

Dengan latar belakang tersebut, pada tahun 1974 pemerintah mulai menempuh kebijakan kredit selektif dari sisi moneter. Tujuannya adalah agar jumlah uang beredar tetap terkendali sehingga laju inflasi dapat tetap terjaga. Hal ini terutama dilakukan dengan pengaturan terhadap besarnya ekspansi kredit yang diperbolehkan oleh perbankan, atau yang sering dikenal dengan pagu ekspansi aktiva neto. Setiap tahun Bank Indonesia menyusun rencana ekspansi kredit secara nasional dengan menghitung berapa jumlah uang beredar yang sesuai dengan perkiraan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun kehidupan sektor perbankan kurang bergairah akibat kelangkaan sumber dana karena menurunnya penghimpunan dana masyarakat dan adanya pembatasan dalam pemberian kredit, kegiatan investasi terus berlanjut, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada bank-bank dalam pemanfaatan dana terutama dalam pemberian kreditnya

kepada sektor swasta, Bank Indonesia pada tahun 1978 menurunkan *reserve requirement* bank-bank dari 30 persen menjadi 15 persen.

Pada awal dekade 1980-an terjadi kemerosotan harga minyak di pasar dunia sebagai akibat adanya kecenderungan terjadinya resesi dunia. Hal ini telah menyebabkan terbatasnya penerimaan negara untuk pembiayaan APBN. Dominasi pemerintah dalam menopang peningkatan kegiatan ekonomi tidak dapat lagi dipertahankan, dan akibatnya keberlangsungan pembangunan nasional terancam. Pemerintah kemudian menempuh serangkaian kebijakan reformasi di bidang ekonomi untuk mengatasi ancaman krisis karena merosotnya harga minyak tersebut. Tujuannya adalah menumbuhkan, mendorong, dan meningkatkan peran sektor swasta dalam setiap aspek kehidupan ekonomi untuk menggantikan peran pemerintah demi kesinambungan pembangunan nasional. Sejak awal dekade 1980-an pemerintah menempuh kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan bahkan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi, baik sektor perbankan dan keuangan, perdagangan, investasi dan sebagainya.

Pada 1 Juni 1983 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan, yang menandai era liberalisasi di sektor perbankan khususnya dan sektor keuangan pada umumnya. Kebijakan ini dan serangkaian kebijakan deregulasi di bidang perbankan dan sektor keuangan lainnya dalam periode sesudahnya telah mendorong begitu pesatnya perkembangan sektor perbankan dan keuangan di Indonesia. Hal ini tidak saja dapat dilihat dari jumlah bank yang beroperasi, besarnya dana masyarakat yang dapat dimobilisasi baik dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, tetapi juga dalam bentuk kredit dan jenis pembiayaan lainnya yang disediakan oleh perbankan untuk dunia usaha. Demikian pula di pasar keuangan, terjadi perkembangan yang pesat baik dari sisi volume transaksi keuangan maupun berbagai produk keuangan (saham, obligasi, surat-surat berharga, dan produk-produk derivatif) yang diperdagangkan.

Kondisi ekonomi, khususnya sektor keuangan, seperti ini telah membawa implikasi mendasar pada pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan *selective credit policy* mulai beralih ke cara-cara tidak langsung dan berorientasi pasar, antara lain dengan melakukan operasi di pasar uang (operasi pasar terbuka) untuk mengendalikan likuiditas perekonomian. Pengendalian moneter diarahkan pada jumlah uang beredar (M_1 dan M_2) sebagai sasaran-antara dan uang primer (M_0) sebagai sasaran operasional. Sementara itu, operasi di pasar uang dilakukan melalui lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang mulai diterbitkan mulai pada tahun 1984 sebagai instrumen utama kebijakan moneter. Pengendalian likuiditas juga dibantu dengan intervensi di pasar uang

rupiah dengan cara memberi pinjaman jangka pendek antara *overnight* hingga tujuh hari.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri dalam menghadapi persaingan global, pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan 27 Oktober 1988, yang secara umum merupakan paket penyempurnaan kebijakan di bidang keuangan, moneter, dan perbankan. Dalam hubungannya dengan upaya peningkatan efektivitas pengendalian moneter, langkah-langkah yang ditempuh antara lain adalah penurunan *reserve requirement* dari 15 persen menjadi 2 persen. Selain itu, di bidang perbankan, dilakukan penciptaan iklim persaingan yang lebih kondusif melalui pelonggaran izin pendirian bank-bank baru dan bank campuran. Kebijakan deregulasi yang cukup longgar tersebut telah mengakibatkan perkembangan yang sangat pesat sektor perbankan dan keuangan di Indonesia seperti diuraikan di atas.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan perbankan dan pasar keuangan di Indonesia tersebut, timbul permasalahan baru dalam pelaksanaan kebijakan moneter, khususnya berkaitan dengan upaya pengendalian jumlah uang beredar (M_1 dan M_2). Operasi dan produk perbankan baik dalam memobilisasi dana maupun dalam pembiayaan dunia usaha tidak hanya terbatas pada rekening giro, tabungan, deposito, ataupun kredit, tetapi juga telah bervariasi dalam berbagai bentuk instrumen pasar uang seperti *negotiable certificate of deposits*, *commercial papers*, *promissory notes*, *Automated Teller Machines (ATMs)*, dan sebagainya. Di sisi lain, perkembangan pasar modal, sendiri juga telah demikian pesat, baik dalam bentuk volume transaksi maupun jenis surat-surat berharga yang diperdagangkan. Selain itu, sebagai dampak dari liberalisasi sektor keuangan, aliran dana luar negeri yang masuk ke perekonomian Indonesia, khususnya pinjaman swasta, demikian besar dan pesat. Hal ini juga memanfaatkan periode *Boom* dalam perekonomian Indonesia, dan didukung oleh gelombang globalisasi di sektor keuangan, perdagangan, dan investasi yang demikian pesat. Di satu sisi, besarnya aliran dana luar negeri tersebut mampu menutup kesenjangan tabungan-investasi (*saving-investment gap*) sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Namun, di sisi lain aliran dana luar negeri tersebut juga kemudian menimbulkan sejumlah permasalahan. Dana luar negeri tersebut pada umumnya berupa pinjaman luar negeri swasta, berjangka pendek, tidak memperhitungkan resiko perubahan nilai tukar, dan banyak dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek swasta yang berjangka panjang dan tidak menghasilkan devisa. Dari sisi moneter, besar dan mobilitas aliran dana luar negeri tersebut juga mempersulit pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.

Untuk menghindari dampak negatif dari ekspansi uang beredar yang berasal dari aliran dana luar negeri tersebut terhadap peningkatan inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan penyerapan kelebihan likuiditas dalam perekonomian sehingga mendorong kenaikan suku bunga dalam negeri. Namun, kenaikan suku bunga ini semakin mendorong masuknya aliran dana luar negeri, khususnya dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka pendek. Akibatnya adalah jumlah pinjaman luar negeri swasta dalam berbagai bentuk dan jangka waktunya semakin membesar. Kondisi ini diperburuk lagi dengan tidak dijalankannya proyek-proyek swasta yang dibiayai dari pinjaman luar negeri sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat (*good corporate governance*) sehingga menjadi penyebab utama dari krisis sejak tahun 1997.

5.3 Kebijakan Moneter Periode Selama Krisis Moneter 1997

Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah menimbulkan berbagai permasalahan yang demikian sulit dan kompleks di berbagai bidang. Krisis yang mulanya berasal dari krisis moneter telah berubah cepat menjadi krisis ekonomi, krisis sosial budaya, krisis politik, dan menjadi krisis multidimensi. Pemicu utama krisis moneter tersebut adalah serangan spekulasi terhadap mata uang baht Thailand yang kemudian berdampak menjaral (*contagion effect*) ke mata uang rupiah Indonesia. Melemahnya rupiah telah mendorong investor luar negeri menarik dananya pada waktu bersamaan dari Indonesia yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio surat-surat berharga seperti *commercial papers*, *promissory notes*, dan *medium-term notes* maupun saham dan obligasi. Kepanikan kemudian terjadi di pasar valuta asing terutama karena perusahaan dan bank-bank di dalam negeri ingin memboyong devisa untuk membayar atau melindungi kewajiban luar negerinya dari risiko nilai tukar. Akibatnya, nilai rupiah semakin merosot hingga pernah mencapai tingkat terendah sekitar Rp. 15.000 per dollar AS pada awal tahun 1998.

Menghadapi tekanan yang begitu besar terhadap melemahnya nilai tukar rupiah, pada awalnya Bank Indonesia, sesuai sistem nilai tukar mengambang terkendali yang berlaku pada waktu itu, melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mempertahankan kisaran nilai tukar yang ditetapkan. Demikian besarnya pembelian valuta asing di pasar mengharuskan Bank Indonesia menyelamatkan jumlah cadangan devisa yang tersedia dengan tetap berupaya menstabilkan rupiah, antara lain dengan beberapa kali memperlebar kisaran intervensi nilai tukar rupiah dan terus mengendalikan likuiditas di pasar. Akan tetapi, tekanan yang

sangat kuat dan demikian cepat terhadap melemahnya nilai tukar rupiah yang disertai dengan penurunan cadangan devisa dalam jumlah yang cukup besar akhirnya memaksa pemerintah untuk mengubah sistem nilai tukar yang berlaku. Selanjutnya, sejak tanggal 14 Agustus 1997 Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang. Selain itu, pemerintah Indonesia kemudian meminta bantuan pendanaan dengan mengikuti program IMF.

Tantangan yang selanjutnya terjadi dalam pelaksanaan kebijakan moneter selama krisis adalah terjadinya kelangkaan dana perbankan sebagai akibat penarikan dana oleh masyarakat yang sangat besar (*rush*). Perkembangan ini terjadi setelah pemerintah menutup sejumlah bank yang dinilai tidak sehat sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam program IMF. Ditambah dengan semakin melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS, kepercayaan masyarakat terhadap rupiah semakin berkurang sehingga nilai tukar rupiah terus mengalami penurunan yang sangat tajam. Kompleksitas permasalahan kemudian meningkat karena krisis moneter perbankan tersebut disertai dengan berbagai permasalahan baik di bidang ekonomi maupun di bidang lain yang sebenarnya telah ada pada periode sebelum krisis. Di bidang ekonomi, struktur perekonomian bertumpu pada konglomerasi perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah hutang yang demikian besar, baik dari kredit perbankan dalam negeri maupun dari hutang luar negeri, telah memperburuk pelemahan nilai tukar rupiah yang pada gilirannya mendorong terjadinya krisis hutang swasta dan krisis ekonomi secara keseluruhan. Di bidang sosial politik, pergantian pemerintahan yang kemudian terjadi beberapa kali dalam transisi demokrasi yang menyertai krisis ekonomi tersebut tidak saja menyebabkan penanganan krisis lebih sulit, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan sosial politik di Indonesia. Rentetan krisis seperti itu mengakibatkan perluasan krisis di Indonesia dari krisis moneter menjadi krisis multidimensi seperti dikemukakan di atas.

Penanganan krisis tidak cukup diatasi dengan kebijakan moneter dan fiskal yang berhati-hati (*prudent*), tetapi harus dibarengi dengan kebijakan di bidang lain, khususnya hukum dan politik. Langkah-langkah tersebut sangat penting tidak saja diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, tetapi juga sekaligus dapat meletakkan landasan perekonomian nasional yang kukuh ke depan. Langkah-langkah dimaksud mencakup berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan nasional serta penataan kelembagaan pemerintahan melalui strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Arah strategi dan berbagai kebijakan yang ditempuh telah dituangkan dalam GBHN Tahun 1999-2004 beserta

penjabarannya dalam Propenas Tahun 2000-2004 dan dalam Repelita sebagai pelaksanaannya. Di samping itu, berbagai langkah kebijakan juga dirumuskan dalam sejumlah program dan rencana aksi dalam *Letter of Intent* (LOI) yang disepakati bersama antara pemerintah dan IMF. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan pelaksanaan secara konsisten berbagai langkah yang dirumuskan tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

5.4 Kebijakan Moneter Periode Pasca Krisis Moneter 1997

Strategi dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional mencakup pula sejumlah langkah kebijakan dan penataan kelembagaan di bidang moneter. Dari sisi kebijakan, langkah-langkah kebijakan moneter yang ditempuh lebih diarahkan kepada upaya menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Dengan masih rentannya nilai tukar rupiah dan relatif tingginya tekanan inflasi, kebijakan moneter yang *prudent* pada mulanya lebih ditekankan pada pengendalian jumlah uang beredar dalam perekonomian melalui pencapaian sasaran operasional uang primer yang ditetapkan sesuai dengan program yang disepakati antara pemerintah dengan IMF. Langkah kebijakan ini secara berangsur-angsur mampu menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengendalikan tekanan inflasi.

Dari sisi kelembagaan, penguatan Bank Indonesia sebagai bank sentral RI dilakukan dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam landasan hukum yang baru ini, Bank Indonesia mempunyai tujuan yang lebih fokus, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah, dalam arti terkendalinya laju inflasi dan stabilnya nilai tukar rupiah, merupakan salah satu prasyarat mendasar bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Sebaliknya, kegagalan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan karena berakibat menurunkan pendapatan riil masyarakat dan melemahkan daya saing perekonomian nasional dalam perekonomian dunia.

Untuk mencapai tujuan di atas, Bank Indonesia melaksanakan tiga tugas pokok, yaitu : (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta (iii) mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Pada dasarnya, pelaksanaan ketiga tugas ini mempunyai keterkaitan erat dalam upaya pencapaian kestabilan nilai rupiah. Misalnya, efektivitas pelaksanaan tugas kebijakan moneter memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Sementara itu, sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal tersebut juga tergantung pada sistem perbankan yang sehat. Selain itu, sistem perbankan yang sehat juga akan mendukung efektivitas pelaksanaan pengendalian moneter mengingat mekanisme transmisi kebijakan moneter ke kegiatan ekonomi riil terutama berlangsung melalui sistem perbankan. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara antara lain: (i) operasi pasar terbuka, (ii) penetapan tingkat diskonto, (iii) penetapan cadangan wajib minimum, dan (iv) pengaturan kredit atau pembiayaan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter sangat tergantung pada sistem nilai tukar dan sistem devisa yang dipilih. Untuk itu, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan nilai tukar dan pengelolaan cadangan devisa sesuai dengan sistem nilai tukar dan sistem devisa yang ditetapkan, sejalan dengan tujuan kebijakan moneter dalam rangka mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan ekonomi.

5.5 Kerangka Strategis Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter harus dilaksanakan secara komprehensif, transparan berkelanjutan dan wajib hukumnya mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Ketentuan ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter dapat dijadikan acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat luas. Disamping itu, ketentuan ini dimaksudkan pula agar kebijakan BI sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan, termasuk bidang keuangan negara dan perkembangan sektor riil.

Dalam mencapai sasaran akhir terhadap laju inflasi, secara periodik Bank Indonesia memantau perkembangan berbagai variabel ekonomi riil, moneter dan keuangan untuk menyakinkan bahwa sasaran inflasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemantauan terhadap variabel ekonomi

riil dilakukan melalui analisis dan proyeksi perkembangan ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pemantauan dilakukan baik dari sisi permintaan (konsumsi, investasi, ekspor-impor baik pihak swasta maupun pemerintah) dan juga dari sisi penawaran (seluruh sektor ekonomi). Dengan pemantauan variabel-variabel tersebut dapat diketahui secara dini kemungkinan tekanan inflasi ke depan.

Sementara itu, pemantauan terhadap variabel-variabel moneter dan keuangan sebagai sasaran antara dilakukan untuk menentukan berjalannya mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sektor riil. Transmisi kebijakan moneter pada umumnya berjalan melalui beberapa jalur, yaitu jalur uang, jalur kredit, jalur suku bunga, jalur nilai tukar, jalur harga aset dan jalur ekspektasi inflasi (Bank Indonesia, 2004). Untuk itu Otoritas moneter harus selalu memantau perkembangan sasaran antara yang mencakup besaran-besaran moneter (M_1 dan M_2), suku bunga dan nilai tukar rupiah. Sedangkan variabel-variabel sektor keuangan mencakup perkembangan dana perbankan, kredit dan pembiayaan lain, kondisi kesehatan perbankan dan pasar modal. Melalui pemantauan tersebut dapat dianalisis seberapa jauh pengaruh kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, khususnya kecepatan dan tenggat waktu terhadap perkembangan ekonomi riil dan inflasi ke depan. Dengan pemantauan terhadap perkembangan sektor riil dan berjalannya mekanisme transmisi moneter maka akan dapat dirumuskan kebijakan moneter yang perlu ditempuh dalam rangka mengantisipasi perkembangan inflasi dan *output riil* ke depan.

Bekerjanya transmisi kebijakan moneter di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan struktural dan kebijakan ekonomi keuangan. Pada periode sebelum krisis, sejalan dengan liberalisasi sektor keuangan di Indonesia, perekonomian Indonesia mengalami akselerasi aliran masuk modal luar negeri yang sangat tinggi dan pada akhirnya mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi ini, jalur suku bunga bekerja cukup baik dalam mentransmisi pengaruh kebijakan moneter pada perubahan suku bunga simpanan dan deposito. Akan tetapi perubahan suku bunga tersebut bukan merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi dan investasi yang pada waktu itu lebih banyak didorong oleh tingginya pertumbuhan ekonomi dan melimpah ruahnya ketersediaan dana yang bersumber dari luar negeri. Dengan alasan yang sama, jalur pinjaman bank pada periode sebelum krisis kurang efektif dalam mentransmisikan kebijakan moneter pada sektor riil. Demikian pula, jalur nilai tukar tidak begitu kuat perannya mengingat pada periode sebelum krisis Indonesia menganut sistem nilai tukar

mengambang terkendali. Dalam kondisi ini, pergerakan nilai tukar tidak cukup signifikan mempengaruhi perkembangan *output rill* dan harga.

Pada periode setelah krisis, berbagai perubahan yang terjadi dalam perekonomian dan peralihan sistem nilai tukar dari sistem mengambang terkendali menjadi sistem mengambang/fleksibel mempunyai *impact* terhadap mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Dalam kondisi ini, jalur nilai tukar menjadi salah satu jalur penting dalam mentransmisikan pengaruh kebijakan moneter pada kegiatan ekonomi riil dan harga. Demikian pula halnya jalur ekspektasi yang terlihat memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mempengaruhi perkembangan harga (inflasi). Akan tetapi perilaku, perilaku ekspektasi inflasi lebih banyak dipengaruhi secara kuat oleh pergerakan nilai tukar dan perkembangan harga dimasa lalu. Jalur suku bunga masih bekerja dengan baik, tetapi perilakunya sangat tergantung pada kondisi perbankan secara agregat dan tingginya derajat ketidakpastian ekonomi.

5.6 Kerangka Operasional Kebijakan Moneter

Dengan pengendalian uang primer (M_0) sebagai sasaran operasional, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat (M_1 dan M_2) dapat dipengaruhi agar selaras dengan sasaran akhir kebijakan moneter berupa inflasi yang rendah dan terkendali. Di samping merupakan kesepakatan antara pemerintah dan *International Monetary of Fund* (IMF) dalam *Letter of Intent* (LOI), penggunaan sasaran operasional uang primer tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dalam kondisi ekonomi dan keuangan yang sedang mengalami berbagai perubahan struktural seperti Indonesia, otoritas moneter perlu menggunakan salah satu indikator yang paling dapat dikendalikan, yaitu uang primer. Kedua, meskipun masih terdapat ketidakpastian mengenai jalur mana yang paling kuat dalam mentransmisikan kebijakan moneter di Indonesia, perkembangan uang primer masih memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan jumlah uang beredar, pertumbuhan ekonomi maupun inflasi.

Instrumen Moneter utama yang dipergunakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi sasaran operasional tersebut adalah Operasi pasar Terbuka (OPT), di samping instrumen lainnya seperti Fasilitas Diskonto, Giro Wajib Minimum (GWM) maupun himbauan moral. Instrumen OPT dilakukan melalui lelang surat-surat berharga, yang ditujukan untuk menambah atau mengurangi likuiditas dipasar uang untuk mencapai sasaran operasional uang primer yang ditetapkan. Sementara itu, fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada bank-bank dengan tingkat diskonto yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Giro Wajib

Minimum merupakan jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam rekening gironya di Bank Indonesia. Selanjutnya himbauan moral digunakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan agar semua bank dapat mengikuti langkah kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, proses operasional pengendalian moneter diawali dengan penyusunan program moneter dengan menetapkan sasaran uang primer yang disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas perekonomian yang diperkirakan berdasarkan proyeksi inflasi, pertumbuhan ekonomi dan variabel lainnya. Dengan demikian, OPT yang dilakukan dengan lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) secara mingguan diarahkan untuk mencapai sasaran uang primer yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perkembangan suku bunga juga dipertimbangkan dalam operasi moneter yang dimaksud. Perubahan suku bunga yang terlalu tinggi dan berfluktuasi perlu dihindari agar tidak membawa implikasi negatif terhadap kondisi keuangan.

5.7 Operasi Kebijakan Otoritas Moneter

Untuk mewujudkan final target dari pada kebijakan moneter yakni pengendalian harga, maka otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia mengimplementasikan operasi kebijakan moneter melalui pendekatan suku bunga. Suku bunga kebijakan yang dikenal dengan istilah *BI rate* diputuskan melalui Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam tataran operasional, *BI rate* terfleksi akan mempengaruhi mobilitas suku bunga pasar uang antar bank (Natsir, 2014).

Pasar uang antar bank adalah aktifitas kegiatan simpan pinjam dana antar satu bank dengan bank lainnya. Suku bunga pasar uang antar bank merupakan harga yang terbentuk dari kesepakatan pihak yang meminjam dan meminjamkan dana. Aktifitas pasar uang antar bank diimplementasikan melalui mekanisme *over the counter* yakni dengan terciptanya *aggrement* antara peminjam dengan pemilik dana yang dilakukan tidak melalui lantai bursa.

Agar mobilitas suku bungan pasar uang antar bank tidak melebar dari jangkar nominal yaitu suku bunga acuan *BI rate*, maka Bank Indonesia selalu berupaya untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara *balannce* sehingga terbentuk suku bunga yang stabil. Kebutuhan likuiditas perbankan diestimasi dengan mempertimbangkan faktor – faktor *autonomous* seperti operasi pemerintah, jatuh temponya instrumen operasi pasar terbuka dan *standing facilities* serta mutasi dari uang kartal, karena faktor – faktor tersebut dampak memberi impact factor terhadap likuiditas pasar uang.

BAB VI

PENENTU PERMINTAAN UANG : ELABORASI KONSEP HINDU

6.1 Pendahuluan

Berawal dari teori Klasik yang menyatakan jumlah permintaan uang sama dengan jumlah penawaran uang dan diteruskan oleh Marshal - Pigou, Keynes dan Friedman. Dengan asumsi ini maka jumlah uang yang diminta oleh masyarakat sama dengan jumlah uang yang ditawarkan oleh Bank sentral sebagai otoritas moneter yang mengatur tentang peredaran jumlah uang. Jumlah uang beredar atau *Money Supply* sebagai salah satu indikator pelaksanaan kebijakan moneter di samping tingkat bunga, uang dipantau peredarannya setiap saat sesuai dengan kondisi perekonomian negara. Perkembangan jumlah uang beredar yang diatur peredarannya terkait dengan pelaksanaan kebijakan moneter cenderung terus mengalami peningkatan dan mengalami fluktuasi. Jumlah uang beredar dapat dibedakan menjadi dua yaitu uang dalam arti sempit dan uang dalam arti luas.

6.2 Gambaran Umum Pendapatan Nasional, Inflasi, Tingkat Suku Bunga Deposito Kurs Dollar Amerika Serikat serta Krisis Moneter

Gross National Product (GNP) adalah nilai dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi domestik dalam negeri dalam suatu periode tertentu. GNP adalah sama dengan pendapatan total yang dihasilkan dalam suatu perekonomian, dan juga sama dengan pengeluaran total (Dornbush, 1997). Dengan menggunakan perhitungan pendapatan nasional (GNP) yang diukur sesuai dengan harga konstan, terlihat bahwa Pendapatan Nasional Bruto (PNB/GNP) yang dihasilkan Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Perkembangan pendapatan nasional secara umum terus mengalami peningkatan dengan fluktuasi yang terjadi.

Inflasi merupakan fenomena moneter yang terjadi pada setiap negara yang ditandai dengan naiknya harga-harga secara umum dan menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan nilai mata uang rendah

sehingga masyarakat enggan untuk memegang uang tunai dan lebih memilih untuk menggunakan sistem non tunai atau menggunakan alat pembayaran yang lain yang sifatnya lebih efisien. Untuk tahun-tahun belakangan ini tingkat inflasi sudah mulai terkendali karena Bank Indonesia berperan sangat penting dalam mengendalikan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter dengan tujuan kestabilan harga dan salah satunya dengan menjadikan tingkat inflasi menjadi target (*Inflation Targeting*). Turunnya optimisme pada sisi konsumen disebabkan oleh terus melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga-harga dan semakin terbatasnya kemampuan sumber-sumber pembiayaan konsumsi. Daya beli yang melemah ini, dibarengi oleh kondisi keuangan yang belum membaik, selanjutnya telah menyebabkan masyarakat menggunakan sumber-sumber pembiayaan lain seperti kartu kredit dan *leasing*. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya penggunaan kartu kredit sejak tahun 2001 lalu. Namun demikian, melambatnya pertumbuhan konsumsi selama beberapa tahun ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumber pembiayaan ini pun telah semakin mencapai batasnya (*exhausted*), mengingat kemampuan masyarakat untuk berhutang pun tidak tak terbatas (Bank Indonesia, 2002).

Dalam studi ini tingkat bunga deposito adalah tingkat bunga deposito pada bank-bank pemerintah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam statistik ekonomi keuangan Indonesia. Sebelum adanya kebijaksanaan deregulasi perbankan Juni 1983, tingkat bunga deposito ditetapkan secara langsung oleh pemerintah. Setelah melewati tahun 1983, dengan adanya deregulasi perbankan, di mana bank-bank dapat kebebasan menentukan tingkat bunga (perubahan dari sistem pengendalian uang beredar secara langsung menjadi tidak langsung), maka tingkat bunga untuk tahun-tahun sesudahnya baru mengalami fluktuasi. Perkembangan tingkat bunga deposito di Indonesia mengalami perkembangan sebesar minus 0,50 persen setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 1998 sebesar 4,93 persen karena dipengaruhi oleh krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dan tidak stabilnya kondisi dunia perbankan sehingga menyebabkan tingkat suku bunga meningkat. Penurunan sebesar 10,65 persen terjadi pada tahun 2000 yang disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian di samping membaiknya kondisi sosial politik di Indonesia. Bisa di duga, enggannya penurunan tingkat bunga deposito karena takut deposito akan berkurang dan modal dilarikan ke luar negeri. Padahal, telah menunjukkan inelastisnya deposito terhadap suku bunga. Walaupun suku bunga deposito dikenakan pajak 15 persen dengan berlakunya Paket Oktober (Pakto) 1988, jumlahnya sama sekali tidak terpengaruh. Kekakuan membuat suku bunga riil deposito dan kredit di Indonesia tertinggi di Asia, barangkali bahkan di seluruh dunia.

Tingkat bunga deposito yang tinggi umumnya akan menarik investor, terutama investor asing. Namun, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya, investor asing ketakutan karena menganggap deposito di Indonesia terlalu berisiko.

Dalam transaksi perdagangan antar negara baik ekspor maupun impor, akan memerlukan valuta asing dalam proses pertukarannya. Agar kegiatan perdagangan dapat berjalan dengan mantap diperlukan adanya kestabilan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing (kurs valuta asing). Perkembangan pasar uang di Indonesia semenjak krisis diwarnai dengan perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dollar Amerika yang selalu berfluktuasi dan cenderung merosot. Hal ini sebagai dampak dari krisis moneter yang melanda negara ASEAN dan Asia lainnya serta kondisi sosial politik negara Indonesia yang tak kunjung membaik. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan keamanan negara bersangkutan, terutama berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Dalam kondisi yang tidak mengembirakan tersebut pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan nilai tukar rupiah agar berada pada tingkat yang wajar yaitu melalui serangkaian kebijaksanaan. Diantaranya kebijaksanaan nilai tukar mengambang bebas sejak Agustus 1997, dimana nilai tukar rupiah terhadap valuta asing terutama dollar Amerika sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Dengan demikian pemerintah dapat lebih fleksibel dalam mengantisipasi fluktuasi rupiah di pasar uang.

Salah satu penyebab krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah proses integrasi perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global yang berlangsung cepat. Faktor lain yang juga berperan menciptakan krisis tersebut adalah kelemahan fundamental mikroekonomi yang tercermin dari kerentanan (*fragility*) sektor keuangan nasional, khususnya perbankan. Salah satu krisis keuangan tersebut adalah gejolak nilai tukar yang telah menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi yang sangat parah. Pada kuartal pertama tahun 1998, kegiatan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 12 persen per tahun sebagai akibat banyaknya perusahaan yang mengurangi aktivitas atau bahkan menghentikan produksinya. Laju inflasi juga melambung tinggi, yakni 69,1 persen dalam periode Januari-Agustus 1998 lalu. Tingginya laju inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat (Syahril, 2003). Krisis ekonomi di Indonesia tergolong paling parah jika dibandingkan dengan krisis serupa yang pernah terjadi di beberapa negara selama ini. Pecahnya gelombang krisis pada tahun 1997 tidak saja memporak-porandakan industri perbankan nasional tetapi juga menyeret perekonomian ke dalam pertumbuhan ekonomi yang begitu lambat. Tidak sedikit bank-bank yang sakit secara finansial tumbang dalam

hempasan badai krisis tersebut, krisis moneter setidaknya berdampak langsung terhadap permintaan uang. Dalam tabel 6.1 menjelaskan tentang hasil estimasi olahan data atas penentu permintaan uang di Indonesia.

Tabel 6.1
Hasil Regresi *Partial Adjustment Model Analysis*
Variabel Permintaan Uang (M_2) dengan masing-masing Variabel Bebas

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Signifikansi
GNP	0.001288	0.0093
Inflasi	1307.610	0.0274
Suku Bunga Deposito	-720.7651	0.0811
Kurs	6.401798	0.0445
<i>Dummy</i>	10896.86	0.0393
M_2_{t-1}	0.984659	0.0000
R^2	0.998089	
Konstanta	20014.72	
F-Hitung	9403.256	
Signifikansi	0.00000	

Sumber: Krisna, 2019

6.3 Pengaruh Pendapatan Nasional, Inflasi, Tingkat Suku Bunga Deposito, Kurs Dollar Amerika Serikat dan Krisis Moneter terhadap Permintaan Uang (M_2) di Indonesia Tahun 1990-2018 dalam Jangka Pendek

Pendapatan nasional (GNP), inflasi, tingkat bunga deposito, kurs dollar Amerika Serikat dan krisis moneter secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang (M_2) di Indonesia tahun 1990-2018. Hasil uji statistik menunjukkan signifikan pada taraf nyata sebesar 5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pendapatan nasional merupakan jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2001). Tolak ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan sebuah perekonomian salah satunya adalah pendapatan nasional. Soediyono (1992) mengatakan dengan melihat tingkat pendapatan nasional suatu negara maka dapat diukur pula pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Pendapatan nasional dapat diwakili oleh angka-angka GNP ataupun GDP. Saat GNP meningkat, maka peningkatan tersebut akan cepat direspon dengan meningkatkan permintaan uang, hal ini telah sesuai dengan teori Klasik dan

Keynes yang menyatakan bahwa hubungan antara permintaan uang dan pendapatan adalah positif atau searah. Semakin tinggi pendapatan nasional semakin besar volume transaksi dan semakin besar pula kebutuhan uang untuk memenuhi tujuan transaksi, spekulasi maupun untuk berjaga-jaga. Peningkatan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi memberikan indikasi membaiknya perekonomian suatu negara.

Inflasi merupakan fenomena moneter. Pandangan bahwa inflasi merupakan fenomena moneter adalah implikasi dari teori kuantitas uang yang merupakan tulang punggung makroekonomi aliran monetaris (Dornbusch & Fisher, 1997). Dornbusch menyatakan pada perekonomian Amerika Serikat Tahun 1960-1985, kecenderungan umum dari laju pertumbuhan uang beredar memang mempengaruhi inflasi, tetapi efeknya terjadi dengan tenggang waktu yang tidak begitu persis. Dalam jangka pendek, inflasi bukan hanya dipengaruhi oleh gejolak moneter, tetapi dipengaruhi juga antara lain oleh perubahan fiskal dan gejolak di sisi penawaran. Bahwa inflasi yang mencerminkan ekspektasi terhadap kenaikan harga-harga relatif barang dan jasa di masa mendatang akan menyebabkan kenaikan pada pola permintaan uang. Dengan adanya peningkatan harga tersebut maka masyarakat akan berusaha meningkatkan pola permintaan uangnya. Wiwin (2006) menambahkan bahwa kenaikan harga akan mendorong konsumsi lebih awal sebelum harga naik yang artinya terdapat penambahan permintaan uang sebagai akibat meningkatnya harga-harga dalam masyarakat.

Samuelson (1992), mengatakan jumlah uang beredar (yang besarnya sama dengan permintaan uang) bersama-sama ditentukan oleh Bank Sentral atau Pemerintah. Bila Bank Sentral mengkhawatirkan terjadinya resesi, maka kemungkinan suku bunga yang berlaku akan diturunkan. Rendahnya suku bunga akan mengakibatkan pengeluaran dari komponen permintaan agregatif yang sensitif terhadap tingkat bunga uang. Turunnya tingkat bunga deposito menyebabkan peningkatan investasi dunia usaha maupun investasi asing netto, karena masyarakat cenderung berinvestasi dari pada menabung, akibatnya permintaan uang untuk kebutuhan investasi tersebut akan semakin meningkat. Jadi tingkat suku bunga memiliki hubungan yang negatif terhadap permintaan uang dalam masyarakat.

Studi ini menganalisis permintaan uang dalam arti luas (M_2) di Indonesia dalam ruang lingkup ekonomi terbuka, dalam model permintaan uang ekonomi terbuka dimasukkan variabel mata uang asing yakni kurs dollar Amerika Serikat. Apabila terjadi depresiasi di suatu negara maka permintaan uang domestik akan meningkat, karena depresiasi akan meningkatkan nilai dari sekuritas luar negeri yang dipegang oleh

warganegara domestik sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibatnya permintaan uang akan meningkat. Ekspektasi masyarakat akan terjadinya apresiasi setelah mata uang domestik terdepresiasi juga akan menyebabkan peningkatan pada permintaan uang domestik.

Krisis ekonomi di Indonesia tergolong paling parah jika dibandingkan dengan krisis serupa yang pernah terjadi di beberapa negara selama ini. Pecahnya gelombang krisis pada tahun 1997 tidak saja memporak-porandakan industri perbankan nasional tetapi juga menyeret perekonomian ke dalam pertumbuhan ekonomi yang begitu lambat. Tidak sedikit bank-bank yang sakit secara finansial tumbang dalam hempasan badai krisis tersebut, krisis moneter setidaknya berdampak langsung terhadap permintaan uang. Naik-turunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diikuti oleh naik-turunnya suku bunga deposito dan kredit perbankan yang pada gilirannya berdampak pada volume dana dan kredit yang diberikan. Kebijakan suku bunga nampaknya menjadi pilihan penting bagi pemerintah dalam upaya mengendalikan gejolak moneter. Pada saat krisis terjadinya peningkatan jumlah uang yang cukup pesat, peningkatan keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai disebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang ada dengan terjadinya *rush* (pengambilan uang besar-besaran secara serentak oleh masyarakat) diberbagai bank diseluruh Indonesia, sedangkan kenaikan M_2 terjadi karena peningkatan uang kuasi yang terdiri dari simpanan rupiah dan simpanan valuta asing (Darmansyah, 2005).

Kestabilan nilai mata uang, baik dalam artian inflasi maupun nilai tukar, sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Nilai uang yang stabil dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan kegiatan perekonomian, baik konsumsi maupun investasi sehingga perekonomian nasional dapat bergairah. Lebih dari itu, inflasi yang terkendali dan rendah dapat mendukung terpeliharanya daya beli masyarakat, khususnya yang berpendapatan tetap seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat kecil. Bagi golongan masyarakat ini, yang umumnya mencakup sebagian besar penduduk, harga-harga yang terus membumbung menyebabkan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan dasar akan semakin rendah. Demikian pula inflasi dan nilai tukar yang tidak stabil akan mempersulit dunia usaha dalam perencanaan kegiatan bisnis, baik dalam kegiatan produksi dan investasi maupun dalam penentuan harga barang dan jasa yang diproduksinya. Pengalaman Indonesia dengan terjadinya krisis nilai tukar sejak tahun 1997

menunjukkan betapa penting mencapai dan menjaga laju inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil tersebut (Kurniawan, 2007).

6.4 Pengaruh Pendapatan Nasional (GNP) terhadap Permintaan Uang (M_2) di Indonesia Tahun 1990-2018

Nilai estimasi koefisien pendapatan nasional (GNP) $\hat{\beta}_1 = 0.0012$ memiliki arti bahwa jika pendapatan nasional (GNP) mengalami peningkatan sebesar satu milyar Rupiah, maka permintaan uang (M_2) di Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 0.0012 milyar Rupiah dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan nasional (GNP) mengalami penurunan sebesar satu milyar Rupiah, maka permintaan uang (M_2) di Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 0.0012 milyar dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan.

Hasil yang diperoleh dalam studi ini mengenai pengaruh pendapatan nasional (GNP) terhadap permintaan uang (M_2) di Indonesia telah sesuai dengan teori yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendapatan nasional (GNP) terhadap permintaan uang (M_2) di Indonesia. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitri Astuti dan Menuk Listya Ningsih (2005) yang menyatakan bahwa saat GNP meningkat, maka peningkatan tersebut akan cepat direspon dengan meningkatkan permintaan uang, hal ini telah sesuai dengan teori Klasik dan Keynes yang menyatakan bahwa hubungan antara permintaan uang dan pendapatan adalah positif atau searah. Semakin tinggi pendapatan nasional semakin besar volume transaksi dan semakin besar pula kebutuhan uang untuk memenuhi tujuan transaksi, spekulasi maupun untuk berjaga-jaga. Peningkatan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi memberikan indikasi membaiknya perekonomian suatu negara. Dalam Sukirno (2003) disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat akan meningkat.

Kemakmuran masyarakat yang meningkat tentunya seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Bila pendapatan masyarakat meningkat maka permintaan terhadap uang juga akan meningkat (Lisnawati, 2009). Jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan pendapatan nasional (masyarakat) nantinya akan mempengaruhi peningkatan permintaan uang secara umum.

6.5 Pengaruh Inflasi terhadap Permintaan Uang (M_2) di Indonesia Tahun 1990-2018

Nilai estimasi koefisien inflasi $\hat{\beta}_2 = 1307.61$ memiliki arti bahwa jika inflasi mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka permintaan uang (M_2) di Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 1307.61 persen dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan. Begitu pula sebaliknya, jika inflasi mengalami penurunan sebesar satu persen, maka permintaan uang (M_2) di Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 1307.61 persen dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang (M_2). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Harmanta dan Ekananda (2005) yang menjelaskan bahwa inflasi yang mencerminkan ekspektasi terhadap kenaikan harga-harga relatif barang dan jasa di masa mendatang akan menyebabkan kenaikan pada pola permintaan uang. Dengan adanya peningkatan harga tersebut maka masyarakat akan berusaha meningkatkan pola permintaan uangnya. Wiwin (2006) menambahkan bahwa kenaikan harga akan mendorong konsumsi lebih awal sebelum harga naik yang artinya terdapat penambahan permintaan uang sebagai akibat meningkatnya harga-harga dalam masyarakat.

Dornbusch dan Fisher (1997) mengatakan inflasi merupakan keadaan dimana barang cenderung meningkat sepanjang waktu dan terjadi secara terus menerus. Jika tingkat harga-harga mengalami kenaikan, masyarakat harus membayar lebih banyak untuk mendapatkan berbagai barang dan jasa yang mereka inginkan. Dengan naiknya tingkat harga berarti menyebabkan menurunnya nilai uang karena setiap rupiah yang dimiliki oleh masyarakat sekarang hanya dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit daripada sebelumnya. Jadi hubungan inflasi dengan permintaan uang adalah positif, semakin tinggi tingkat harga barang atau jasa tentunya akan semakin banyak permintaan uang yang diperlukan, demikian pula sebaliknya semakin rendah tingkat inflasi maka permintaan uang akan semakin menurun.

6.6 Tingkat Suku Bunga Deposito tidak berpengaruh terhadap permintaan uang (M_2) di Indonesia tahun 1990-2018

Nilai estimasi koefisien tingkat suku bunga deposito $\hat{\beta}_3 = -720.76$ memiliki arti bahwa jika tingkat suku bunga deposito mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka permintaan uang (M_2) di Indonesia

akan mengalami penurunan sebesar 720.76 persen dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan.

Hasil yang diperoleh dalam studi penelitian ini mengenai pengaruh tingkat bunga deposito terhadap permintaan uang (M_2) di Indonesia tidak sesuai dengan teori yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara tingkat suku bunga deposito terhadap permintaan uang (M_2) di Indonesia. Namun dalam uji statistik menunjukkan variabel tingkat suku bunga deposito tidak signifikan pada taraf nyata 5 persen. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Novariana (2008) dan penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh Valadkhani periode 2015. Hal ini dikarenakan setiap harinya masyarakat Indonesia selalu membutuhkan uang baik digunakan untuk transaksi maupun berjaga-jaga yang sifatnya sangat mendesak sehingga tidak memikirkan tingkat bunga yang sedang berlaku pada bank-bank terutama bank pemerintah. Di samping itu, masyarakat Indonesia yang golongan menengah kebawah yang tingkat konsumsinya melebihi dari pendapatan, secara otomatis kegiatan untuk menabung tidak ada, maka setinggi apapun tingkat suku bunga deposito masyarakat tidak akan berminat untuk mendepositokan uangnya. Dalam hal ini hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi, dimana tingkat pendapatan lebih besar dari konsumsi yang akan meningkatkan tabungannya pada saat tingkat suku bunga deposito meningkat.

Kebijakan moneter melalui perubahan tingkat suku bunga deposito tidak serta merta langsung di respon oleh perubahan persentase *money demand*, pengaruh tersebut bernilai kecil dalam menjelaskan variasi perubahan pola permintaan uang. Keadaan ini memberi kesimpulan bahwa tingkat suku bunga deposito kurang efektif dalam mempengaruhi pola *money demand* masyarakat Indonesia yang notabnya sebagian besar berpendapatan menengah kebawah, yang tentu akan lebih memprioritaskan penggunaan uangnya untuk hal-hal yang lebih penting seperti pemenuhan kebutuhan hidupnya dari pada mendepositokan uangnya di bank (Warjiwo, 2009).

6.7 Pengaruh Kurs Dollar Amerika Serikat terhadap Permintaan Uang (M_2) di Indonesia Tahun 1990-2018

Nilai estimasi koefisien kurs dollar Amerika Serikat $\hat{\beta}_4 = 6.4017$ memiliki arti bahwa jika kurs dollar Amerika Serikat mengalami peningkatan sebesar satu US/Rupiah, maka permintaan uang (M_2) di Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 6.4017 US/Rupiah dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan. Begitu pula sebaliknya,

jika kurs dollar Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar satu US/Rupiah, maka permintaan uang (M_2) di Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 6.4017 US/Rupiah dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan.

Hasil yang diperoleh dalam studi ini mengenai pengaruh kurs dollar Amerika Serikat terhadap permintaan uang (M_2) di Indonesia telah sesuai dengan teori yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kurs dollar Amerika Serikat terhadap permintaan uang (M_2) di Indonesia. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitri Astuti dan Menuk Listya Ningsih (2005). Koefisien variabel kurs bertanda positif yang berarti jika terjadi depresiasi dalam nilai tukar nominal maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan pada permintaan di Indonesia. Dengan kata lain jika nilai tukar riil terdepresiasi sebesar 1 USD/Rp *ceteris paribus*, akan menyebabkan peningkatan pada permintaan uang sebesar 6.4017 USD/Rp dan jika di lihat dari sisi elastisitasnya variabel perubahan nilai tukar ini bersifat inelastis karena peningkatan pada permintaan uang lebih kecil dari satu yang berarti bahwa pada saat nilai tukar riil terdepresiasi, peningkatan permintaan uang di Indonesia tidak terlalu responsif mencapai tidak lebih dari 1 persen. Selain itu hasil estimasi studi penelitian ini juga dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Mosen-Oksooe dan Hyun-Jae Rhee (2007), yaitu apabila terjadi depresiasi di suatu negara maka permintaan uang domestik akan meningkat, karena depresiasi akan meningkatkan nilai dari sekuritas luar negeri yang dipegang oleh warganegara domestik sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibatnya permintaan uang akan meningkat. Ekspektasi masyarakat akan terjadinya apresiasi setelah mata uang domestik terdepresiasi juga akan menyebabkan peningkatan pada permintaan uang domestik.

6.8 Pengaruh Krisis Moneter (*dummy*) terhadap Permintaan Uang (M_2) di Indonesia Tahun 1990-2018

Nilai estimasi koefisien regresi krisis moneter diperoleh sebesar 10896.86 memiliki arti bahwa permintaan uang (M_2) di Indonesia dalam jangka pendek sesudah krisis moneter lebih besar 10896.86 milyar Rupiah bila dibandingkan dengan periode sebelum krisis moneter dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan. uji statistik menunjukkan bahwa secara parsial krisis moneter mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang (M_2) pada taraf nyata 5 persen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai pengaruh krisis moneter terhadap Permintaan uang (M_2) di Indonesia telah sesuai dengan teori

menyatakan bahwa hubungan yang terjadi adalah hubungan yang positif. Pada saat krisis terjadinya peningkatan jumlah uang yang cukup pesat, peningkatan keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai disebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang ada dengan terjadinya *rush* (pengambilan uang besar-besaran secara serentak oleh masyarakat) diberbagai bank diseluruh Indonesia, sedangkan kenaikan M_2 terjadi karena peningkatan uang kuasi yang terdiri dari simpanan rupiah dan simpanan valuta asing (Darmansyah, 2005). Salah satu penyebab krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah proses integrasi perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global yang berlangsung cepat. Faktor lain yang juga berperan menciptakan krisis tersebut adalah kelemahan fundamental mikro ekonomi yang tercermin dari kerentanan (*fragility*) sektor keuangan nasional, khususnya perbankan.

Salah satu krisis keuangan tersebut adalah gejolak nilai tukar yang telah menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi yang sangat parah. Pada kuartal pertama tahun 1998, kegiatan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 12 persen per tahun sebagai akibat banyaknya perusahaan yang mengurangi aktivitas atau bahkan menghentikan produksinya. Laju inflasi juga melambung tinggi, yakni 69,1 persen dalam periode Januari-Agustus 1998 lalu. Tingginya laju inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat (Syahril, 2003).

6.9 Pengaruh Permintaan Uang periode sebelumnya terhadap Permintaan Uang di Indonesia Tahun 1990 – 2018

Nilai estimasi koefisien permintaan uang tahun sebelumnya = 0,98646 memiliki arti bahwa jika permintaan uang tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 1 milyar Rupiah, maka permintaan uang di Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 0,98646 Milyar Rupiah dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan. Begitu pula sebaliknya, jika permintaan uang tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 1 Milyar Rupiah, maka permintaan uang di Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 0,98646 Milyar Rupiah dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa secara parsial permintaan uang tahun sebelumnya mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia pada taraf nyata 5 persen. Nilai koefisien yang diperoleh positif sebesar 0.984659 menunjukkan bahwa spesifikasi model tersebut adalah sah atau valid.

Justifikasi yang dapat memperkuat pengaruh korelasi antara permintaan uang periode sebelumnya terhadap permintaan uang saat ini terkait pula dengan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan (uang yang diterima atau diminta) oleh seseorang maka semakin besar kebutuhan akan uang yang diminta untuk membiayai transaksi hal ini secara tidak langsung mendukung teori permintaan uang yang diungkapkan oleh J.M Keynes. Individu yang tingkat pendapatannya tinggi mempunyai pengeluaran yang lebih banyak bila dibandingkan yang berpendapatan rendah dan individu memerlukan uang guna memenuhi dan melancarkan aktifitas- aktifitas yang mereka lakukan (Krisna, 2018). Kebutuhan tersebut akan berlangsung secara kontinyu, sedangkan *income revenue* terjadi secara berkala misalnya dalam mingguan ataupun bulanan. Adanya *time lag* antara *revenue* dan *expenditure* merupakan dasar *expectation* maupun pertimbangan bagi individu untuk meminta atau memegang uang di setiap saat. Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhannya seseorang perlu untuk berusaha meningkatkan pendapatannya dan bercermin dari pendapatan yang diterimanya pada periode sebelumnya.

Temuan dari studi penelitian ini juga memperkuat apa yang pernah diutarakan oleh Milton Friedman seorang ekonom yang terkenal sebagai pelopor pembaharuan teori kuantitas (klasik) bahwasanya individu bersedia memegang uang karena uang seperti halnya aktiva lainnya merupakan salah satu wujud kepemilikan kekayaan dan memberi jasa kepada mereka yang ingin memiliki kekayaan tersebut karena sumber daya beli yang *liquid*. Manfaat dari setiap bentuk aktifa merupakan faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik kekayaan dalam mengambil keputusan mengenai besarnya masing – masing aktifa yang dipegang atas dasar pengalaman sebelumnya.

Seperti halnya dalam konsep ajaran Agama Hindu tentang *time lag* (waktu) yakni *Tri Samaya* yang terdiri atas *atita* (masa lalu), *wartamana* (masa kini) dan *anagatha* (masa depan). Ketiga konsep ini sekiranya dapat digunakan sebagai basis maupun pijakan perencanaan akan memegang uang bagi individu dalam sebuah rangkaian episode awal sosial dalam menjalankan aktifitas sebagai pelaku ekonomi dalam sebuah sistem perekonomian. Artinya perencanaan terhadap kebutuhan akan memegang uang haruslah didasari pada waktu serta upaya – upaya yang perlu dilakukan secara rasional dan terukur terhadap tingkat pencapaiannya. Maka dari itu, diperlukan pertimbangan masa lalu, kondisi saat ini dan segala *expectations* yang dapat diprediksi pada masa depan. Bersama dengan konsep ini, analisis SWOT dapat digunakan untuk mematangkan sebuah perencanaan (Dewi, Muji, *et al*, 2017).

Atita atau masa lalu menjadi sangat *urgent* untuk dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan terhadap hasrat individu dalam memegang uang saat ini. Hal ini dibuktikan dalam temuan penelitian ini bahwasannya koefisien regresi variabel permintaan uang periode sebelumnya sebesar positif 0,98646, yang memiliki arti bila permintaan uang tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 1 milyar Rupiah, maka permintaan uang di Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 0,98646 Milyar Rupiah dengan asumsi variabel bebas yang lainnya adalah konstan. Atau dengan kata lain permintaan uang periode saat ini (periode analisis) dipengaruhi juga oleh permintaan uang periode sebelumnya, yang mana masa kini (*Wartamana*) adalah realitas yang dimiliki oleh individu atau masyarakat saat perencanaan akan membutuhkan atau meminta uang di susun. Kondisi saat ini adalah akumulasi dari equitas yang dikumpulkan berdasarkan pengalaman masa lalu. Individu yang mampu membaca realitas dengan baik maka akan mampu menemukan *oppourtunity* untuk membangun eksistensi dan mengembangkan dirinya menjadi lebih baik mencapai *wealfeare* yang tentunya harus didasari pada konsep *Catur Purusa Artha* sebagai pandangan hidup dalam melakukan segala aktifitas hidup termasuk dalam hal menjalankan aktifitas ekonomi yang terdiri dari 4 bagian yakni : *Dharma, Artha, Kama dan Moksa*. Konsep *Dharma* merupakan ajaran kebenaran, sebagai pandangan hidup maupun tuntunan hidup manusia sebagai pelaku ekonomi. *Artha* yakni berupa materi sebagai penopang kehidupan, *Kama* merupakan keinginan dan *Moksa* yaitu bersatunya *jiwatman* dengan *paramaatman*, jadi dapat disimpulkan tujuan hidup manusia selalu memerlukan *Artha, Kama, Moksa* (Suardana, 2016). Konsep yang ketiga dari Tri Samaya yaitu *Wartamana* yang juga sangat menentukan *planning*, karena *planning* disusun saat ini yang dapat digunakan untuk membaca segala peluang, memprediksi hambatan yang akan muncul sekaligus menentukan rencana – rencana untuk mengatasi segala hambatan.

6.10 Hasil Estimasi Pendapatan Nasional, Inflasi, Tingkat Bunga Deposito, Kurs Dollar Amerika Serikat dan Krisis Moneter terhadap Permintaan Uang (M₂) di Indonesia tahun 1990-2018 dalam Jangka Panjang

Untuk koefisien konstanta dan koefisien regresi jangka panjang, maka konstanta dan koefisien regresi jangka pendek di bagi dengan δ . Dimana $\delta = (1 - 0.984659) = 0.015341$, sehingga dapat disusun pelaporan hasil regresi sebagai berikut:

$$Y_t = 1304654.19 + 0.0012 X_1 + 85236.29 X_2 + 46982.59 X_3 + 417.29 X_4$$

$\delta = 0.015341$ adalah *coefficient adjustment* yaitu koefisien yang membuat permintaan uang natural sama dengan permintaan uang yang diperkirakan, dalam hal ini diperlukan waktu penyesuaian sebesar $0.015341 \times 12 \text{ bulan} = 0.18 \text{ bulan} = 5.58$ atau 6 hari. Waktu penyesuaian yang relatif singkat ini disebabkan oleh ekspektasi masyarakat bila seandainya di masa depan diharapkan akan ada kenaikan tingkat bunga (yang berarti penurunan harga surat berharga) dengan asumsi kondisi perekonomian yang stabil maka individu akan cenderung untuk mengurangi jumlah surat berharga yang dipegangnya serta menambah frekuensi memegang uang (tunai) hal ini selaras dengan Teori Cambridge yang dikemukakan oleh Marshall - Pigou. Dengan kondisi kinerja indikator makro ekonomi yang cukup baik pada semua sektor di Indonesia tidaklah mengherankan jika waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian dari jangka pendek ke jangka panjang menjadi relatif singkat.

Permintaan uang periode sebelumnya akan memberi *multiplier effect* terhadap permintaan uang saat ini (periode analisis), permintaan uang pada tahun sebelumnya tidak serta merta membawa *impact* pada tahun bersangkutan akan tetapi memerlukan waktu untuk kembali diminta (beredar) pada tahun yang akan datang maupun dalam jangka panjang. Hal itu disebabkan oleh harapan masyarakat terhadap kondisi masa yang akan datang dalam membelanjakan uangnya. Harapan itu meliputi harapan tentang adanya kestabilan perekonomian seperti stabilnya tingkat pendapatan, inflasi, suku bunga maupun kestabilan faktor eksogen yang dicerminkan dengan kestabilan pergerakan nilai tukar (kurs).

Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi di peroleh dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro dan Smith, 2008).

Indikator kinerja makro ekonomi Indonesia dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4.10. Dimana dalam tiga tahun terakhir (2016-2018) laju pertumbuhan ekonomi berkisar pada level 5 persen dengan tingkat perkembangan rata-rata sebesar 5,1 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tersebut juga berkorelasi terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia yakni secara *average* terkoreksi di level 10.26 persen, hal ini menyiratkan bahwa bahwa bila laju ekonomi ditingkatkan maka akan mampu mengurangi penduduk miskin,

mengingat setiap 1 persen terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan mampu menyerap sekitar 250.000 tenaga kerja (Adi, 2011), hal tersebut cukup terbukti bila melihat data pada tabel 4.10 dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi disetiap tahunnya membuat angka pengangguran menurun dengan laju rata - rata sebesar 5.46 persen yang berimplikasi pada penurunan penduduk miskin.

Tabel 6.2 Capaian Indikator Makro Ekonomi Indonesia

Indikator	2016	2017	2018	2019*	2020**
• Produk Domestik Bruto (% perubahan tahunan)	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3
• Inflasi (% perubahan tahunan)	3.0	3.6	3.1	4.0	4.0
• Hutang Pemerintah (% dari PDB)	27.9	28.5	31.5	33.0	35.0
• Nilai Tukar (IDR/USD)	13,309	13,381	14,250	14,000	
• Neraca Transaksi Berjalan (% dari PDB)	-1.8	-1.7	-3.0	-2.5	
• Suku Bunga Acuan (%)	4.75	4.25	6.00	6.25	
• Penduduk (dalam juta)	261	264	267	270	275
• Kemiskinan (% dari populasi)	10.7	10.1	10.0	9.8	
• Pengangguran (% dari tenaga kerja)	5.6	5.5	5.3	5.2	
• Cadangan Devisa (dalam miliar USD)	116.4	130.2	117.2	120.1	

Sumber : Indonesia – *Investment*, 2019 (data diolah)

*Angka *update* per 7 Februari 2019,

** angka proyeksi

Indeks inflasi juga stabil pada kisaran 3.2 persen yang mana angka tersebut masih masuk dalam target sasaran inflasi di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas moneter yakni di level 3.5 persen plus -minus 1 persen. Cadangan devisa tertinggi dicapai pada tahun 2017 yakni sebesar 130.2 milyar miliar USD yang kemudian menurun sebesar 13 miliar USD atau sebesar 117.2 miliar USD hal ini disebabkan oleh karena

pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Dalam konsepsi ajaran Agama Hindu yakni *Tri Samaya* yaitu *anagatha* atau masa depan mencakup seluruh harapan maupun tujuan yang hendak dicapai oleh individu dalam hal memegang uang. Perencanaan yang baik senantiasa mengarah pada masa depan dengan mempertimbangkan masa masa kini (*wartamana*) dan modal uang yang terakumulasi pada masa lalu (*atita*). Dalam konteks ilmu ekonomi yang salah satu sifatnya adanya ramalan (Sukirno, 2012) adalah sangat penting untuk meramal dan membaca setiap peluang bisnis masa depan, hal ini juga sinkron bila dikorelasikan dengan makna terpenting dari *anagatha* itu sendiri.

Berpijak pada penjelasan diatas, konsep *Tri Samaya* dapatlah dijadikan suatu rujukan dalam aktifitas perekonomian khususnya dalam manajemen hindu yang terkait dengan memegang uang (peredaran jumlah uang yang beredar). Konsep ini menjelaskan pentingnya suatu perencanaan yang berlandaskan pada waktu. Sebuah kesatuan waktu yang tidak terpisahkan antara masa lalu (*atita*), masa sekarang (*wartamana*) dan masa depan (*anagatha*). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi perencanaan yang memang menentukan dentuman aktifitas kedepannya sehingga diperlukan suatu pertimbangan yang matang, rasional dan terukur sehingga tujuan dari ilmu ekonomi yakni *wealfeare in society* bagi pelaku ekonomi itu mampu diwujudkan.

Dalam konteks ajaran agama Hindu tujuan manusia dibalut dalam konsep *Catur Purusa Artha* yakni : *Dharma, Artha, Kama dan Moksa*. Konsep *Dharma* merupakan ajaran kebenaran, sebagai pedoman hidup maupun tuntunan hidup manusia sebagai pelaku ekonomi. *Artha* yakni berupa materi sebagai penopang kehidupan, *Kama* merupakan keinginan dan *Moksa* yaitu bersatunya *jiwatman* dengan *paramaatman*, jadi dapat disimpulkan tujuan hidup manusia selalu memerlukan *Artha, Kama, Moksa* (Suardana, 2016). Dalam Kitab *Sarasamuscaya*, ekonomi itu sendiri adalah *Artha*, yang tentunya telah diketahui menjadi bagian dalam *catur purusa artha* bersama *Dharma* sebagai dasar, *Kama* sebagai motivasi, dan *Moksa* sebagai tujuan Akhir.

Keberhasilan pembangunan nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi sebab pembangunan ekonomi merupakan faktor primer dalam menopang sekaligus menggerakkan pembangunan itu sendiri, sedangkan pembangunan ekonomi tersebut sangat ditentukan oleh

kestabilan dalam hal kondisi perekonomian (tidak krisis) mewujudkan kondisi perekonomian yang stabil pada hakekatnya harus ada sinkronisasi kebijakan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh otoritas moneter (Bank Indonesia).

Kebijakan moneter pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas jumlah peredaran uang dalam arti luas. Jumlah uang beredar dalam masyarakat sangat terkait dengan motif maupun hasrat individu dalam meinta atau memegang uang selain dipengaruhi pula oleh indikator – indikator makro ekonomi seperti tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar serta keadaan ekonomi. Indikator tersebut sesuai hasil temuan dalam penelitian menyatakan bahwa dalam jangka panjang memberi *impact* atau berpengaruh terhadap permintaan uang yang harus dijaga besarnya didalam menunjang aktifitas perekonomian sebagai salah satu pilar menyokong pembangunan perekonomian nasional.

BAB VII

INDIKATOR EKONOMI DAN UANG : *RESULT CASE STUDY*

7.1 Pendahuluan

Pengalaman menunjukkan bahwa peredaran uang diluar kendali dapat menimbulkan konsekuensi atau pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Konsekuensi atau pengaruh yang buruk dari kurang terkendalinya jumlah uang beredar tersebut antara lain dapat dilihat pada kurang terkendalinya perkembangan variabel-variabel ekonomi utama, yaitu tingkat produksi (*output*) dan harga.

Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar rendah maka kelesuan ekonomi akan terjadi. Apabila hal ini berlangsung terus menerus, kemakmuran masyarakat secara keseluruhan akan mengalami penurunan. Beberapa variabel makro ekonomi yang digunakan diantaranya Pendapatan Nasional, inflasi, tingkat suku bunga deposito, kurs dollar Amerika Serikat dan juga memasukan variabel krisis moneter sebagai parameter penentuan permintaan uang di Indonesia.

7.2 Indikator Makro Ekonomi dan Uang

Pendapatan nasional (GNP), inflasi, tingkat suku bunga deposito, kurs dollar Amerika Serikat dan krisis moneter secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang (M_2) di Indonesia Tahun 1990-2018 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Pendapatan nasional (GNP), inflasi dan kurs dollar Amerika Serikat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang (M_2), sedangkan tingkat suku bunga deposito secara parsial tidak berpengaruh terhadap permintaan uang (M_2) di Indonesia Tahun 1990-2018. Permintaan uang (M_2) di Indonesia sesudah krisis moneter lebih besar daripada periode atau tahun sebelum terjadinya krisis moneter, serta

nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,998 yang menunjukkan bahwa 99,8 persen variasi (naik turunnya) permintaan uang (M_2) di Indonesia dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variasi (naik turunnya) jumlah pendapatan nasional (GNP), inflasi, suku bunga deposito, kurs dollar Amerika Serikat serta krisis moneter sedangkan sisanya sebesar 0,2 persen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian, ini mengindikasikan bahwa dalam periode analisis ketepatan model mampu dijelaskan oleh variabel - variabel makro ekonomi.

7.3 Implikasi Indikator Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Uang

Bagi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, apabila Bank Indonesia mengambil kebijakan dalam hal mengatur jumlah peredaran uang di Indonesia untuk tahun-tahun mendatang, hendaknya variabel pendapatan, inflasi, tingkat bunga deposito, kurs dollar Amerika Serikat dan krisis moneter perlu diperhatikan sebagai indikator utama yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia di samping variabel yang lainnya termasuk permintaan uang periode sebelumnya karena terbukti berpengaruh positif dan signifikan memengaruhi permintaann uang dalam periode analisis. Peredaran jumlah uang harus tetap dikontrol dan dikendalikan melalui apakah dengan Operasi Pasar Terbuka, (OPT), kebijakan uang ketat (*tight money policy*), peningkatan giro wajib minimum (*reserve requirement*) atau bahkan dengan himbauan moral (*moral persuasion*) karena permintaan uang berdampak pada penurunan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi. Secara parsial masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap permintaan uang (M_2) di Indonesia.

Sebaiknya bagi para pengambil kebijakan (pemerintah serta otoritas moneter), dalam menetapkan kebijakan untuk menciptakan perekonomian yang stabil (khususnya dalam menjaga kestabilan tingkat inflasi) mengambil langkah-langkah untuk menjaga agar jumlah uang beredar tunai di masyarakat tidak terlalu berlebihan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi yang tinggi adalah mengurangi jumlah uang beredar dengan cara meningkatkan suku bunga tabungan dan deposito, selain itu pemerintah juga harus menjaga kestabilan nilai tukar mata uangnya agar masyarakat tidak melakukan spekulasi yang berlebihan serta mempertahankan keamanan dan kestabilan ekonomi dan politik, sehingga masyarakat mempunyai keyakinan dan kenyamanan dalam pola memegang uang.

BAB VIII

UANG DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

8.1 Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan target primer terhadap pelaksanaan pembangunan bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk mengakselerasi pencapaian tingkat kesejahteraan hidup yang tinggi bagi masyarakat. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara berkembang juga dimaksudkan agar dapat mengejar ketertinggalan pembangunan dibandingkan dengan negara lain utamanya negara yang sudah mapan secara ekonomi (Krisna, 2018). Meskipun demikian, pencapaian dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah tanpa hambatan. Hambatan utama yang dihadapi oleh negara berkembang adalah keterbatasan ekuitas untuk membiayai berbagai aktifitas pembangunan yang dilaksanakannya.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu mekanisme perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat pula dimaknai sebagai proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang dikejewantahkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Setiap periodenya aktifitas perekonomian domestik mengalami pertumbuhan, baik dilihat melalui pendapatan nasional maupun jumlah uang beredar, hal ini berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dan Pemerintah harus tepat. Karena faktor pendorong terjadinya perekonomian tidak hanya disebabkan dari domestik melainkan pula faktor yang disebabkan oleh pihak global. Stabilitas perekonomian wajib hukumnya untuk dijaga sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terkendali dan membuat masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan aktifitas ekonomi. Saat ini kegiatan perekonomian di Indonesia tidak hanya tertuju pada pasar domestik, karena semakin tumbuhnya perkembangan zaman mengakibatkan pasar global menjadi

faktor lain yang harus diperhatikan. Apabila faktor tersebut tidak diperhatikan akan menimbulkan kegiatan ekonomi yang disequilibrium.

Uang memainkan peranan yang penting (signifikan) dalam perekonomian hal tersebut terekam dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Asnawi dan Fitria (2018) menjelaskan uang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berarti memberikan bukti semakin meningkat jumlah uang beredar maka dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini terkait karena dengan peningkatan jumlah uang beredar, maka masyarakat akan menempatkan sebagian dananya untuk konsumsi sehingga membuat produsen memproduksi barang lebih banyak kemudian permintaan akan faktor produksi meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada pendapatan perkapita kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal yang sama juga ditemui melalui hasil studi empiris yang dilakukan Krisna, Dian dan Nuratama (2019), yang memberi penegasan bahwasannya semakin tinggi pendapatan nasional maka akan memberi kecenderungan memperlebar volume transaksi dan semakin besar pula kebutuhan uang untuk memenuhi tujuan transaksi, spekulasi maupun untuk berjaga-jaga. Peningkatan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi memberikan indikasi membaiknya perekonomian suatu negara. Sukirno (2008) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat akan meningkat.

Kemakmuran masyarakat yang meningkat tentunya seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Bila pendapatan masyarakat meningkat maka permintaan terhadap uang juga akan meningkat. Jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan pendapatan nasional (masyarakat) nantinya akan mempengaruhi peningkatan permintaan uang secara umum, begitu pula sebaliknya peningkatan permintaan uang secara proporsional akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

8.2 Personifikasi Uang Beredar

Peranan uang sangat penting dalam perekonomian. Seluruh barang dan jasa dalam perekonomian dinilai dengan satuan uang. Seiring dengan perkembangan perekonomian atau dalam perekonomian modern, uang memiliki fungsi yang beragam tidak hanya sebatas sebagai alat tukar lagi, namun juga sebagai alat satuan hitung, alat penyimpanan nilai, sebagai ukuran pembayaran yang tertunda, dan mata uang komoditi (*Commodity Currency*). Jenis dan bentuk uang pun tidak lagi hanya pada uang kertas dan

logam atau biasa disebut dengan uang kartal, tetapi ada juga berbagai jenis dan bentuk uang lainnya, seperti kartu kredit, rekening atau simpanan uang masyarakat di bank dan sebagainya. Semakin berkembangnya perekonomian semakin luas pula peranan uang.

M_1 diartikan sebagai uang tunai (uang kertas dan logam) yang dipegang oleh masyarakat tidak termasuk uang yang ada di kas bank serta kas negara. Uang tersebut dikenal dengan uang kartal kemudian ditambah uang yang berada dalam rekening giro perbankan yang dapat langsung digunakan dengan menguangkan cek. Cek tersebut dikenal sebagai uang giral. Pengertian uang giral di atas hanya mencakup saldo rekening koran/ giro milik masyarakat umum yang disimpan di bank dan belum digunakan pemiliknya untuk membayar/berbelanja (Boediono, 2001).

Jumlah uang beredar dalam arti sempit hanya meliputi uang kartal dan uang giral. Jumlah uang dalam arti sempit ini akan lebih banyak peranannya pada perekonomian yang masih sederhana. Semakin maju perekonomian suatu negara, maka konsep uang beredar yang berlaku akan semakin kompleks seiring perkembangan kebutuhan akan uang sebagai alat tukar yang efektif dan efisien.

Mansoor (1992) memberi definisi tegas tentang M_2 yang merupakan perluasan definisi M_1 yaitu penjumlahan M_1 dengan uang kuasi adalah bentuk kekayaan finansial yang sangat likuid. Deposito berjangka ataupun rekening tabungan pada bank-bank komersial termasuk ke dalam pengertian uang kuasi. Uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan ini sebenarnya adalah juga daya beli potensial bagi pemilikinya, meskipun tidak semudah uang tunai atau cek untuk menguangkannya. Friedman (1956) dalam Boediono (2016) menyebut kekayaan semacam ini *temporary abodes of purchasing power* atau “tempat menginap” sementara bagi daya beli.

M_2 digunakan karena sifatnya yang relatif mudah untuk mempengaruhi tingkat inflasi. Teori Kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher yaitu $M.V = P.T$ juga mendefinisikan M_2 sebagai jumlah uang kartal plus uang giral, sedangkan definisi yang paling luas dikenal dengan M_3 yang merupakan penjumlahan dari M_2 dengan semua deposito pada lembaga-lembaga keuangan yang lainnya (non bank).

8.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang yang dihasilkan oleh perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka terdapat tiga aspek

yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi, yakni adanya proses pertumbuhan, *output* per kapita dan jangka waktu yang panjang dalam pertumbuhan ekonomi (Boediono, 2016). Aspek pertama menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang berlangsung secara dinamis dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Aspek kedua adalah *output* per kapita yang menunjukkan *output* total dibandingkan dengan jumlah penduduk. Sedangkan aspek ketiga menunjukkan bahwa suatu pertumbuhan ekonomi dapat terjadi bila kenaikan *output* per kapita terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan, maka terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni : terdapatnya akumulasi modal, pertumbuhan penduduk khususnya pertumbuhan angkatan kerja dan terdapatnya kemajuan teknologi (Todaro, 2011).

8.3.1 Teori Pertumbuhan Harrod Domar

Teori Harrod Domar merupakan pengembangan dari teori ekonomi makro Keynes dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut Harrod Domar pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh dari akumulasi tabungan yang dilakukan oleh penduduk, sehingga bermanfaat bagi kegiatan investasi. Secara matematis model pertumbuhan Harrod Domar dapat dituliskan sebagai berikut :

$g = s/v \dots\dots\dots (8.1)$

Dimana notasi *g* merupakan pertumbuhan ekonomi, *s* menunjukkan *marginal propensity to save* dan notasi *v* merupakan rasio antara modal dengan output (*Capital Output Ratio*).

Persamaan (8.1) tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi tergantung pada tabungan dan perbandingan modal dengan output. Menurut Harrod Domar hanya pada kondisi dimana $g = s/v$, pertumbuhan dalam kapasitas output akan sesuai dengan pertumbuhan permintaannya. Bila tingkat pertumbuhan yang terjadi melenceng dari jalur semestinya (*warranted or natural rates*), maka akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam perekonomian. Pada keadaan ini tidak terjadi adanya penyesuaian sendiri ke posisi keseimbangan yang diharapkan. Kondisi dimana keseimbangan yang terjadi melenceng dari jalur semestinya disebut sebagai *knife edge*, sehingga memerlukan campur tangan pemerintah agar terjadi keseimbangan yang diharapkan.

8.3.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan Neoklasik yang dikembangkan oleh Solow (1956) dan pengikutnya didominasi oleh pemikiran mengenai pertumbuhan pendapatan per kapita dalam jangka panjang dan perkembangan yang semakin meningkat. Dalam teorinya Solow memfokuskan perhatiannya pada proses pembentukan modal. Menurutnya tingkat tabungan merupakan tambahan pembiayaan terhadap stok modal nasional. Perekonomian dengan rasio K/L rendah, akan memiliki tambahan pendapatan modal (*marginal productivity of capital*) yang tinggi. Kemudian bila sebagian pendapatan ditabung, maka akan terjadi kenaikan dalam investasi. Sehingga hal ini akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan Neoklasik muncul guna mengkritisi pendapat Harrod Domar mengenai pertumbuhan yang stabil. Menurut Neoklasik keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi tidak kaku seperti pada pendapatnya Harrod dan Domar. Bila pada Harrod Domar perbandingan antara modal dan tenaga kerja (K/L) dianggap tetap, maka dalam teori pertumbuhan Neoklasik dinyatakan bahwa perbandingan tersebut bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan yang mempengaruhinya. Sehingga keseimbangan yang dihasilkan tidak bersifat kaku. Dengan kata lain perekonomian dimungkinkan tidak berada dalam keseimbangan, meskipun dalam perkembangan berikutnya akan terdapat kekuatan yang menyebabkan kondisi keseimbangan tercapai lagi.

Teori pertumbuhan Neoklasik dapat diuraikan ke dalam suatu fungsi produksi *Cobb-Douglas*, dimana output merupakan fungsi dari tenaga kerja dan modal. Sedangkan tingkat kemajuan teknologi merupakan variabel *eksogen*. Asumsi yang dipakai dalam model neoklasik adalah adanya *constant return to scale*, adanya substitusi antara modal dan tenaga kerja dan adanya penurunan dalam tambahan produktivitas (*diminishing marginal productivity*). Fungsi produksi *Cobb-Douglas* yang dimaksud adalah :

$$Q = f(K,L) \dots\dots\dots (8.2)$$

dimana Y merupakan tingkat output, K merupakan modal dan L merupakan tenaga kerja. Persamaan outputnya dapat ditulis menjadi :

$$Q = bK^\alpha L^{1-\alpha} \dots\dots\dots (8.3)$$

dimana Q merupakan tingkat output, b merupakan tingkat kemajuan teknologi, K merupakan modal, L merupakan tenaga kerja, α dan $1-\alpha$ merupakan elastisitas output terhadap input modal dan tenaga kerja.

Oleh karena itu menurut teori Neoklasik, negara miskin dengan tingkat rasio modal terhadap tenaga kerja (k) rendah dapat memiliki tambahan produktivitas modal (*marginal productivity of capital*= Q/K) yang tinggi, sehingga akan dapat meningkatkan pertumbuhannya guna mengejar ketertinggalannya dengan negara maju. Hal ini karena di negara maju terjadi pertambahan hasil yang semakin menurun (*diminishing marginal of capital*). Sehingga menurut teori pertumbuhan Neoklasik akan terjadi konvergenitas pendapatan perkapita antar negara negara miskin dengan negara maju.

8.3.3 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori Pertumbuhan endogen merupakan suatu teori pertumbuhan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang bersumber dari dalam suatu sistem. Teori pertumbuhan endogen muncul sebagai kritik terhadap teori pertumbuhan Neoklasik mengenai *diminishing marginal productivity of capital* dan konvergenitas pendapatan di berbagai negara. Berdasarkan studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak adanya konvergenitas pendapatan di berbagai negara. Hal ini karena pada negara-negara yang sudah maju, telah mengembangkan teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Kemajuan teknologi tersebut salah satunya didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mereka dapat melakukan inovasi teknologi yang dapat memberikan manfaat besar terhadap pembangunan. Sehingga walaupun negara berkembang mampu meningkatkan akumulasi modal fisiknya, akan tetapi perkembangan tersebut belum dapat mengejar ketertinggalan dengan negara maju. Dalam hal ini teori pertumbuhan endogen menjelaskan mengapa akumulasi modal tidak mengalami *diminishing return*, tetapi justru mengalami *increasing return* dengan adanya spesialisasi dan investasi di bidang sumber daya manusia

Teori pertumbuhan endogen memiliki tiga elemen dasar, yakni; pertama, perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui proses akumulasi pengetahuan ; kedua, adanya penciptaan ide baru oleh perusahaan sebagai akibat adanya mekanisme *spillover* dan *learning by doing* dan ketiga, produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh fungsi produksi pengetahuan yang tumbuh tanpa batas.

Teori pertumbuhan endogen merupakan awal kebangkitan dari pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini seiring dengan perkembangan dunia yang ditandai oleh perkembangan teknologi modern yang digunakan

dalam proses produksi. Sehingga permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijelaskan secara baik oleh teori Neoklasik, seperti penjelasan mengenai *decreasing return to capital*, persaingan sempurna dan eksogenitas teknologi dalam model pertumbuhan ekonomi.

Munculnya teori pertumbuhan endogen dapat dinyatakan dalam suatu persamaan : $Y=AK$, dimana Y merupakan tingkat output, A menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi, sedangkan K merupakan stok modal fisik dan sumber daya manusia. Dalam model pertumbuhan tersebut tidak terjadi penurunan hasil yang menurun dari modal (*diminishing marginal of capital*) seperti pada teori neoklasik. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai eksternalitas (sumber daya manusia, kemajuan teknologi) yang dapat mengimbangi berbagai kecenderungan terjadinya penurunan hasil output.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2009. *Ekonomi Indonesia Baru (Kajian dan Alternatif Solusi Menuju Pemulihan)*. Jakarta : PT Gramedia
- Asnawi, Fitria,. H. 2018. Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*. VII (01).
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 1985-2004. *Statistik Indonesia*. Indonesia.
- _____. 2007. *Laporan Perekonomian Indonesia 2007*. Jakarta.
- _____. 1990-2018. *Statistik Indonesia*. Indonesia
- _____. 2017. *Laporan Tahunan 2017*. Jakarta
- _____. 2018. *Laporan Tahunan 2018*. Jakarta.
- Bank Indonesia.1990-2006. *Statistik Keuangan Ekonomi Indonesia*. Jakarta.
- _____. 2002. *Laporan Tahunan 2002*. Jakarta.
- _____. 2002. *Laporan Triwulanan Perkembangan Moneter, Sistem Pembayaran, dan Perbankan Volume 2, No. 1, Januari-Maret 2002*. Jakarta.
- _____. 2004. *Bank Indonesia : Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta : PPSK.
- _____.2006. *Bank Indonesia : Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta : PPSK.
- _____.2008. *Bank Indonesia : Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta : PPSK.
- Bank Indonesia.1990-2018. *Statistik Keuangan Ekonomi Indonesia*. Jakarta
- Bahmani-Oskooee, M dan Wang, Y.2014. How Stable is The Demand for Money in China ? *Journal of Economic Development*, Volume 32, No. 1 June, 2014, pp (21-33)
- Bendesa. I Komang Gde. 2007. *Ekonometrika*. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Boediono. 2001. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 : Ekonomi Makro*. Edisi 4. Cetakan Kedua puluh. Yogyakarta : BPFE.

- Boediono. 2016. *Ekonomi indonesia : Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung :Mizan
- Brunnermeier, M. Sannikov, Y. 2016. The I Theory of Money. *NBER Working Paper* No. 22533. August, 2016. pp (2-65)
- Chartered, Standard. 2019. *Top Countries by Nominal GDP using PPP Exchange Rates by the Year 2030*. Diakses 12 Maret 2019. <https://economy.okezone.com>
- Darmansyah, Firman. 2003. *Terobosan Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta : Forum Kampus Kuning
- Deliarnov. 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Dewi, Mujiati, Sriathi. 2017. *Elaborasi dan Nilai – Nilai Manajemen Hindu Dalam Organisasi Modern*. Forum Manajemen Volume 15 Nomor 1 Tahun 2017. Pp (1-11)
- Dornbusch dan Fischer. (Mulyadi, Penerjemah). 1997. *Ekonomi Makro*. Jakarta : Erlangga.
- Friedman, Adam. 2008. *International Monetary Policy*, Kedlington. Des.Vol 27.ISS.8 Pg.1199.
- Ghozali, Imam, 2017. *Analisis Multivariate dan Ekonometrika*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____.2017. *Analisis Multivariate dengan Program IBM*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati. 2010. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga
- Gorda, I Gusti. 1995. Nilai - Nilai Agama Hindu dan Etika Ekonomi Wirausahawan Bali. *Disertasi*. Universitas Airlangga. Surabaya
- Insukindro. 1995. *Ekonomi Uang dan Bank, Teori dan Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : BPFE.
- Iswardono.1999. *Uang dan Bank*. Edisi 4. Cetakan Keenam. Yogyakarta : BPFE.
- Hwang, J.K. 2010. The Demand for Money in Korea : Evidence from the Cointegration Test. *IAER* : August 2002, Vol. 8, No. 3 pp (188-195)
- Jeffery, Curry. 2011. *Memahami Ekonomi Internasional*. Jakarta : Victory Jaya Abadi.
- Kadjeng, Njoman. 2007. *Sarasamuccaya dengan Teks Bahasa Indonesia dan Jawa-Kuna*. Denpasar : Pemerintah Provinsi Bali.

- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- _____. 2015. *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- _____. 2018. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Littermann, R.B., 2005. *Money, real interest rate and output : a Reinterpretation of Postwar USA*, *Econometrica*.
- Mansoer, Farid Wijaya. 1992. *Ekonomikamakro*. Edisi 3. Cetakan Pertama. Yogyakarta : BPF.
- Mankiw, Gregory. 2012. *Makroekonomi*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Nachrowi PhD & Usman Hardius MSi, 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta : FE UI Depok
- Natsir, M. 2014. *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Kendari : Mitra Wacana Media
- Negara, Worda. 2018. *Mutiara Weda : Tri Semaya*. Yogyakarta : Widya Sabha Sasmitha.
- Prawoto, N. 2010. Permintaan Uang di Indonesia : Konsep Keynesian dengan Pendekatan PAM. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* Vol. 1 No. 1, April 2010: pp (1-13)
- Sabirin, Syahril. 2003. *Perbankan Indonesia : Ekonomi Rakyat dan Pemulihan Ekonomi*. Jakarta
- Sanjaya, Krisna. 2018. *Metode Mudah Memahami Pengantar Ekonomi Makro*. Denpasar : Penerbit CV. Dharmastuti
- Sanjaya, P. K. A. (2018). Etika Bisnis dan Entrepreneurship dalam Pembangunan Ekonomi Bali: dalam Perspektif Hindu. *Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 1(18).
- Sanjaya, P. K. A., Wimba, I. G. A., & Kawiana, I. G. P. (2019). Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi Bali : Analisis Partial Adjustment Model. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 131-138.
- Sanjaya, P.K.A , Dian, P.A., & Nuratama,P. (2019). The Determinant of Demand for Money (M_2) in Indonesia : Analysis of Ordinary Least Square Model. *GAP GYAN –A Global Journal of Social of Sciences*, II (2) ,68-77
- Setiadi, I.O. (2013). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Uang di Indonesia tahun 1990 - 2010 dengan

- Pendekatan Error Correction Model (ECM). *Economics Development Analysis Journal* 2 (1) (2013) pp : (1-9)
- Setiawina, Djinar. 2011. *Ekonomi Moneter*. Denpasar : Lembaga Penerbit Universitas Udayana
- _____. 2016. *Harapan Rasional Ekonomi Makro*. Denpasar : Penerbit Andi
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : CV Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2012. *Makro Ekonomi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Suardana, Raka, I.B. 2016. Menggagas *Hindukonomi*. Diakses 14 Agustus 2018. <http://phdi.or.id/artikel/menggagas-hindukonomi>.
- Skrabic, B. Plazibat, T. 2012. Evidence of The Long Run Equilibrium Between Money Demand Determinants in Croatia. *Word Academy of Science, Engineering and Technology* 49 . pp (578-581)
- Tambunan, Tulus. 2015. *Perekonomian Indonesia Era Orde lama Hingga Jokowi* . Bogor : Ghalia Indonesia
- Todaro,P., Smith,C. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Utama, Suyana. 2017. *Ekonometrika*. Denpasar : Penerbit CV Sastra Utama.
- Valadkhani, Abas. 2015. Long and Short run Determinants for The Demand of Money in The Asian Pasific Countries : An Empirical Panel Investigation. *Annals of economics and Finance* 9 (1), 2015. pp (47-60)
- Warjiyo, Perry. 2004. *Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Waluyo, Budi. 22 Juni 2018. Rupiah Tertekan Hingga Akhir 2018. *Balipost*, hlm. 1
- Widarjono, Agus.2005. *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Ekonisia.
- Widodo, Arif. 2015. Faktor-faktor Makroekonomi yang Mempengaruhi Permintaan Uang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* Vo. 1 No. 1, April 2015 : pp (63-72)
- Winarno, Wahyu. 2015. *Aplikasi Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

- _____.2017. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Yuliadi, Imamudin. 2008. *Ekonomi Moneter*. Jakarta : PT Macan Jaya Cemerlang
- Yudanto, N., & Santoso, s. 1998. Dampak Krisis Moneter Terhadap Sektor Riil. *Bulletin Ekonomi dan Perbankan*. Jakarta.
- Zaome, A. 1997. Microfoundation for a stable Demand for Money Function, *Economic Journal*.

GLOSSARY

A

Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT): metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*).

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok.

B

Bank: sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.

Bank Dunia: merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal.

Bank Sentral: suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut.

Bunga Pinjaman: bunga yang diberikan pada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank

Bunga Simpanan: bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank.

C

Cek: perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk.

Catur Purusa Artha : tujuan hidup manusia menurut ajaran Hindu yang terdiri dari *dharma* (kebenaran), *artha* (materi), *kama* (keinginan) dan *moksa* (bersatunya *jiwatman* dengan *paraatman*)

D

Daya Beli: kemampuan membayar untuk memperoleh barang yang dikehendaki atau diperlukan.

Deposito: produk jasa simpanan berjangka di Bank yang menjanjikan bunga lebih tinggi daripada tabungan biasa

Diskresi: keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

E

Ekonomi: merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa

Ekspor: penjualan barang ke luar negeri

Eksportir: seseorang atau badan atau perusahaan atau instansi yang melakukan kegiatan penjualan, pengiriman dan/atau pengeluaran barang atau produk dari batas wilayah suatu negara ke negara yang lain.

Economic Equilibrium: kondisi dimana titik harga suatu barang / jasa terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran yang merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual dimana kuantitas barang / jasa yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya.

Economic Disequilibrium: kondisi dimana titik harga suatu barang / jasa terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran yang merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual dimana kuantitas barang / jasa yang diminta dan yang ditawarkan tidak sama besarnya.

F

Fasilitas Diskonto (*discount window*): yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian (*mismatch*) pengelolaan dana yang bersifat sementara.

Forecasting (Peramalan): kegiatan memperkirakan atau memprediksikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu yang relative lama.

G

Geopolitik : Ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dihubungkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal sebuah bangsa.

Giro Wajib Minimum (GWM): jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank setiap hari.

Gross Domestic Product (GDP): nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun.

Gross National Product (GNP): nilai dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi domestik dalam negeri dalam suatu periode tertentu

H

Harga Konstan: harga barang dan jasa yang dihitung menurut harga tahun tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan faktor deflator.

I

Impor: proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain

Inflasi: kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus

Inflasi Ganas (*Galloping Inflation*): Ditandai dengan kenaikan harga cukup tinggi (*double* bahkan *triple digit*), dan berjalan dalam jangka waktu relatif pendek yang bersifat akselerasi.

Inflasi Karena Banyak Permintaan (*Demand Full Inflation*): Inflasi jenis ini disebabkan karena kelebihan permintaan efektif: pembelanjaan masyarakat ($C + I + G + X_n$) terlalu besar (atau naik terlalu cepat) sehingga tidak dapat dilayani oleh dunia usaha.

Inflasi Karena Dorongan Biaya (*Cost-Push Inflation*): Jenis inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi disebut *cost-push inflation*. Kenaikan biaya produksi “mendorong” harga-harga ke atas.

Inflasi Karena Struktur Permintaan Yang Berubah Cepat (*Bottleneck Inflation*): Yang dimaksud adalah kenaikan tingkat harga dapat juga timbul tanpa naiknya permintaan total atau jumlah uang beredar, jika struktur permintaan berubah lebih cepat dari pada mobilitas sumber-sumber.

Inflasi Merayap Atau Moderat (*Creeping Inflation*): Ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10 % per tahun). Kenaikan harga berjalan lambat, dengan persentase kecil, dan dalam jangka waktu lama.

Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*): Merupakan inflasi paling parah akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali.

Inflasi Yang Berasal Dari Dalam Negeri (*Domestic Inflation*): Inflasi ini timbul karena terjadi defisit anggaran belanja yang dibiayai oleh pemerintah dengan pencetakan uang baru, karena panen gagal dan akibat-akibat lain sebagainya.

Inflasi Yang Berasal Dari Luar Negeri (*Imported Inflation*): Inflasi ini timbul karena kenaikan harga-harga (yaitu, inflasi) di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang kita.

Integrasi: sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

International Monetary Fund (IMF): organisasi internasional yang bertujuan memperlancar kerja sama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia.

Investasi: suatu aktivitas menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan dan/atau peningkatan nilai investasi.

K

Kartu Kredit: Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi

pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Kebijakan Fiskal: merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Kebijakan Moneter: Regulasi jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan mata uang.

Kebijakan Moneter Murni: kebijakan moneter yang tidak disertai oleh berubahnya nilai pengeluaran pemerintah, pajak, dan *transfer payment*.

Keseimbangan Moneter: keseimbangan antara permintaan akan uang atau kredit dari masyarakat dan penawaran uang (oleh dunia perbankan) sedemikian rupa sehingga jumlah uang beredar (*money supply*) tepat cukup untuk melayani permintaan efektif masyarakat

Komprensif: segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap, meliputi seluruh aspek, atau meliputi ruang lingkup yang luas.

Konstan: sesuatu yang tidak pernah berubah atau tidak ada variasi.

Konsumsi: suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus.

Korelasi: hubungan

Kredit: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Krisis Ekonomi: keadaan yang mengacu pada penurunan kondisi ekonomi drastis yang terjadi di sebuah negara.

Kurs (Nilai Tukar): sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.

Kurs Valuta Asing: perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukarkan dengan nilai mata uang dalam negeri.

L

Letter of Intent (LOI): suatu surat resmi bisnis, yang secara hukum tidak mengikat para pihak tersebut didalamnya, dibuat oleh seorang pemilik bisnis, pengusaha, atau perusahaan, untuk menyampaikan ketertarikan, keinginan, niat, minat, atau maksud bisnis secara serius, rinci, ringkas dan jelas, dan tindakan lanjut dan transaksi akan dilakukan, dan kemampuan untuk melaksanakannya, kepada pemilik bisnis, pengusaha, atau perusahaan lain.

Liberalisasi: dari ekonomi artinya membebaskannya dari kontrol langsung atau fisik yang dilakukan oleh pemerintah.

Likuiditas: kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.

M

Makro Ekonomi: studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar.

Mata Uang Komoditi (*Commodity Currency*): mata uang yang nilainya sangat dipengaruhi oleh harga komoditi ekspor yang dihasilkan oleh negara yang menggunakan mata uang tersebut.

Mikro Ekonomi: cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjual-belikan.

Moneter: uang, keuangan, sehubungan uang, serta semuanya yang berkaitan dengan uang.

Motif Berjaga-Jaga: sebuah niatan untuk menyimpan sebagian uang yang dimiliki dalam rangka antisipasi terhadap situasi yang kurang menguntungkan di masa depan.

Motif Spekulasi: keinginan untuk memegang uang agar siap untuk memanfaatkan setiap kesempatan investasi yang menarik membutuhkan pengeluaran kas yang mungkin timbul.

Motif Transaksi: dorongan orang memegang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga perusahaan.

O

Obligasi: suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.

Otoritas Moneter: suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang.

P

Operasi Pasar Terbuka (OPT): kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka Operasi Moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter.

Penawaran Uang: jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu.

Pendapatan Nasional: jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu

Pengeluaran Agregat: perbelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian dalam waktu tertentu.

Perekonomian Global: merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia.

Perekonomian Indonesia: merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Permintaan Uang: merupakan sejumlah uang yang diminta atau yang diinginkan oleh masyarakat untuk tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi.

Pertumbuhan Ekonomi: adalah suatu mekanisme perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu

Product Domestic Bruto (PDB): nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB): besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah.

Produksi: suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan.

Proporsional: sebanding lurus dan berimbang.

R

Real Estate: sebuah istilah hukum yang mencakup tanah bersama dengan apa pun yang tinggal tetap di atas tanah tersebut, seperti bangunan atau proyek.

Reserve Requirement: ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihipunkannya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada bank Indonesia.

Rush: pengambilan uang besar-besaran secara serentak oleh masyarakat

S

Saham: surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI): surat berharga yaitu dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga.

Stabilitas Moneter: suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi, atau bisa juga diartikan dengan terhindarnya suatu negara dari krisis moneter atau keuangan.

Stabilitas Perekonomian: prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan.

Stagnan: terjadi ketika pertumbuhan ekonomi berjalan lambat (biasanya diukur berdasarkan pertumbuhan GDP) pada suatu periode tertentu.

Strategis: pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Studi Empiris: studi yang dilakukan berdasarkan data-data eksperimental hasil pengamatan, pengalaman, trial and error (uji coba).

Suku Bunga: nilai, tingkat, harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu.

T

Tabungan: simpanan dalam bentuk rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan untuk itu.

Time Lag (Jeda Waktu): Jarak atau jeda waktu antara fenomena yang terjadi sampai dengan adanya efek yang terasa di masyarakat karena adanya suatu kebijakan

Tingkat Bunga: harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu

Tri Samaya : tiga kurun waktu dalam ajaran Hindu yang digunakan untuk menilai keadaan yang terdiri atas *atita* (masa lalu), *wartamana* (masa kini) dan *anagatha* (masa depan).

U

Uang: alat pembayaran atau alat pertukaran

Uang Giral: dana yang disimpan pada saldo rekening koran atau giro (*Demand deposit* atau *checking account*)

Uang Kartal: mata uang logam dan uang kertas yang beredar dalam masyarakat (di luar perbankan). alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

Uang Kas: uang simpanan atau uang yang terhimpun dari anggota maupun dari kerja/usaha disuatu organisasi/usaha.

Uang Kertas: uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

Uang Kuasi: surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Biasanya uang kuasi ini terdiri atas deposito berjangka dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik.

Uang Primer: uang kartal dan simpanan giro bank umum. Disebut primer / inti karena jenis uang ini merupakan inti atau “biang” dalam proses penciptaan uang beredar.

Uang Tunai: uang (berupa koin atau uang kertas) yang beredar di masyarakat umum dan digunakan sebagai alat pembayaran dalam aktivitas perdagangan barang dan jasa.

V

Valuta Asing: mata uang tiap-tiap negara di dunia

Variabel: objek penelitian, atau apa yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian, baik yang berbentuk abstrak maupun real.

INDEKS

A

Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) : 69

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) : 60

B

Bank Dunia : 43

Bank Sentral : 4, 6, 10, 27, 29, 46, 48, 53, 58, 62, 77

Bunga Pinjaman : 29, 41

Bunga Simpanan : 28, 29, 55

C

Cek : 3, 4, 11, 79

Catur Purusa Artha : 70, 73

D

Daya Beli : 2-4, 7, 11, 12, 34, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 79

Deposito : 5, 8-11, 29, 40, 49, 50, 55, 58-63, 65, 66, 70, 75, 76, 79

Diskresi : 8

E

Ekspor : 6, 29, 32-34, 55, 68

Eksportir : 29, 32

Economic Disequilibrium : 1

F

Fasilitas Diskonto : 56

Forecasting : 9

G

Geopolitik : 9

Giro Wajib Minimum (GWM) : 56, 76

Gross Domestic Product (GDP) : 26

Gross National Product (GNP) : 26, 58

H

Harga Konstan : 26, 58, 71

I

Impor : 6, 12, 34, 37, 41, 55, 60, 73

Inflasi Inflasi Ganas (*Galloping Inflation*) : 36

Inflasi Karena Banyak Permintaan (*Demand Full Inflation*) : 36

Inflasi Karena Dorongan Biaya (*Cost-Push Inflation*) : 36

Inflasi Karena Struktur Permintaan Yang Berubah Cepat (*Bottleneck Inflation*) : 36

Inflasi Merayap Atau Moderat (*Creeping Inflation*) : 36

Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*) : 36

Inflasi Yang Berasal Dari Dalam Negeri (*Domestic Inflation*) : 37

Inflasi Yang Berasal Dari Luar Negeri (*Imported Inflation*) : 37

Integrasi : 1, 53, 60, 68

International Monetary Fund (IMF) : 43, 44, 52, 53, 56

Investasi : 6, 7, 27-29, 34, 37, 41, 43, 48-51, 55, 62, 63, 80-82

K

Kartu Kredit : 59, 79

Kebijakan Fiskal : 47, 48

Kebijakan Moneter : 1-4, 7, 30, 46-58, 66, 74

Kebijakan Moneter Murni : 2

Keseimbangan Moneter : 3

Komprehensif : 54

Konstan : 13-17, 22, 26, 58, 64-68, 70, 71

Konsumsi : 6-8, 17, 25, 27, 37, 55, 59, 62, 63, 65, 66, 78, 82

Korelasi : 9, 69, 71, 73

Kredit : 2, 3, 6, 29, 32, 47-50, 52, 54-56, 59, 63, 79

Krisis Ekonomi : 1, 41, 44, 46, 51-53, 60, 63, 68

Kurs Valuta Asing : 29, 31-34, 40

L

Letter of Intent (LOI) : 53, 56

Liberalisasi : 49, 50, 55

Likuiditas : 3, 4, 48, 49, 51, 56, 57

M

Makro Ekonomi : 1, 7, 8, 10, 71, 72, 74-76

Mata Uang Komoditi (*Commodity Currency*) : 78

Mikro Ekonomi : 1, 68

Motif Berjaga-Jaga : 17, 18

Motif Spekulasi : 19, 20

Motif Transaksi : 17, 18

N

Nilai Tukar : 1, 6, 7, 29-31, 41, 43, 50-56, 60, 63, 64, 67, 68, 71-74, 76

O

Obligasi : 12, 18-25, 49, 51

Otoritas Moneter : 1-4, 10, 14, 30, 31, 35, 54-58, 72, 74, 76

P

Operasi pasar Terbuka (OPT) : 49, 54, 56, 57, 76

Penawaran Uang : 3, 4, 10, 13-15, 27, 28, 58

Pendapatan Nasional : 13, 16, 17, 23, 26, 58, 61, 62, 64, 75-78

Pengeluaran Agregat : 3

Pengendalian Agregat : 3

Perekonomian Global : 1, 60, 68

Perekonomian Indonesia : 1, 43, 44, 46, 50, 53, 55, 68

Pertumbuhan Ekonomi : 1, 3, 6, 8, 26, 41, 44, 48, 50, 53, 55, 56, 60-64, 71, 72, 75-83

Product Domestic Bruto (PDB) : 9, 31, 72

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) : 71

Produksi : 2, 3, 7, 26, 36, 37, 41, 42, 48, 58, 60, 61, 63, 64, 68, 75, 77, 78, 81, 82, 83

Proporsional : 14, 15, 23, 78

R

Real Estate : 12

Reserve Requirement : 49, 50, 76

Rush : 2, 45, 63, 68

S

Saham : 12, 24, 49, 51

Selective Credit Policy : 49

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) : 49, 57, 63

Stabilitas Moneter : 1, 44, 53

Stabilitas Perekonomian : 1, 7, 10, 77

Stagnan : 8

Strategis : 1, 6, 54

Studi Empiris : 1, 7, 10, 77

Suku Bunga : 2, 6, 8, 9, 19, 23-25, 27, 29, 40-43, 46, 51, 55-59, 61-63, 65, 66, 71, 72, 74-76

T

Tabungan : 5, 9, 11, 12, 27, 29, 49, 50, 66, 76, 79-81

Time Lag (Jeda Waktu) : 69

Tingkat Bunga : 4, 9, 16, 17, 19-21, 25, 27, 28, 58-62, 66, 70, 71, 76

Tri Samaya : 69, 70, 73

U

Uang Giral : 3-6, 9-11, 79

Uang Kartal : 3-6, 10, 11, 46, 57, 79

Uang Kas : 5, 15, 20, 25

Uang Kertas : 3, 4, 6, 11, 78, 79

Uang Kuasi : 2-5, 10, 11, 45, 63, 68, 79

Uang Primer : 2, 49, 53, 56, 57

Uang Tunai : 2, 3, 11, 16, 18, 21-23, 25, 28, 45, 59, 63, 79

V

Valuta Asing : 2, 4, 29-34, 40, 45, 51, 60, 68

Variabel : 9, 14, 15, 17, 25, 54, 55, 57, 61, 62, 64-68, 70, 75, 76, 81